



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**

PENYUSUNAN

RIK **RENCANA
INDUK
KELITBANGAN
KABUPATEN CIREBON**



Laporan Akhir

2021



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**



Kata Pengantar

Laporan ini disusun di bawah kegiatan Kajian Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Cirebon 2019-2024 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cirebon, sebuah kegiatan untuk menentukan tujuan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon.

Agustus, 2021

DAFTAR ISTILAH

Ilmu Pengetahuan	Rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu.
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Roadmap	Rencana kerja rinci yang menggambarkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
Penelitian	Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran suatu asumsi dan atau hipotesa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan dalam negeri dan daerah.
Pengembangan	Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, mafaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru terkait penyelenggaraan pemerintahan negeri
Pengkajian	Penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah
Perekayasa	Kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan susut pandang dan atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika dalam suatu kerja

kelompok fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah

Penerapan

Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri

Pengoperasian

Kegiatan uji pelaksanaan, uji rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektivitas dan efisiensi suatu alternative kebijakan dan atau program terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri

Evaluasi Kebijakan

Suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan intepretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan dalam negeri dan pemerintah daerah



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG	1 - 1
1.2	DASAR HUKUM.....	1 - 2
1.3	TUJUAN DAN SASARAN	1 - 4
1.3.1	Tujuan	1 - 4
1.3.2	Sasaran.....	1 - 4
1.4	RUANG LINGKUP KAJIAN	1 - 4
1.4.1	Ruang Lingkup Materi Kajian	1 - 4
1.4.2	Ruang Lingkup Wilayah Kajian.....	1 - 4
1.5	KEGUNAAN KAJIAN	1 - 5
1.6	METODOLOGI.....	1 - 5
1.7	SISTEMATIKA PENULISAN	1 - 9

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON

2.1	GAMBARAN UMUM WILAAH POTENSI DAN KENDALA PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON	2 - 1
2.1.1	Aspek Geografis dan Demografi	2 - 1
2.1.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	2 - 1
2.1.1.2	Letak dan Kondisi Geografis	2 - 3
2.1.2	Aspek Demografi	2 - 6
2.1.2.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	2 - 6
2.1.2.2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	2 - 10

2.1.2.3	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	2 - 11
2.1.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2 - 12
2.1.3.1	Pertumbuhan PDRB.....	2 - 12
2.1.3.2	PDRB Perkapita	2 - 20
2.1.3.3	Laju Inflasi	2 - 21
2.1.3.4	Indeks Gini	2 - 22
2.1.3.5	Kemiskinan	2 - 23
2.1.3.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2 - 26
2.1.3.7	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	2 - 28
2.1.3.8	Angka Harapan Hidup (AHH)	2 - 29
2.1.3.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2 - 31
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum.....	2 - 34
2.1.4.1	Layanan Urusan Wajib	2 - 34
2.1.4.2	Layanan Urusan Pilihan	2 - 77
2.1.4.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	2 - 92
2.1.5	Aspek Daya Saing Daerah	2 - 96
2.1.5.1	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran.....	2 - 96
2.1.5.2	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran.....	2 - 97
2.1.5.3	Pengeluaran per Kapita.....	2 - 98
2.1.5.4	Sektor Basis dan Non Basis	2 - 99
2.1.6	Standar Pelayanan Minimal.....	2 - 117
2.1.6.1	SPM Bidang Urusan Pendidikan	2 - 117
2.1.6.2	SPM Bidang Urusan Kesehatan.....	2 - 123
2.1.6.3	SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	2 - 124
2.1.6.4	SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	2 - 126
2.1.6.5	SPM Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban	2 - 128
2.1.6.6	SPM Bidang Urusan Sosial	2 - 129
2.2	ISU FAKTUAL PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CIREBON	2 - 130
2.2.1	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	2 - 130
2.2.2	Pengangguran dan Kemiskinan	2 - 131
2.2.3	Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat	2 - 132
2.2.4	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	2 - 132
2.2.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	2 - 133
2.2.6	Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.....	2 - 133
2.2.7	Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah.....	2 - 134
2.2.8	Penangan Pandemi Covid-19 dan Dampak-Dampaknya.....	2 - 135

2.2.9	Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	2 - 136
-------	--	---------

BAB III GAMBARAN UMUM KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON

3.1	KONDISI SUMBER DAYA KELITBANGAN	3 - 1
3.1.1	Kelembagaan.....	3 - 1
3.1.2	Sumber Daya Manusia Kelitbangan.....	3 - 2
3.1.3	Pendanaan Kelitbangan.....	3 - 4
3.2	POTENSI DAN PERMASALAHAN KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON.....	3 - 5
3.2.1	Potensi	3 - 5
3.2.2	Permasalahan	3 - 6
3.3	PELUANG DAN TANTANGAN KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON	3 - 6
3.3.1	Peluang	3 - 6
3.3.2	Tantangan.....	3 - 7
3.4	ISU STRATEGIS KELITBANGAN	3 - 7
3.4.1	Isu Global (RIPP Provinsi Jawa Barat).....	3 - 7
3.4.2	Isu Nasional (RPJMD Jawa Barat)	3 - 7
3.4.3	Indikator Capaian SDG'S Jawa Barat 2017	3 - 8
3.4.4	Tema Kelitbangan Nasional (Rencana Induk Riset Nasional)	3 - 8
3.4.5	Isu Strategi RPJMD Jawa Barat 2018-2023.....	3 - 9
3.4.6	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024	3 - 9
3.4.7	Isu Kelitbangan Kabupaten Cirebon	3 - 9

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKSISTING KABUPATEN CIREBON

4.1	ARAH PEBANGUNAN DAERAH.....	4 - 2
4.1.1	Arahan Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah	4 - 2
4.1.2	Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Cirebon	4 - 3
4.1.2.1	Visi	4 - 3
4.1.2.2	Misi	4 - 4
4.2	ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELITBANGAN DAERAH	4 - 5
4.3	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN DAERAH	4 - 18

BAB V EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.1	EVALUASI SISTEM INOVASI DAERAH DI KABUPATEN CIREBON	5 - 1
5.1.1	Karakter Inovasi	5 - 1
5.1.2	Komponen Inovasi	5 - 3
5.1.3	Input dan Proses Sistem Inovasi Daerah.....	5 - 5
5.1.4	Penyelenggaraan Inovasi	5 - 6
5.2	EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN KABUPATEN CIREBON.....	5 - 17
5.3	ANALISA GAP, MAPPING DAN TREND DAN TANTANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL	5 - 20
5.4	ANALISA KESESUAIAN USULAN KEBUTUHAN LITBANG DAN PROGRAM/KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON	5 - 22

BAB VI KONSEP STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN CIREBON 2019-2024

6.1	KONSEP STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN CIREBON	6 - 1
6.2	STRATEGI PENELITIAN	6 - 2
6.3	ROADMAP KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON 2019-2024	6 - 4



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kebutuhan Data.....	1 - 7
Tabel 2.1	Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kelompok Kecamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2019.....	2 - 2
Tabel 2.2	Luas Morfologi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon	2 - 4
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016–2020.....	2 - 7
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2020	2 - 8
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2020	2 - 10
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku.....	2 - 13
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Milyar Rupiah), 2016-2020	2 - 15
Tabel 2.8	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (persen),.....	2 - 16
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Prodk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2016-2020	2 - 18
Tabel 2.10	PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.....	2 - 20
Tabel 2.11	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 23
Tabel 2.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2016–2020	2 - 24
Tabel 2.13	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.....	2 - 25
Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020	2 - 27
Tabel 2.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat 2019 (Persen).....	2 - 31

Tabel 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	2 - 33
Tabel 2.17	Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020....	2 - 34
Tabel 2.18	Sarana Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020	2 - 38
Tabel 2.19	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 38
Tabel 2.20	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit),	2 - 39
Tabel 2.21	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2020	2 - 40
Tabel 2.22	Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon Tahun 2019	2 - 40
Tabel 2.23	Capaian Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020.....	2 - 40
Tabel 2.24	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 44
Tabel 2.25	Panjang Jalan Kabupaten (km) di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020.....	2 - 45
Tabel 2.26	Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	2 - 46
Tabel 2.27	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 47
Tabel 2.28	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020	2 - 48
Tabel 2.29	Jumlah Pelanggan Air Bersih PDAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 48
Tabel 2.30	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 48
Tabel 2.31	Capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	2 - 49
Tabel 2.32	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....	2 - 50
Tabel 2.33	Capaian Bidang Sosial Tahun 2016-2020.....	2 - 51
Tabel 2.34	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 52
Tabel 2.35	Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020	2 - 53
Tabel 2.36	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga Kerja Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 54

Tabel 2.37	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 55
Tabel 2.38	Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2016-2020	2 - 56
Tabel 2.39	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 57
Tabel 2.40	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 57
Tabel 2.41	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 58
Tabel 2.42	Capaian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	2 - 59
Tabel 2.43	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 60
Tabel 2.44	Jumlah Kelompok Binaan LPM dan PKK Kabupaten Cirebon 2016-2018	2 - 61
Tabel 2.45	Indikator Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	2 - 61
Tabel 2.46	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020 ...	2 - 62
Tabel 2.47	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 63
Tabel 2.48	Jumlah Kendaraan Angkutan Pedesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018.....	2 - 64
Tabel 2.49	Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 .	2 - 65
Tabel 2.50	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 66
Tabel 2.51	Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016-2020	2 - 66
Tabel 2.52	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....	2 - 67
Tabel 2.53	Kondisi Perkoperasian dan UMKM Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 68
Tabel 2.54	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....	2 - 68
Tabel 2.55	Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018	2 - 69

Tabel 2.56	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 71
Tabel 2.57	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 72
Tabel 2.58	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 72
Tabel 2.59	Jumlah Publikasi yang Diterbitkan BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 73
Tabel 2.60	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Statistik dan Persandian Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 73
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 74
Tabel 2.62	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 75
Tabel 2.63	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 76
Tabel 2.64	Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Nelayan	2 - 77
Tabel 2.65	Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2021	2 - 78
Tabel 2.66	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 79
Tabel 2.67	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 80
Tabel 2.68	Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2016-2019	2 - 81
Tabel 2.69	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020	2 - 84
Tabel 2.70	Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2020	2 - 85
Tabel 2.71	Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kabupaten Cirebon Tahun 2020 (Ton/Tahun)	2 - 86
Tabel 2.72	Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Cirebon (Kw), 2020	2 - 87
Tabel 2.73	Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Jenis Ternak	2 - 88
Tabel 2.74	Realisasi Kinerja Urusan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	2 - 89
Tabel 2.75	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d.2020	2 - 89

Tabel 2.76	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....	2 - 90
Tabel 2.77	Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 91
Tabel 2.78	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....	2 - 92
Tabel 2.79	Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 93
Tabel 2.80	Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 94
Tabel 2.81	Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 94
Tabel 2.82	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020.....	2 - 95
Tabel 2.83	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Cirebon 2016 - 2019	2 - 97
Tabel 2.84	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran	2 - 97
Tabel 2.85	Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon.....	2 - 100
Tabel 2.86	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 102
Tabel 2.87	Pencapaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Tahun 2017-2018	2 - 118
Tabel 2.88	Pencapaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2018	2 - 123
Tabel 2.89	Pencapaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018	2 - 125
Tabel 2.90	Pencapaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2018.	2 - 127
Tabel 2.91	Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP) Tahun 2018.....	2 - 128
Tabel 2.92	Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketertiban Umum (Pemadam Kebakaran) Tahun 2018.....	2 - 129
Tabel 2.93	Pencapaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2018	2 - 129
Tabel 3.1	Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Menurut Golongan Pangkat Tahun 2020	3 - 3
Tabel 3.2	Pagu Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020	3 - 4
Tabel 4.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon.....	4 - 5
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Cirebon	4 - 10
Tabel 4.3	(Matriks Indikator Kinerja) Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Cirebon	4 - 21

Tabel 5.1	Kondisi Inovasi yang telah dilakukan Kabupaten Cirebon Tahun 2021	5 - 6
Tabel 5.2	Rincian Inovasi yang telah dilakukan Kabupaten Cirebon Tahun 2021	5 - 7
Tabel 5.3	Tema Penelitian yang telah dilakukan Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2021	5 - 18
Tabel 5.4	Usulan Kebutuhan Penelitian berdasarkan Isu Masalah RPJMD Kabupaten Cirebon	5 - 22
Tabel 6.1	Strategi dan Output Strategi Kelitbangan	6 - 2
Tabel 6.2	Roadmap Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan Kabupaten Cirebon 2019-2024.....	6 - 5



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	1 - 6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Cirebon.....	2 - 2
Gambar 2.2	Peta Morfologi.....	2 - 6
Gambar 2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 8
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020.....	2 - 11
Gambar 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	2 - 16
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 19
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Persen)	2 - 19
Gambar 2.8	Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 21
Gambar 2.9	Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019	2 - 22
Gambar 2.10	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2019	2 - 22
Gambar 2.11	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2 - 24
Gambar 2.12	Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2 - 26
Gambar 2.13	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	2 - 28
Gambar 2.14	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	2 - 29
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	2 - 30
Gambar 2.16	Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019	2 - 30

Gambar 2.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 31
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2 - 32
Gambar 2.19	Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 56
Gambar 2.20	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2020	2 - 63
Gambar 2.21	Cakupan Pengembangan dan Pmberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2018	2 - 66
Gambar 2.22	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 69
Gambar 2.23	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 74
Gambar 2.24	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 76
Gambar 2.25	Persentase Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Cirebon, 2020	2 - 80
Gambar 2.26	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020	2 - 90
Gambar 2.27	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cirebon 2016 - 2020	2 - 98
Gambar 2.28	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	2 - 99
Gambar 2.29	Pengeluaran Per Kapita Penduduk menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	2 - 99
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2020	3 - 2
Gambar 3.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2020	3 - 3
Gambar 5.1	Empat (4) Komponen dari Inovasi pada Tata Kelola Pemerintahan	5 - 4
Gambar 5.2	Input dan Proses Inovasi Daerah	5 - 5
Gambar 5.3	Framework Analisis Gap Penelitian	5 - 21
Gambar 6.1	Konsep Strategi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Cirebon	6 - 2



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**

PENYUSUNAN
RIK RENCANA
INDUK
KELITBANGAN
KABUPATEN CIREBON

BAB

1

Pendahuluan

Laporan Akhir

2021



1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan penelitian dan pengembangan sangat berkaitan erat dengan kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen yang berjudul *Research and Development, Innovation and The Science and Engineering Workforce* (2012) kegiatan penelitian dan pengembangan memainkan peran penting dalam mengarahkan perkembangan dan pembangunan di suatu bangsa. Dalam hal ini kegiatan penelitian dan pengembangan wajib dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan di kota/kabupaten di Indonesia sebagai upaya memajukan pembangunan dan mewujudkan tujuan negara Indonesia. Simpul penting yang mampu mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan adalah peran dari lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam menghasilkan temuan-temuan penting yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan daerah.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan pengambilan langkah dan kebijakan, karena rekomendasi yang dihasilkan didukung oleh data dan fakta yang valid. Selain diperlukan dalam hal identifikasi masalah-masalah strategis baik yang bersifat aktual dan potensial, termasuk yang diprediksikan akan dihadapi pemerintah daerah dalam jangka menengah atau jangka panjang, fungsi penelitian dan pengembangan juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Kepala Daerah dalam pengambilan langkah dan kebijakan strategis jangka pendek untuk menyikapi dinamika dan situasi di daerah. Hal ini penting, mengingat hasil-hasil penelitian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat dapat mengarah pada terciptanya efektivitas pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing wilayah serta terwujudnya pemerintahan yang transparan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 menyatakan bahwa riset merupakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah melalui Riset Nasional yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Litbang yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan riset/penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan. Dengan adanya fakta tersebut, sudah seharusnya kegiatan penelitian dilaksanakan secara optimal. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas dan kerangka kebijakan arah penelitian dan pengembangan iptek yang dituangkan dalam kebijakan strategi nasional iptek, yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan dan strategi penelitian di daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Cirebon telah melakukan penelitian sebanyak 26 judul penelitian dalam kurun waktu 5 tahun (Bappeda Kabupaten Cirebon, 2021). Dengan adanya judul penelitian tersebut perlu adanya kajian evaluasi mengenai kemanfaatan dari penelitian yang telah dilakukan. Setelah itu dilakukan penyusunan kerangka penelitian yang sesuai dengan arahan dokumen

RPJMD Perubahan 2019-2024 serta kemanfaatan dilapangan. Hal ini dilakukan agar mampu menciptakan kegiatan pembangunan yang baik dan selaras.

Berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, lembaga penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah untuk kemudian dirumuskan berbagai rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang secara lebih lanjut dilaksanakan oleh OPD.

1.2 Dasar Hukum

Adanya landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Induk Kelitbangan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Pasal 9

- 1) Badan Litbang Daerah dan Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Kerja Kelitbangan
- 2) RIK untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Tahunan

Pasal 10

- 1) Disusun paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan
- 2) RIK ditetapkan baik lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah WAJIB dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD

Pasal 11

Rencana kerja tahunan dimasukkan dalam dokumen RKPD tahun berikutnya

Pasal 12

Penyusunan RIK Badan Litbang Provinsi berpedoman pada

- a. RPJMD Provinsi;
- b. Rencana Induk Kelitbangan Kemendagri;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi

Penyusunan RIK Badan Litbang Kabupaten/Kota berpedoman pada

- a. RPJMD Kabupaten/Kota
- b. Rencana Induk Kelitbangan Kemendagri;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64).
11. Peraturan Menteri Ristekdikti No 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Seri D);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 tahun 2020 tentang Pengusulan Inisiatif, Penilaian, dan Pemberian Insentif Inovasi Daerah di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 tahun 2020 Seri E).

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Kajian Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Cirebon 2019-2024 adalah untuk merumuskan pokok-pokok substansi sebagai arahan dan strategi dalam penetapan kegiatan prioritas penelitian dan pengembangan yang mendorong pencapaian pembangunan Kabupaten Cirebon

1.3.2 Sasaran

Sebagai upaya pencapaian tujuan kegiatan penelitian dan pengembangan ini, dibutuhkan beberapa sasaran yang terdiri dari :

1. Melakukan review dokumen perencanaan dan pembangunan Kabupaten Cirebon;
2. Analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pencapaian dokumen perencanaan dan pembangunan Kabupaten Cirebon
3. Menyusun roadmap penelitian dan pengembangan Kabupaten Cirebon

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Lingkup dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni ruang lingkup wilayah kajian dan ruang lingkup materi penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Materi Kajian

Adapun lingkup materi penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Cirebon dilakukan dengan melihat acuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 bahwa untuk menyusun rencana kelitbangan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Selanjutnya Badan Litbang Daerah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan kelitbangan di provinsi/kota dalam menyusun Rencana Induk Kelitbangan yang berpedoman pada RPJMD Provinsi/Kota, Rencana Induk Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Kerja Pembangunan Provinsi/Kabupaten.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah Kajian

Lingkup wilayah pada penelitian ini secara administratif adalah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 Desa dan 12 Kelurahan.

1.5 Kegunaan Kajian

Manfaat dari kajian ini adalah untuk menentukan substansi bagi penyusunan arah dan strategi penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dengan output dari penelitian ini yang berupa Research and Development (R & D) atau kegiatan penelitian dan pengembangan yang didalamnya tentang isu faktual berdasarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 serta prioritas penelitian dan pengembangan yang dapat dilakukan oleh Litbang BAPPEDA Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 2019-2024

1.6 Metodologi

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode kualitatif yang menekankan pada pelibatan berbagai aktor/stakeholder lokal. Pendekatan partisipatif ini utamanya dilakukan dengan kegiatan survey maupun FGD. Tahapan yang dilakukan pada kajian ini antara lain review dokumen RPJMD perubahan 2019-2024 dan dokumen kemitraan yang ada di Kabupaten Cirebon, interview, FGD, melakukan analisa perbandingan dan klarifikasi pada pelaku pembangunan mengenai kemanfaatan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sehingga nantinya kegiatan penelitian dan pengembangan yang direncanakan kedepan dapat mendukung upaya tercapainya pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon dan terlihat kemanfaatannya.

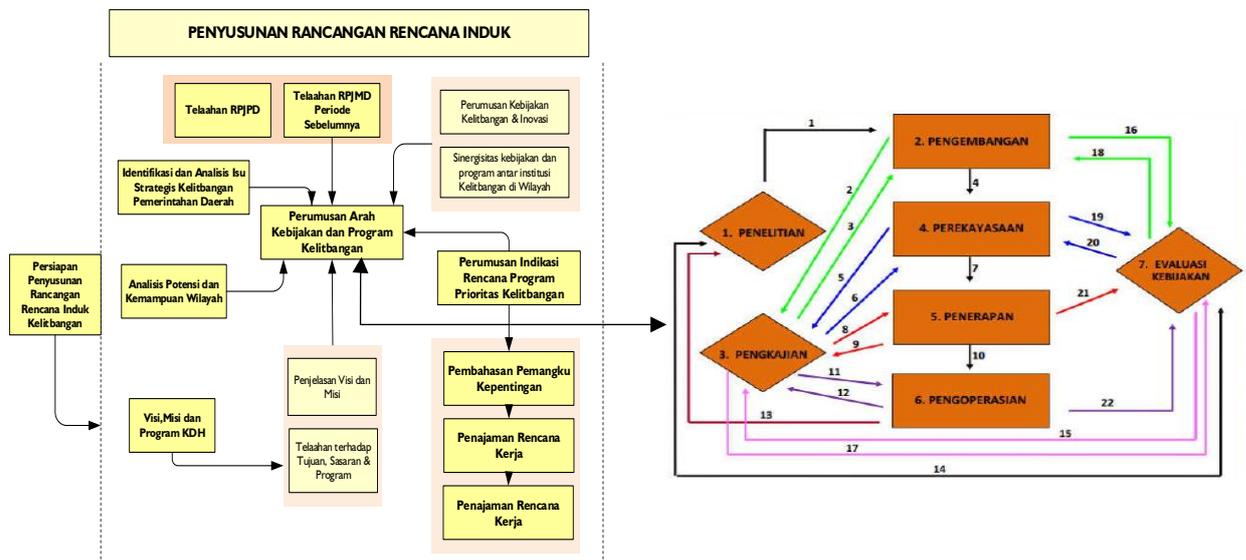
Peran penelitian, menurut Creswell (2010) dalam merancang penelitian terdapat 4 tahapan yakni 1) menyusun pendahuluan yang melatar belakangi permasalahan, dalam pendahuluan atau yang disusun saat ini seperti proposal penelitian dan pembangunan meliputi identifikasi permasalahan, membuat kerangka masalah berdasarkan literatur yang ada, menunjukkan defisiensi-defisiensi dalam literatur tersebut dan menargetkan output penelitian. Dalam proposal ini juga menyajikan metode sistematis dalam merancang kajian. Untuk poin ke 2) kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan survey ke beberapa dinas/instansi terkait dalam upaya penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon berdasarkan urusan-urusan dalam masing-masing OPD termasuk inovasi yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Terakhir poin ke 3) kegiatan analisa data yang disusun dalam laporan sebelumnya/ antara

Penggunaan metode kualitatif terletak pada analisa research and development dimana menggunakan FGD dengan narasumber berasal dari OPD-OPD terkait sesuai dengan hasil kajian dokumen. Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk merumuskan rencana kegiatan yang diprioritaskan. Dengan demikian, diperoleh prioritas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan yang terukur. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan terdapat 3 tahapan. Pada tahapan pertama dilakukan identifikasi mengenai perumusan arahan kebijakan dari dokumen perencanaan maupun dokumen penataan ruang yang menjadi acuan pembangunan di Kabupaten Cirebon, dimana pada tahapan ini hal yang perlu dilakukan antara lain telaah mengenai dokumen rencana yang sudah dilakukan, menganalisis potensi dan kemampuan wilayah serta merumuskan rencana program ke depannya. Pada tahapan kedua, yaitu merumuskan rancangan Rencana Induk Kelitbangan yaitu dengan melakukan verifikasi rancangan rumusan arahan kebijakan kepada setiap pemangku

kepentingan dalam bidang pembangunan. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan FGD yang menyertakan seluruh OPD/SKPD di seluruh lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk diperoleh feedback/umpan balik dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Cirebon. Dan pada tahapan terakhir, yaitu penetapan Rencana Induk Kelitbangan dengan melakukan konsultasi serta perlunya penetapan rancangan penelitian oleh Kepala Daerah. Berdasarkan ketiga tahapan tersebut pada penelitian ini berfokus pada identifikasi rumusan arahan kebijakan penelitian yang mencakup pada lingkup kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan sehingga dapat dijadikan masukan pada tahapan perumusan rancangan induk kelitbangan.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan



Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan analisis. Analisis yang pertama yakni review permasalahan pembangunan daerah yang tertera pada dokumen perencanaan dan pembangunan kabupaten. Analisis selanjutnya adalah analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan (research and development) untuk mendukung sasaran pada perencanaan Kabupaten Cirebon dengan terlebih dahulu melihat potensi, permasalahan, tantangan dan peluang dari kondisi lembaga kelitbangan yang dimiliki Kabupaten Cirebon. Selanjutnya analisis prioritasi serta pentahapan penelitian dan pengembangan tahun dokumen RPJMD berjalan yaitu tahun 2019-2024.

Kebutuhan data menjadi hal penting dalam pelaksanaan tahapan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon. Data yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan penelitian ini antara lain mengenai permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon dan isu faktual terkait dengan pembangunan Kabupaten Cirebon. Adapun beberapa data yang dibutuhkan dalam penyusunan kegiatan penelitian dan pengembangan Kabupaten Cirebon lebih detail antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kebutuhan Data

No	Sasaran	Data yang Dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data	Sumber	Analisa yang Digunakan
1.	Review dokumen perencanaan dan pembangunan Kabupaten Cirebon	Isu strategis pembangunan pada RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024	Literatur, Telaah Dokumen	Bappeda Kabupaten Cirebon	Analisa Deskriptif
2.	Menganalisis Faktual dan Kelitbangan	Isu pembangunan berdasarkan rencana strategis dan fakta faktual di lapangan	Observasi Kajian Kualitatif	Bappeda Kabupaten Cirebon dan SKPD terkait	Analisa Deskriptif
3.	Analisis Gap, Mapping, Trend dan Tantangan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang sudah dilakukan • Rencana Strategis (provinsi-kabupaten) & fakta factual lapangan • RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 	Telaah Dokumen	Bappeda Kabupaten Cirebon	Analisa Deskriptif
4.	Analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pencapaian dokumen perencanaan dan pembangunan Kabupaten Cirebon	Long list usulan research and development yang menjadi kebutuhan daerah berdasarkan GAP yang dihasilkan	Wawancara, FGD yang Kajian Kualitatif	Bappeda Kabupaten Cirebon, SKPD terkait dan Analisa Peneliti	Analisa Deskriptif
5.	Menyusun indikasi roadmap penelitian dan pengembangan Kabupaten Cirebon	Hasil analisa prioritas dan pentahapan research and development	Wawancara FGD Kualitatif	Bappeda Kabupaten Cirebon, SKPD dan Analisa Peneliti	Analisa Deskriptif

Sumber : Analisis Peneliti, 2021

Berdasarkan data yang didapatkan tersebut, kemudian dilakukan 3 tahapan analisis untuk diperoleh prioritas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan yang terukur. Uraian detail masing masing analisis adalah sebagai berikut :

1. Analisa Review Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan kaidahnya RPJMD adalah salah satu dokumen pembangunan yang mana bentuk kebijakan pemerintah didalamnya dapat berubah sesuai dengan periode jabatan bupati, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut disusun berdasarkan VISI dan MISI yang telah dirumuskan oleh pimpinan daerah/ Bupati. Dengan demikian perubahan rencana yang terdapat di RPJMD dapat berubah dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan masa jabatan Bupati Kabupaten Cirebon tersebut. Analisis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan, meringkas dan menyajikan suatu data sehingga dapat memberikan informasi untuk siap dianalisis. Review dokumen dilakukan dengan meringkas kebijakan yang terdapat di RPJMD dan melakukan wawancara kepada OPD terkait dengan isu faktual yang terjadi di Kabupaten Cirebon dan kaitannya terhadap kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

2. Analisa Isu Faktual di Kabupaten Cirebon

Dalam kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon tidak lepas dari tantangan dalam pelaksanaan implementasi pembangunan tersebut. Untuk itu, analisis dilakukan dengan melakukan review isu masalah berdasarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019-2024 dan melakukan review pada tema penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Setelah itu, dilakukan FGD pada stakeholder yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon untuk dilakukan verifikasi terkait dengan isu strategis yang tercantum pada dokumen rencana dan penelitian tersebut. Diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan kedepannya.

3. Analisa Gap, mapping, Tren dan Tantangan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan berdasarkan acuan Dokumen Rencana Kabupaten Cirebon, Provinsi dan Nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dapat terdapat GAP antara rencana kebijakan dengan implementasi kebijakan. Untuk itu analisis yang digunakan ini adalah untuk mengetahui tantangan penelitian dan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Setelah dilakukan analisis review dokumen perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan juga isu faktual yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan GAP, mapping, trend dan tantangan diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang selaras dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.

4. Analisis kesesuaian kebutuhan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 berdasarkan prioritas

Kebutuhan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan merumuskan judul penelitian yang dilakukan. Judul penelitian tersebut kemudian disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon. Setelah dilakukan analisa kebutuhan penelitian tersebut, tahapan selanjutnya adalah identifikasi kesesuaian permasalahan pembangunan daerah menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD terkait atau pelaksana, dengan tetap melihat atau mempertimbangkan tujuan dan sasaran pencapaian VISI dan MISI Kabupaten Cirebon

5. Analisis indikasi roadmap kebutuhan penelitian Kabupaten Cirebon 2019-2024

Selain dari proses analisa GAP, mapping, trend dan tantangan penelitian yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penelitian adalah roadmap atau tahapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan analisis tersebut menggunakan analisa SWOT sehingga dapat diperoleh prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan VISI dan MISI RPJMD Kabupaten Cirebon, pun otomatis mendukung tujuan dan sasaran RPJMD juga pembangunan Kabupaten Cirebon. Perumusan tujuan dan sasaran juga berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang dijadikan dasar pengusulan penelitian dan pengembangan

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman substansi, Laporan Akhir ini menyesuaikan dengan pembagian sub bab dalam Draft Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon yang dibagi kedalam 6 bab , yang meliputi (1) Pendahuluan; (2) Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Cirebon; (3) Gambaran Umum Kelibangan Kabupaten Cirebon (4) Arah Kebijakan Pembangunan Eksisting di Kabupaten Cirebon (5) Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Cirebon (6) Konsep Strategi Penelitian dan Pengembangan

Adapun penjelasan lebih lanjut dari setiap bab dalam laporan akhir Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Cirebon ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

Bagian ini berisikan hal-hal pokok yang mendasari kajian, antara lain: Latar Belakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran Kajian, Ruang Lingkup Kajian, Kegunaan Kajian dan Sistematika Laporan Akhir.

Bab 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN CIREBON

Bagian ini menjelaskan mengenai kondisi wilayah Kabupaten Kabupaten Cirebon berdasarkan potensi dan masalah yang ada. Sub bab pada bagian ini meliputi gambaran umum wilayah, potensi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Cirebon serta tantangan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Bab 3 GAMBARAN UMUM KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON

Pada bagian ini membahas mengenai kondisi kelitbangan yang ada di Kabupaten Cirebon berdasarkan kondisi sumber daya kelitbangan, potensi masalah bidang kelitbangan dan isu strategis terkait kelitbangan di Kabupaten Cirebon.

Bab 4 ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKSISTING KABUPATEN CIREBON

Bagian ini membahas mengenai arahan pembangunan di Kabupaten Cirebon, arahan kebijakan dan strategi jangka panjang pembangunan di Kabupaten Cirebon, arahan kebijakan dan strategi kelitbangan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon dan indikasi program prioritas kelitbangan di Kabupaten Cirebon.

Bab 5 EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN CIREBON

Evaluasi terkait kegiatan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendorong pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi kelembagaan pemerintah Kabupaten Cirebon, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Cirebon, Evaluasi terhadap analisa gap, mapping, trend dan tantangan pengembangan kelitbangan dengan melakukan review RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 , hasil survey primer dan sekunder, analisa prioritas dan pentahapan penelitian dan pengembangan serta analisa mekanisme, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan roadmap kegiatan KABUPATEN CIREBON.

Evaluasi terkait kegiatan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendorong pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi kelembagaan pemerintah Kabupaten Cirebon, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Cirebon, Evaluasi terhadap analisa gap, mapping, trend dan tantangan pengembangan kelitbangan dengan melakukan review RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 , hasil survey primer dan sekunder, analisa prioritas dan pentahapan penelitian dan pengembangan serta analisa mekanisme, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan roadmap kegiatan penelitian di Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Bab 6 KONSEP STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisikan konsep strategi penelitian dan pengembangan juga roadmap kegiatan kelitbangan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024.



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**

PENYUSUNAN
RIK RENCANA
INDUK
KELITBANGAN
KABUPATEN CIREBON

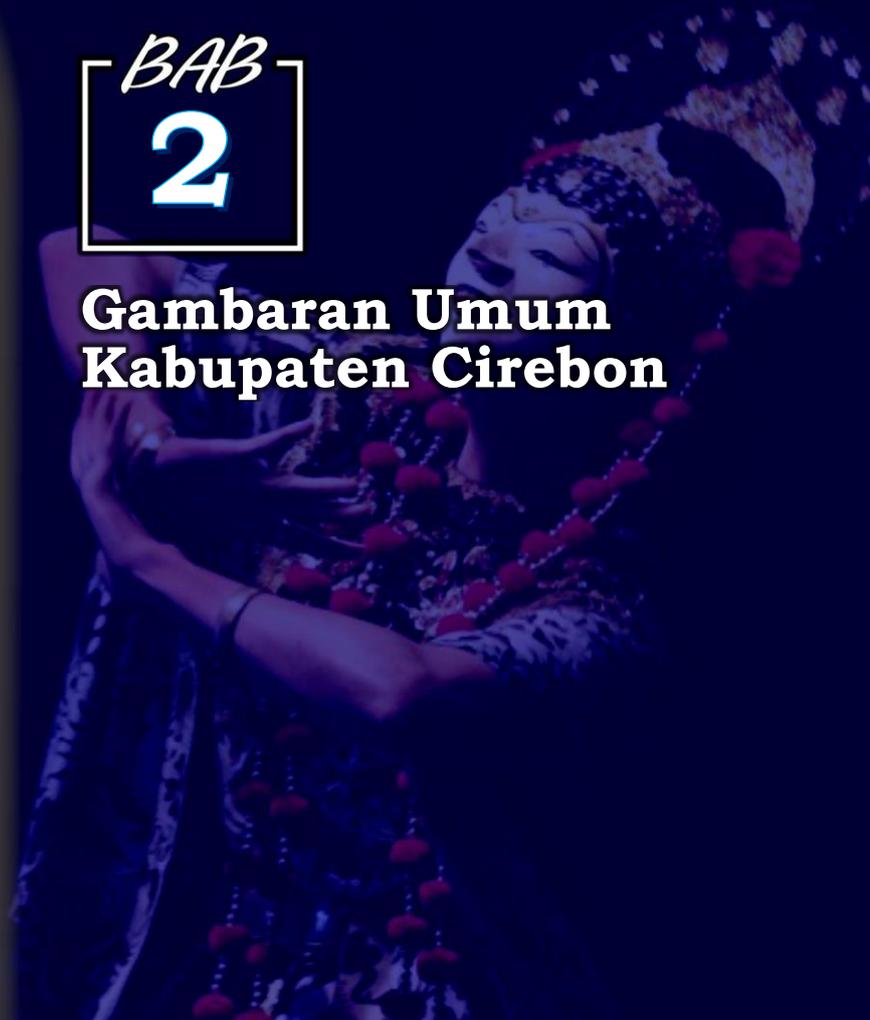
BAB

2

**Gambaran Umum
Kabupaten Cirebon**

Laporan Akhir

2021



2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH POTENSI DAN KENDALA PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Cirebon merupakan dataran dengan ketinggian antara 0 – 130 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi antara 108° 40' – 108° 48' Bujur Timur dan 6° 30' – 7° 00' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupa daratan seluas 1.070,29 km².

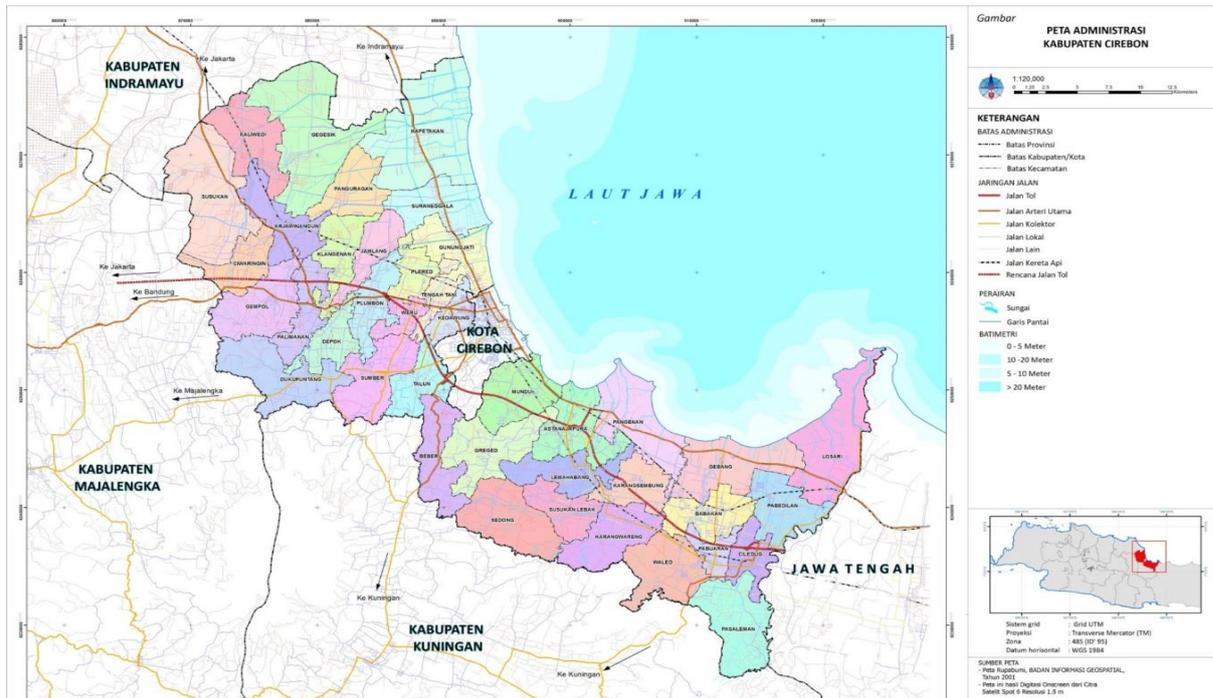
Tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,04 km²) diikuti Kecamatan Gegecik (63,83 km²), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,11 km²).

Letak daratan Kabupaten Cirebon memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegecik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Gunungjati, Tengah Tani, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi.

Wilayah Kabupaten Cirebon bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa; bagian selatan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka; bagian barat dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu; bagian timur dengan Provinsi Jawa Tengah utara.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2030

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon. Tiga kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2007 adalah Kecamatan Jamblang (Pemekaran Kecamatan Klagenan sebelah Timur), Kecamatan Suranenggala (Pemekaran Kecamatan Kapetakan sebelah Selatan), dan Kecamatan Greged (Pemekaran Kecamatan Beber sebelah Timur).

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kelompok Kecamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1-5	Arjawinangun, Ciwaringin, Gempol, Kapetakan, & Lemah Abang	49	
6-10	Palimanan, Plumbon, Susukan Lebak, Astanajapura, & Depok	12	
11-15	Greged, Karangsembung, Losari, Pangenan, & Sedong	47	
16-20	Talun, Babakan, Dukupuntang, Gunung Jati, & Karangwareng	60	
21-25	Mundu, Panguragan, Sumber, Tengah Tani, & Beber	41	12
26-30	Gebang, Jamblang, Kedawung, Pabedilan, & Pasaleman	49	
31-35	Suranenggala, Waled, Ciledug, Gegesik, & Kaliwedi	56	
36-40	Klagenan, Pabuaran, Plered, Susukan, & Weru	47	
Total		412	12

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.2.1 Posisi Astronomis

Secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 6° 30' 58" – 7° 00' 24" Lintang Selatan dan 108° 19' 30" – 108° 50' 03" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum, daerah Pantura ini didominasi oleh dataran rendah.

Adapun batas – batas wilayah administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Kuningan
Sebelah Barat Laut	:	Kabupaten Majalengka
Sebelah Timur	:	Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

2.1.1.2.2 Posisi Geostrategis

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Metropolitan Cirebon Raya (MCR);
- Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon;
- Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikampek-Palimanan (Cikapa), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan;
- Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);
- Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

2.1.1.2.3 Kondisi Morfologi Kawasan

Kondisi morfologi Kabupaten Cirebon dilihat dari luas morfologinya terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu bukit/perbukitan, datar dan gunung/pegunungan dan bukit.

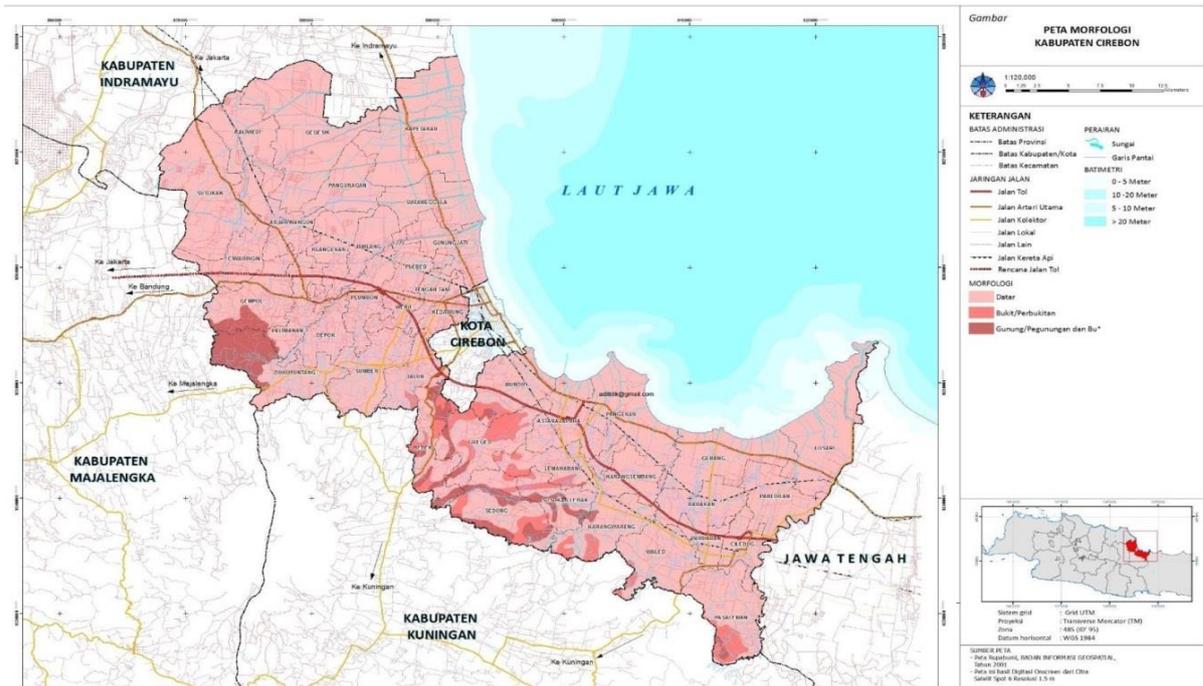
Tabel 2.2 Luas Morfologi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Jenis Morfologi			Jumlah
		Bukit/ Perbukitan	Datar	Gunung/ Pegunungan dan Bukit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Waled	153,95	2924,98	0,00	3078,93
2.	Pasaleman	660,98	3304,86	165,24	4131,08
3.	Ciledug	0,00	1462,86	0,00	1462,86
4.	Pabuaran	0,00	957,23	0,00	957,23
5.	Losari	0,00	4531,68	0,00	4531,68
6.	Pabedilan	0,00	2581,48	0,00	2581,48
7.	Babakan	0,00	2218,13	0,00	2218,13
8.	Gebang	0,00	3535,98	0,00	3535,98
9.	Karangsembung	4,81	1877,00	0,00	1881,81
10.	Karangwareng	407,88	2284,11	27,19	2719,18
11.	Lemahabang	370,91	1894,00	0,00	2264,91
12.	Susukan Lebak	505,35	1155,08	144,39	1804,82
13.	Sedong	0,00	3442,50	0,00	3442,50
14.	Astanajapura	0,00	2891,40	0,00	2891,40
15.	Pangenan	0,00	3572,97	0,00	3572,97
16.	Mundu	274,02	2383,90	82,20	2740,12
17.	Beber	2523,67	51,50	0,00	2575,17
18.	Greged	483,28	2706,37	32,22	3221,87
19.	Talun	0,00	1930,88	0,00	1930,88
20.	Sumber	0,00	2953,79	0,00	2953,79
21.	Dukupuntang	599,00	3144,80	0,00	3743,80
22.	Palimanan	0,00	1911,87	0,00	1911,87
23.	Plumbon	190,33	1655,91	57,10	1903,34
24.	Depok	0,00	1638,28	0,00	1638,28
25.	Weru	0,00	911,00	0,00	911,00
26.	Plered	0,00	1323,93	0,00	1323,93

No.	Kecamatan	Jenis Morfologi			Jumlah
		Bukit/ Perbukitan	Datar	Gunung/ Pegunungan dan Bukit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Tengah Tani	0,00	976,18	0,00	976,18
28.	Kedawung	0,00	1125,40	0,00	1125,40
29.	Gunungjati	0,00	2244,90	0,00	2244,90
30.	Kapetakan	0,00	6703,67	0,00	6703,67
31.	Suranenggala	0,00	2573,29	0,00	2573,29
32.	Klangenan	0,00	2042,44	0,00	2042,44
33.	Jamblang	0,00	1658,88	0,00	1658,88
34.	Arjawinangun	0,00	2429,04	0,00	2429,04
35.	Panguragan	0,00	2199,91	0,00	2199,91
36.	Ciwaringin	0,00	1610,22	0,00	1610,22
37.	Gempol	0,00	2580,77	491,57	3072,34
38.	Susukan	0,00	5204,48	0,00	5204,48
39.	Gegesik	0,00	6382,72	0,00	6382,72
40.	Kaliwedi	0,00	2877,21	0,00	2877,21
		6.174,18	99.855,60	999,91	107.028,69

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Gambar 2.2
 Peta Morfologi



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Permasalahan kependudukan antara lain jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing.

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.296.999 jiwa atau terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2.189.785 jiwa. Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai

95.738 jiwa, di mana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Sumber merupakan ibukota dari Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini.

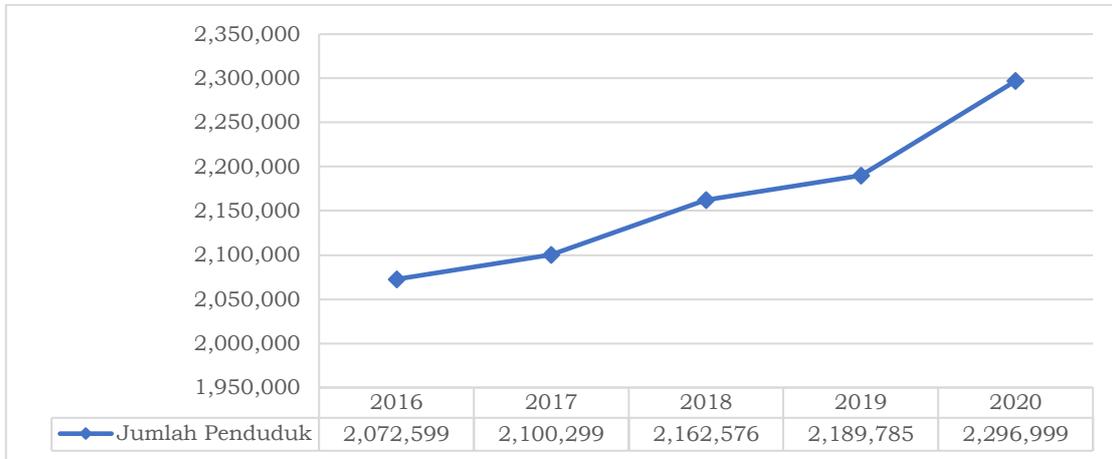
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016–2020

KODE WIL	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN					% PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	2019 - 2020
32.09.01	WALED	50,837	52,551	54,014	54,407	57,280	5.28
32.09.02	CILEDUG	43,971	44,198	44,555	44,501	46,235	3.90
32.09.03	LOSARI	57,340	57,250	59,673	60,160	63,359	5.32
32.09.04	PABEDILAN	49,711	51,685	55,978	56,397	59,589	5.66
32.09.05	BABAKAN	64,540	64,589	68,993	69,636	72,791	4.53
32.09.06	KARANGSEMBUNG	34,694	35,375	36,397	36,625	37,558	2.55
32.09.07	LEMAHABANG	50,822	51,616	53,214	54,116	56,786	4.93
32.09.08	SUSUKANLEBAK	38,478	39,176	40,203	40,359	41,557	2.97
32.09.09	SEDONG	37,970	39,118	40,660	40,824	43,980	7.73
32.09.10	ASTANAJAPURA	71,609	73,589	73,478	74,785	81,219	8.60
32.09.11	PANGENAN	42,261	42,664	44,597	44,459	48,212	8.44
32.09.12	MUNDU	68,629	70,523	71,732	71,761	76,856	7.10
32.09.13	BEBER	39,556	40,414	40,516	41,279	44,577	7.99
32.09.14	TALUN	62,895	64,574	65,198	65,854	69,707	5.85
32.09.15	SUMBER	86,981	88,701	89,192	90,891	95,738	5.33
32.09.16	DUKUPUNTANG	60,255	61,629	62,656	62,951	66,316	5.35
32.09.17	PALIMANAN	59,871	59,783	60,899	61,600	63,275	2.72
32.09.18	PLUMBON	73,849	75,229	78,259	80,062	82,105	2.55
32.09.19	WERU	65,229	66,597	66,909	68,546	71,125	3.76
32.09.20	KEDAWUNG	56,172	57,060	57,980	58,687	60,982	3.91
32.09.21	GUNUNG JATI	76,239	76,353	78,319	79,307	82,458	3.97
32.09.22	KAPETAKAN	51,338	52,412	56,036	57,574	61,958	7.61
32.09.23	KLANGENAN	48,356	49,620	51,417	52,676	54,311	3.10
32.09.24	ARJAWINAGUN	65,508	65,703	67,780	68,891	71,695	4.07
32.09.25	PANGURAGAN	40,171	41,091	42,570	42,626	44,901	5.34
32.09.26	CIWARINGIN	35,391	35,152	36,821	37,328	39,054	4.62
32.09.27	SUSUKAN	60,855	60,715	64,382	65,682	70,067	6.68
32.09.28	GEGESIK	66,792	66,101	68,979	69,260	70,948	2.44
32.09.29	KALIWEDI	38,467	38,192	39,851	40,491	41,793	3.22
32.09.30	GEBANG	61,942	60,899	65,027	65,233	68,581	5.13
32.09.31	DEPOK	60,185	61,078	62,272	63,474	66,128	4.18
32.09.32	PASALEMAN	25,920	26,214	26,793	26,886	27,621	2.73
32.09.33	PABUARAN	34,777	34,775	35,445	35,558	37,086	4.30
32.09.34	KARANG WARENG	27,018	27,563	28,159	28,151	29,248	3.90
32.09.35	TENGAH TANI	40,620	41,529	41,884	42,590	44,612	4.75
32.09.36	PLERED	49,875	51,197	52,132	53,176	55,343	4.08
32.09.37	GEMPOL	43,190	43,638	44,831	45,757	47,485	3.78
32.09.38	GREGED	51,955	53,234	53,269	53,975	58,301	8.01
32.09.39	SURANENGGALA	41,152	41,257	43,471	44,607	46,904	5.15
32.09.40	JAMBLANG	37,178	37,255	38,035	38,643	39,258	1.59
	J U M L A H	2,072,599	2,100,299	2,162,576	2,189,785	2,296,999	4.90

Sumber: 1. Database Siak Disdukcapil Kabupaten Cirebon Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 dan 2020;
2. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Gambar 2.3

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Uraian Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2020

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Waled	56.013	0,62	2,47	1.819	103
2.	Pasaleman	26.528	0,61	1,17	642	100
3.	Ciledug	45.601	0,78	2,01	3.117	103
4.	Pabuaran	36.760	0,87	1,62	3.841	103
5.	Losari	62.351	1,42	2,75	1.376	103
6.	Pabedilan	58.198	1,23	2,56	2.254	101
7.	Babakan	71.288	1,35	3,14	3.214	100
8.	Gebang	67.861	1,64	2,99	1.919	102
9.	Karangsembung	36.491	0,58	1,61	1.939	101
10.	Karangwareng	28.547	0,72	1,26	1.050	104
11.	Lemahabang	55.569	0,91	2,45	2.453	103
12.	Susukan Lebak	41.147	1,06	1,81	2.280	104
13.	Sedong	42.302	0,70	1,86	1.229	104
14.	Astanajapura	79.884	0,53	3,52	2.763	105
15.	Pangenan	46.870	0,86	2,06	1.312	104

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
16.	Mundu	81.221	0,99	3,58	2.964	105
17.	Beber	44.203	1,91	1,95	1.717	107
18.	Greged	56.812	1,06	2,50	1.763	106
19.	Talun	71.464	1,29	3,15	3.701	104
20.	Sumber	96.725	1,78	4,26	3.274	104
21.	Dikupuntang	64.980	0,74	2,86	1.736	102
22.	Palimanan	61.933	1,08	2,73	3.239	101
23.	Plumbon	82.323	1,15	3,63	4.326	105
24.	Depok	66.246	1,49	2,92	4.044	103
25.	Weru	69.942	0,85	3,08	7.677	107
26.	Plered	55.102	0,76	2,43	4.165	104
27.	Tengahtani	45.435	1,18	2,00	4.655	104
28.	Kedawung	60.933	-0,21	2,68	5.416	102
29.	Gunungjati	82.442	0,56	3,63	3.672	101
30.	Kapetakan	60.975	1,67	2,68	910	103
31.	Suranenggala	46.081	1,07	2,03	1.791	101
32.	Klangenan	52.948	0,37	2,33	2.593	102
33.	Jamblang	38.236	0,82	1,68	2.305	102
34.	Arjawinangun	70.730	1,19	3,11	2.912	103
35.	Panguragan	43.208	0,13	1,90	1.964	102
36.	Ciwaringin	38.381	0,07	1,69	2.384	100
37.	Gempol	46.230	0,66	2,04	1.505	105
38.	Susukan	68.394	0,93	3,01	1.314	101
39.	Gegesik	69.355	-0,03	3,05	1.087	102
40.	Kaliwedi	40.912	1,28	1,80	1.422	101
	Kab. Cirebon	2.270.621	0,94	100,00	2.122	103

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.1.2.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sesuai tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2020

KODE WIL.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS
		n (Jiwa)	n (Jiwa)	(Jiwa)	KELAMIN
32.09.01	WALED	28,992	28,288	57,280	102.49
32.09.02	CILEDUG	23,368	22,867	46,235	102.19
32.09.03	LOSARI	32,016	31,343	63,359	102.15
32.09.04	PABEDILAN	29,987	29,602	59,589	101.30
32.09.05	BABAKAN	36,387	36,404	72,791	99.95
32.09.06	KARANGSEMBUNG	18,903	18,655	37,558	101.33
32.09.07	LEMAHABANG	28,829	27,957	56,786	103.12
32.09.08	SUSUKANLEBAK	21,210	20,347	41,557	104.24
32.09.09	SEDONG	22,395	21,585	43,980	103.75
32.09.10	ASTANAJAPURA	41,557	39,662	81,219	104.78
32.09.11	PANGENAN	24,549	23,663	48,212	103.74
32.09.12	MUNDU	39,177	37,679	76,856	103.98
32.09.13	BEBER	23,032	21,545	44,577	106.90
32.09.14	TALUN	35,497	34,210	69,707	103.76
32.09.15	SUMBER	48,765	46,973	95,738	103.81
32.09.16	DUKUPUNTANG	33,496	32,820	66,316	102.06
32.09.17	PALIMANAN	31,897	31,378	63,275	101.65
32.09.18	PLUMBON	41,908	40,197	82,105	104.26
32.09.19	WERU	36,584	34,541	71,125	105.91
32.09.20	KEDAWUNG	30,743	30,239	60,982	101.67
32.09.21	GUNUNG JATI	41,359	41,099	82,458	100.63
32.09.22	KAPETAKAN	31,430	30,528	61,958	102.95
32.09.23	KLANGENAN	27,391	26,920	54,311	101.75
32.09.24	ARJAWINANGUN	36,314	35,381	71,695	102.64
32.09.25	PANGURAGAN	22,618	22,283	44,901	101.50
32.09.26	CIWARINGIN	19,528	19,526	39,054	100.01
32.09.27	SUSUKAN	35,083	34,984	70,067	100.28
32.09.28	GEGESIK	35,781	35,167	70,948	101.75
32.09.29	KALIWEDI	20,927	20,866	41,793	100.29
32.09.30	GEBANG	34,522	34,059	68,581	101.36
32.09.31	DEPOK	33,572	32,556	66,128	103.12
32.09.32	PASALEMAN	13,811	13,810	27,621	100.01
32.09.33	PABUARAN	18,781	18,305	37,086	102.60
32.09.34	KARANGWARENG	14,889	14,359	29,248	103.69
32.09.35	TENGAH TANI	22,709	21,903	44,612	103.68
32.09.36	PLERED	28,198	27,145	55,343	103.88
32.09.37	GEMPOL	24,226	23,259	47,485	104.16
32.09.38	GREGED	30,025	28,276	58,301	106.19
32.09.39	SURANENGGALA	23,497	23,407	46,904	100.38
32.09.40	JAMBLANG	19,807	19,451	39,258	101.83
	J U M L A H	1,163,760	1,133,239	2,296,999	102.69

Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD

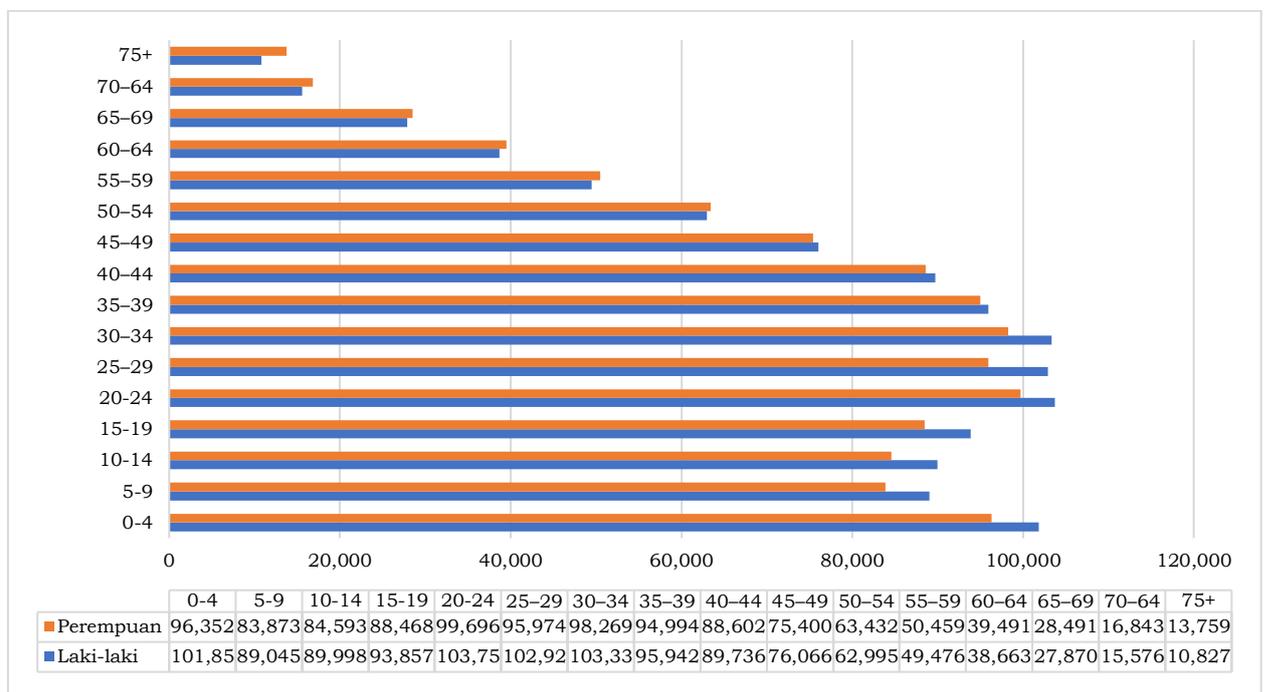
Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio), hampir semua kecamatan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon tahun 2020 adalah 102,69. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102-103 penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin di tiap Kecamatan rata rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Jika diamati masing-masing Kecamatan maka Kecamatan Beber mempunyai rasio tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 106,90. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 penduduk laki laki. Rasio jenis tertinggi kedua yaitu kecamatan Greged yaitu 106,19. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 penduduk laki laki. Sedangkan Rasio Jenis Kelamin terendah adalah Kecamatan Babakan yaitu sebesar 99,95. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki.

2.1.2.3 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kabupaten Cirebon dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur, sebagian besar berada pada usia remaja (20-24 tahun) mencapai 203.455 jiwa pada tahun 2020. Usia remaja ini mengindikasikan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja.

Gambar 2.4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021 yang dikelola dalam SIPD

Data di atas memperlihatkan bahwa penduduk umur anak-anak sampai dengan remaja cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang sehingga perlu adanya program yang terarah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau wilayah dalam suatu periode tertentu tanpa memerhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 nilai PDRB ADHB hanya mencapai 38.840,78 milyar rupiah, namun pada tahun 2020 nilainya naik menjadi 49.561,30 milyar rupiah.

Secara lengkap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Milyar Rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.339,47	6.612,59	7.211,82	7.591,12	7.877,15
B	Pertambangan dan Penggalian	527,99	517,41	532,94	520,61	526,24
C	Industri Pengolahan	8.321,35	8.903,18	9.538,76	10.046,95	10.209,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	69,69	86,44	93,72	101,55	95,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,19	35,87	40,89	46,93	55,23
F	Konstruksi	4.498,75	4.817,14	5.264,54	5.632,73	5.413,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.146,25	6.608,84	7.067,68	7.580,80	7.201,11
H	Transportasi dan Pergudangan	3.131,58	3.432,64	3.751,42	4.173,60	4.122,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.330,94	1.484,46	1.556,48	1.711,14	1.567,79
J	Informasi dan Komunikasi	893,20	988,96	1.063,95	1.122,90	1.467,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.383,02	1.527,54	1.686,42	1.871,67	1.922,66
L	Real Estate	838,15	930,50	1.022,42	1.130,75	1.184,60
M,N	Jasa Perusahaan	295,55	329,47	362,65	444,92	415,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.229,69	1.298,86	1.396,80	1.502,24	1.639,21
P	Jasa Pendidikan	1.806,01	2.092,99	2.416,19	2.841,71	3.062,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	733,83	814,49	896,51	998,60	1.020,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.265,12	1.437,92	1.596,09	1.817,59	1.780,95
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	38.840,78	41.919,30	45.449,28	49.135,81	49.561,30

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIP

Berbeda dengan kondisi PDRB ADHB yang terus mengalami peningkatan, untuk PDRB ADHK selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB ADHK menjadi 33.304,50 milyar rupiah atau turun sebesar 363,60 milyar rupiah dibanding dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 33.668,10 milyar rupiah.

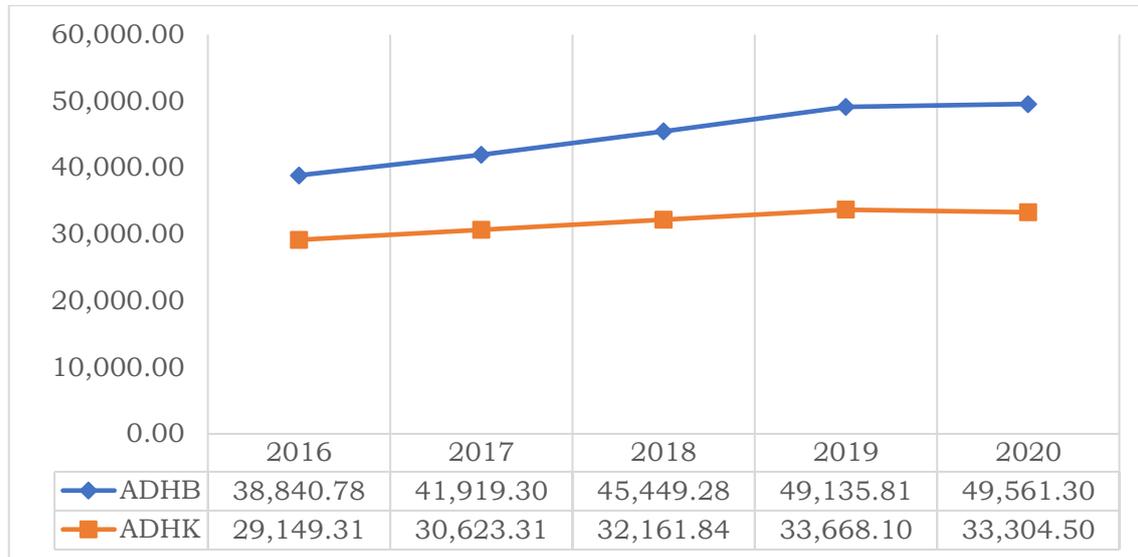
Secara lengkap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Milyar Rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.360,55	4.426,99	4.531,85	4.484,22	4.563,11
B	Pertambangan dan Penggalian	419,37	420,75	431,18	416,88	417,12
C	Industri Pengolahan	6.020,19	6.325,53	6.662,38	6.850,49	6.821,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47,42	51,71	53,00	56,63	54,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,58	25,40	26,57	28,36	33,19
F	Konstruksi	3.527,20	3.679,25	3.936,18	4.046,87	3.869,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.647,96	4.853,02	5.011,42	5.242,93	4.874,19
H	Transportasi dan Pergudangan	2.172,36	2.310,40	2.446,49	2.681,86	2.582,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.049,02	1.129,85	1.160,83	1.224,37	1.108,02
J	Informasi dan Komunikasi	866,99	950,05	1.035,69	1.103,91	1.440,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.061,76	1.113,88	1.191,87	1.286,48	1.303,60
L	Real Estate	649,87	713,12	775,73	847,61	858,27
M,N	Jasa Perusahaan	247,83	271,12	294,35	321,66	288,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	849,61	853,01	870,71	903,40	901,31
P	Jasa Pendidikan	1.488,64	1.630,47	1.757,89	1.984,68	2.052,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	615,28	663,09	711,63	794,03	786,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.101,68	1.205,67	1.264,07	1.393,72	1.350,29
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29.149,31	30.623,31	32.161,84	33.668,10	33.304,50

Gambar 2.5

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD

Nilai tambah produksi yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, terlebih pada tahun 2019 yang meningkat cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mencapai 49.561,30 milyar rupiah, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan masih menjadi andalan. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor yang paling sedikit berkontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,11 persen.

Tabel 2.8 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (persen), Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,32	15,77	15,85	15,45	15,90
B	Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,23	1,17	1,06	1,06
C	Industri Pengolahan	21,42	21,24	20,96	20,45	20,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,21	0,21	0,21	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11
F	Konstruksi	11,58	11,49	11,57	11,46	10,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,82	15,77	15,53	15,43	14,53
H	Transportasi dan Pergudangan	8,06	8,19	8,24	8,49	8,32
I	Penyediaan Akomodasi dan	3,43	3,54	3,42	3,48	3,16

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
	Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	2,30	2,36	2,34	2,28	2,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,56	3,64	3,71	3,81	3,88
L	Real Estate	2,16	2,22	2,25	2,30	2,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,76	0,79	0,80	0,91	0,84
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,17	3,10	3,07	3,06	3,31
P	Jasa Pendidikan	4,65	4,99	5,31	5,78	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,94	1,97	2,03	2,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,26	3,43	3,51	3,70	3,59
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

PDRB Kabupaten Cirebon bila dilihat dari kategori laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terbagi menjadi 4 (empat) kelompok pertumbuhan yaitu:

1. Kategori LPE sangat tinggi yaitu LPE yang berada di atas LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar -1,08% tetapi LPE tersebut berada pada angka di atas 10%. Sektor dimaksud yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 30,47% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 17,03%.
2. Kategori LPE tinggi yaitu LPE yang berada di atas LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar -1,08% tetapi LPE tersebut dibawah angka 10 %.

Sektor yang berada pada kelompok LPE tinggi ini adalah:

- a) Jasa Pendidikan;
 - b) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
 - c) Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - d) Real Estate;
 - e) Pertambangan dan Penggalian;
 - f) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
 - g) Industri Pengolahan; dan
 - h) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
3. Kategori LPE sedang yaitu LPE yang berada di bawah LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar -1,08% tetapi tetap tumbuh dengan persentase LPE Positif. Akan tetapi sektor dimaksud sudah tidak ada dikarenakan rata-rata tiap sektor juga mengalami penurunan.
 4. Kategori LPE rendah yaitu LPE yang berada di bawah LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar -1,08% tetapi tetap tumbuh dengan persentase LPE negatif. Kategori LPE rendah ini yaitu sebagai berikut:
 - a) Jasa lainnya;
 - b) Transportasi dan Pergudangan;
 - c) Pengadaan Listrik dan Gas;
 - d) Konstruksi;

- e) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- f) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan
- g) Jasa Perusahaan.

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Prodk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,03	1,52	2,37	-1,05	1,76
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,45	0,33	2,48	-3,32	0,06
C	Industri Pengolahan	5,81	5,07	5,33	2,82	-0,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,53	9,03	2,50	6,84	-4,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,28	7,71	4,60	6,75	17,03
F	Konstruksi	4,92	4,31	6,98	2,81	-4,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,59	4,41	3,26	4,62	-7,03
H	Transportasi dan Pergudangan	7,39	6,35	5,89	9,62	-3,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94	7,70	2,74	5,47	-9,50
J	Informasi dan Komunikasi	10,58	9,58	9,01	6,59	30,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,77	4,91	7,00	7,94	1,33
L	Real Estate	4,52	9,73	8,78	9,27	1,26
M,N	Jasa Perusahaan	8,97	9,40	8,57	9,28	-10,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,14	0,40	2,07	3,75	-0,23
P	Jasa Pendidikan	6,29	9,53	7,81	12,90	3,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,78	7,77	7,32	11,58	-0,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,17	9,44	4,84	10,26	-3,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,63	5,06	5,02	4,68	-1,08

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 hingga mencapai angka 4,68 persen pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2020 sampai minus diangka -1,08 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2017-2019

selalu berada dibawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.6

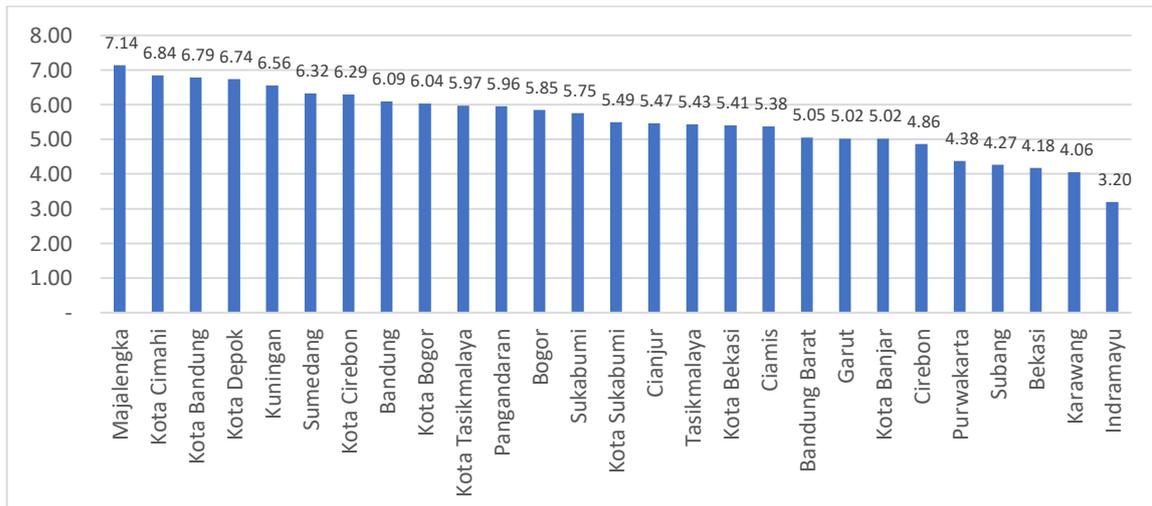
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: 1. PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019
2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Persen)



Sumber: Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan LPE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, LPE Kabupaten Cirebon masih berada di bawah LPE provinsi yang mencapai 5,07 persen pada tahun 2019. LPE Kabupaten Cirebon berada di urutan ke enam terendah dibandingkan LPE kabupaten/kota lainnya, hal ini berarti pertumbuhan produksi barang dan jasa di Kabupaten Cirebon belum maksimal.

2.1.3.2 PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar serta pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk yang menjadi komponen penghitungan pendapatan regional belum dapat dihitung maka yang disajikan adalah PDRB per Kapita.

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto perpenduduk secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

PDRB per kapita:	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	Juta Rp	18.124.494	19.410.878	20.907.550	22.406.740	22.429.650
ADHK	Juta Rp	13.602.112	14.180.233	14.778.810	15.353.210	15.072.410

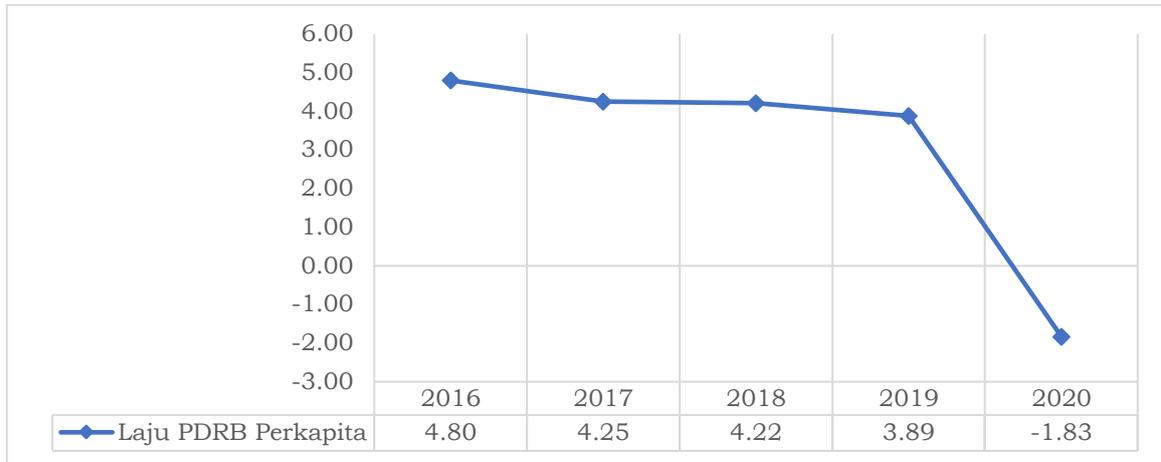
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2016-2020 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 PDRB Perkapita ADHB hanya mencapai Rp. 18.124.494 Juta dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi Rp. 22.429.650 Juta. Begitu pula dengan PDRB Perkapita ADHK yang tiap tahun nya juga selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 angkanya mencapai Rp. 15.072.410 Juta, naik dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai Rp. 13.602.112 Juta.

Meski demikian, Laju PDRB Perkapita di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 laju pertumbuhannya mencapai 4,80% dan pada tahun 2020 turun hingga -1,83% . Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.8

Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2015-2020

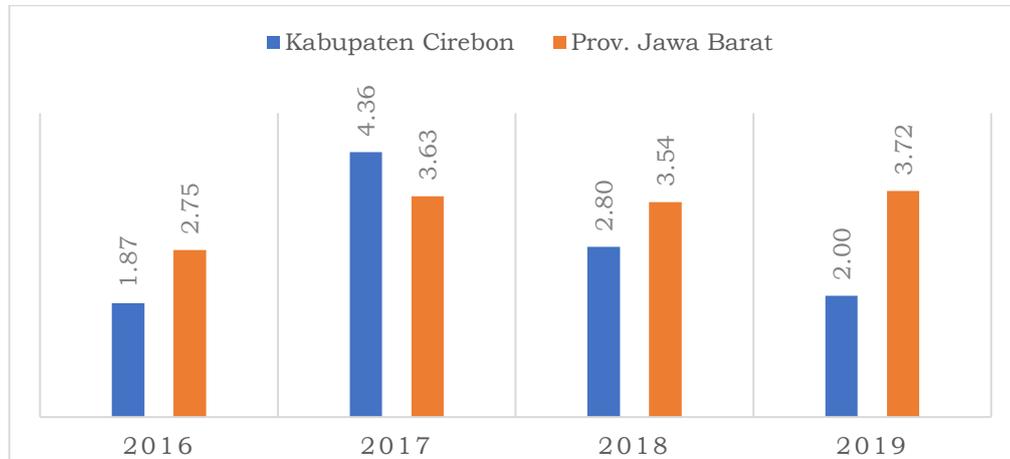
2.1.3.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (continue). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Cirebon.

Laju inflasi di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana Laju Inflasi pada tahun 2016 mencapai 1,87% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 4,36%. Selanjutnya pada tahun berikutnya Laju Inflasi terus mengalami penurunan hingga menjadi 2,00% di tahun 2019. Angka laju inflasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 berada dibawah laju inflasi Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 3,72%. Perbandingan laju inflasi Kabupaten Cirebon dengan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.9

Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 yang dikelola dalam SIPD

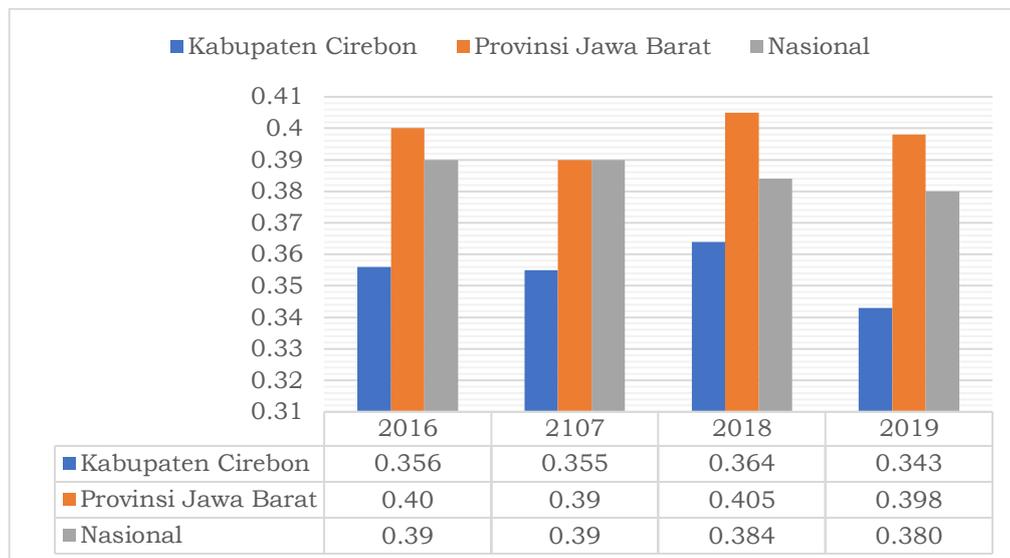
2.1.3.4 Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dalam bagian ini dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data pada gambar di bawah terlihat bahwa jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018, maka indeks gini Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,021 poin.

Selanjutnya indeks gini Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 yang mencapai 0,343 bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka indeks gini Kabupaten Cirebon berada dibawah indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.10

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2019



Sumber: BPS, 2020 yang dikelola dalam SIPD

2.13.5 Kemiskinan

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Pada tahun 2019 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi yang hanya mencapai 6,82 persen dan Indonesia yang juga hanya mencapai 9,22 persen. Angka 9,94 persen menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Ditambah dengan adanya peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 hingga mencapai 11,24 persen, hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga peningkatan persentase penduduk miskin tersebut dapat ditekan di tahun berikutnya.

Tabel 2.11 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Total (Ribu)	Presentase
2016	333.758	288,49	13,49
2017	346.240	279,55	12,97
2018	370.747	232,37	10,70
2019	381.372	217,64	9,94
2020	393.452	247,94	11,24

Catatan: * Referensi waktu adalah Maret 2020

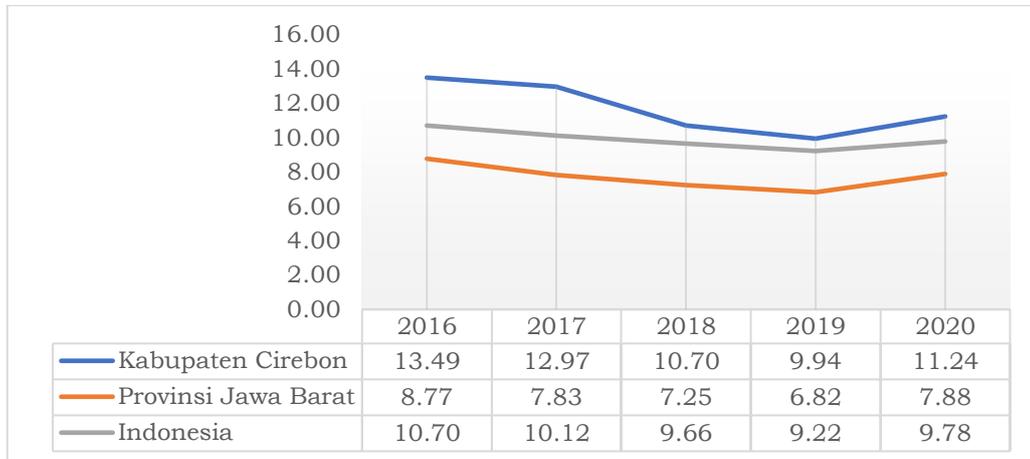
Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 247,94 ribu jiwa atau 11,24 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin hanya 217,64 ribu jiwa atau hanya 9,94 persen.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut sesuai dengan gambar berikut ini:

Gambar 2.11

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS
2. BPS RI, diolah yang dikelola dalam SIPD

Untuk indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai 2,21 dan pada tahun 2020 angkanya turun menjadi 1,30. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan, dimana pada tahun 2016 angkanya mencapai 0,50 sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 0,24. Hal tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2016–2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2016	2,21	0,50
2017	2,13	0,50
2018	2,04	0,55
2019	1,39	0,26
2020	1,30	0,24

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Lebih lanjut, data tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Bogor	8,83	8,57	7,14	6,91	7,69
2.	Kabupaten Sukabumi	8,13	8,04	6,76	6,22	7,09
3.	Kabupaten Cianjur	11,62	11,41	9,81	9,15	10,36
4.	Kabupaten. Bandung	7,61	7,36	6,65	5,94	6,91
5.	Kabupaten Garut	11,64	11,27	9,27	8,98	9,98
6.	Kabupaten Tasikmalaya	11,24	10,84	9,85	9,12	10,34
7.	Kabupaten Ciamis	8,42	8,2	7,22	6,65	7,62
8.	Kabupaten Kuningan	13,59	13,27	12,22	11,41	12,82
9.	Kabupaten Cirebon	13,49	12,97	10,7	9,94	11,24
10.	Kabupaten Majalengka	12,85	12,6	10,79	10,06	11,43
11.	Kabupaten Sumedang	10,57	10,53	9,76	9,05	10,26
12.	Kabupaten Indramayu	13,95	13,67	11,89	11,11	12,70
13.	Kabupaten Subang	11,05	10,77	8,67	8,12	9,31
14.	Kabupaten Purwakarta	8,98	9,06	7,99	7,48	8,27
15.	Kabupaten Karawang	10,07	10,25	8,06	7,39	8,26
16.	Kabupaten Bekasi	4,92	4,73	4,37	4,01	4,82
17.	Kabupaten Bandung Barat	11,71	11,49	10,06	9,38	10,49
18.	Kabupaten Pangandaran	10,23	10	8,12	7,71	8,99
19.	Kota Bogor	7,29	7,11	5,93	5,77	6,68
20.	Kota Sukabumi	8,59	8,48	7,12	6,67	7,70
21.	Kota Bandung	4,32	4,17	3,57	3,38	3,99
22.	Kota Cirebon	9,73	9,66	8,88	8,41	9,52
23.	Kota Bekasi	5,06	4,79	4,11	3,81	4,38
24.	Kota Depok	2,34	2,34	2,14	2,07	2,45
25.	Kota Cimahi	5,92	5,76	4,94	4,39	5,11
26.	Kota Tasikmalaya	15,6	14,8	12,71	11,60	12,97
27.	Kota Banjar	7,01	7,06	5,7	5,50	6,09
	Provinsi Jawa Barat	8,77	7,83	7,25	6,82	7,88

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penanganan langsung dilakukan pada kegiatan aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian,

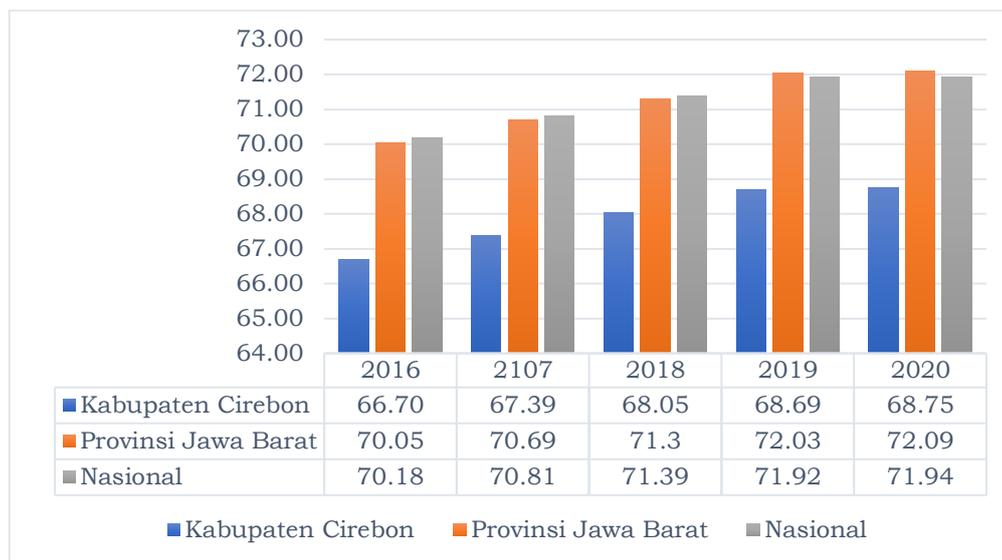
ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

2.1.3.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Gambar 2.12

Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016–2020



Sumber: 1. BPS RI, 2020, diolah

2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 68,05 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 68,75 pada tahun 2020. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun angka IPM pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 71,94 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,09.

Posisi Jawa Barat mengalami perubahan dari kondisi tahun sebelumnya, Pada Tahun 2020, IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 72,09. Angka ini meningkat dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 yang sebesar 72,03.

Data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM diatas nilai provinsi, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	IPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
NASIONAL		70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
JAWA BARAT		70,05	70,69	71,30	72,03	72,09
1.	Kabupaten Bogor	68,32	69,13	70,65	70,65	70,40
2.	Kabupaten Sukabumi	65,13	65,49	66,87	66,87	66,88
3.	Kabupaten Cianjur	62,92	63,70	65,38	65,38	65,36
4.	Kabupaten Bandung	70,69	71,02	72,41	72,41	72,39
5.	Kabupaten Garut	63,64	64,52	66,22	66,22	66,12
6.	Kabupaten Tasikmalaya	63,57	64,14	65,64	65,64	65,67
7.	Kabupaten Ciamis	68,45	68,87	70,39	70,39	70,49
8.	Kabupaten Kuningan	67,51	67,78	69,12	69,12	69,38
9.	Kabupaten Cirebon	66,70	67,39	68,69	68,69	68,75
10.	Kabupaten Majalengka	65,25	65,92	67,52	67,52	67,59
11.	Kabupaten Sumedang	69,45	70,07	71,46	71,46	71,64
12.	Kabupaten Indramayu	64,78	65,58	66,97	66,97	67,29
13.	Kabupaten Subang	67,14	67,73	68,69	68,69	68,95
14.	Kabupaten Purwakarta	68,56	69,28	70,67	70,67	70,82
15.	Kabupaten Karawang	68,19	69,17	70,86	70,86	70,66
16.	Kabupaten Bekasi	71,83	72,63	73,99	73,99	74,07
17.	Kabupaten Bandung Barat	65,81	66,63	68,27	68,27	68,08
18.	Kabupaten Pangandaran	65,79	66,6	68,21	68,21	68,06
19.	Kota Bogor	74,50	75,16	76,23	76,23	76,11
20.	Kota Sukabumi	72,33	73,03	74,31	74,31	74,21
21.	Kota Bandung	80,13	80,31	81,62	81,62	81,51
22.	Kota Cirebon	73,70	74,00	74,92	74,92	74,89
23.	Kota Bekasi	79,95	80,3	81,59	81,59	81,50
24.	Kota Depok	79,60	79,83	80,82	80,82	80,97
25.	Kota Cimahi	76,69	76,95	78,11	78,11	77,83
26.	Kota Tasikmalaya	70,58	71,51	72,84	72,84	73,04
27.	Kota Banjar	70,09	70,79	71,75	71,75	71,70

Sumber: 1. BPS RI, 2020, diolah

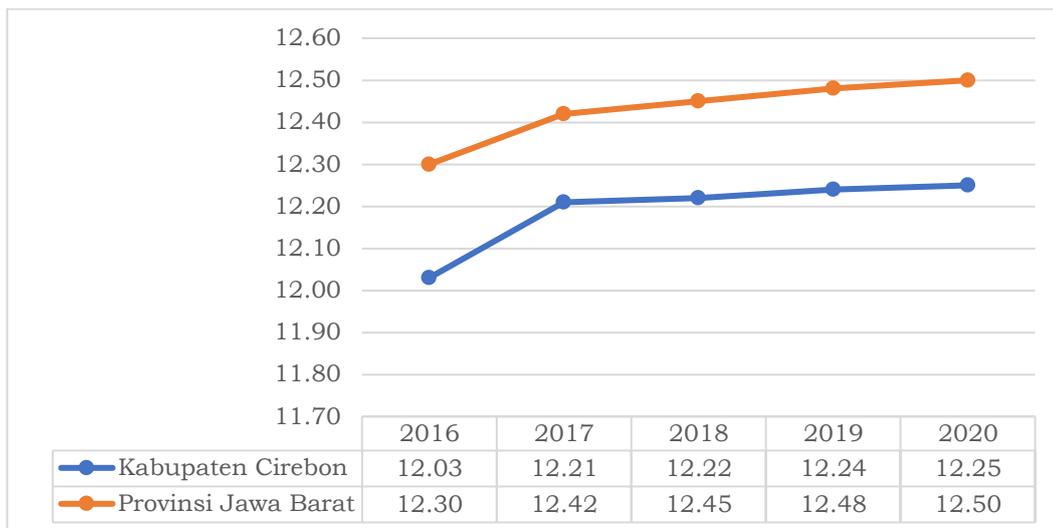
2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.7 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Penghitungan IPM salah satunya dipengaruhi oleh 2 indikator pendidikan, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Nilai HLS yang semakin tinggi, menggambarkan semakin tinggi pendidikan yang ditempuh. HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar.

Gambar 2.13

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020



Sumber:

1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD;
2. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
3. BPS Provinsi Jabar 2021 yang dikelola dalam SIPD

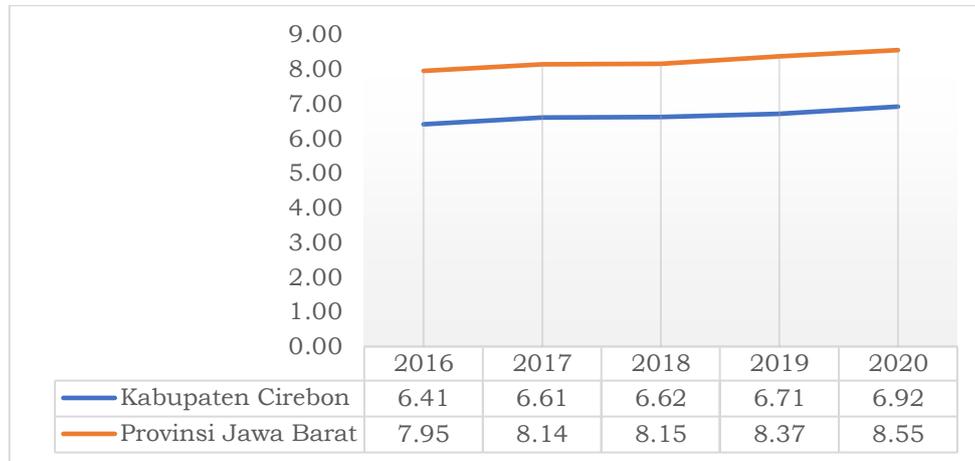
Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2020 mencapai 12,25 tahun yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun nilai HLS Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan nilai HLS Provinsi Jawa Barat, maka HLS Kabupaten Cirebon selalu dibawah HLS Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan HLS, nilai RLS Kabupaten Cirebon juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 6,92 tahun pada tahun 2020 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 6,92 tahun atau Kelas 1 SMP semester kedua. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,55 tahun pada tahun 2020.

Gambar 2.14

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020



Sumber:

1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD;
2. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
3. BPS Provinsi Jabar 2021

2.1.3.8 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH Kabupaten Cirebon semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

AHH Kabupaten Cirebon cenderung naik setiap tahun di mana pada tahun 2020 mencapai 71,99 tahun yang berarti bahwa setiap bayi baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 71-72 tahun. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun AHH Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Jawa Barat, yakni 73,04 tahun.

Gambar 2.15

Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

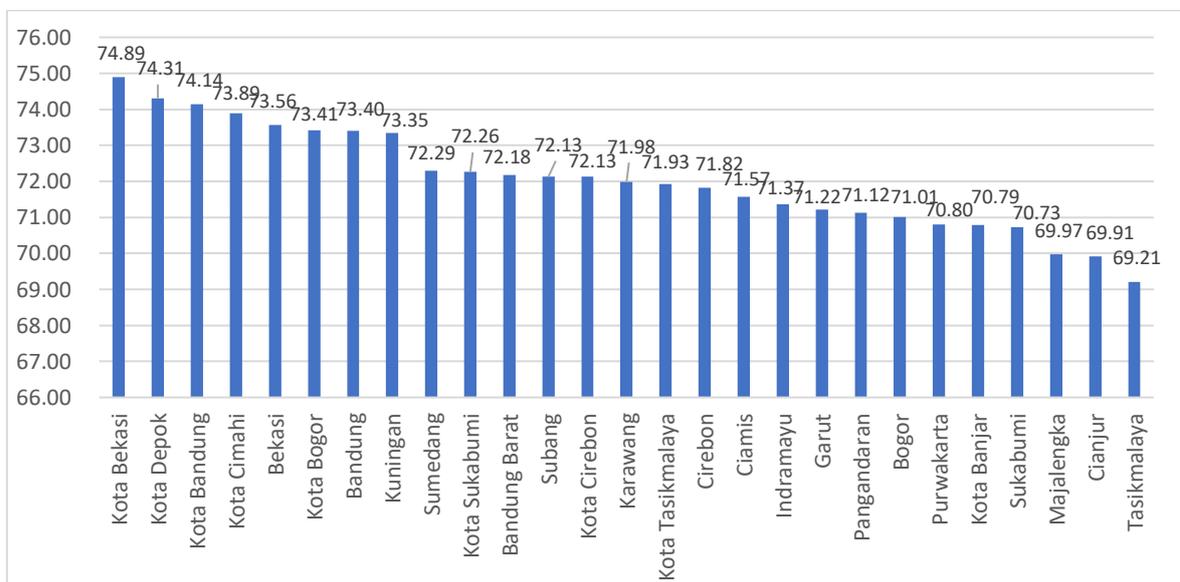


Sumber:

1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD;
2. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
3. BPS Provinsi Jabar 2021.

Gambar 2.16

Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019



Sumber: Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2019

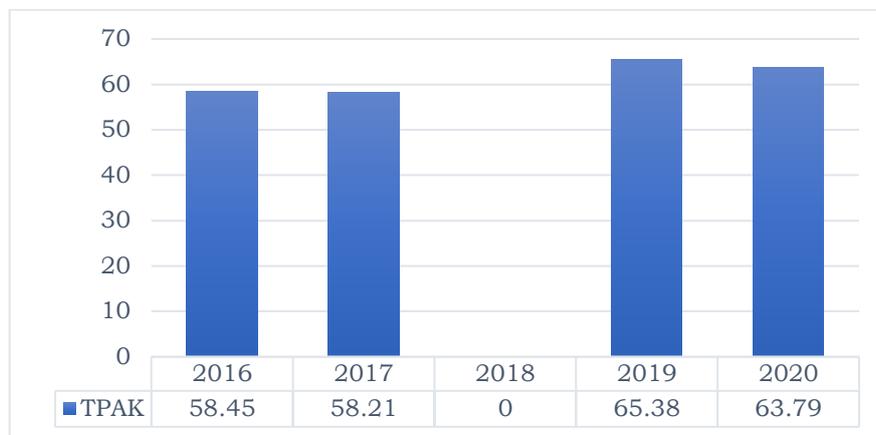
Usia harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 berada di angka 71,82. Angka ini masih berada di bawah UHH Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,85 tahun. 3 Kabupaten/Kota dengan UHH tertinggi di Jawa Barat adalah Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Bandung.

2.1.3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Gambar 2.17

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 TPAK sebesar 58,45% dan tahun 2019 naik menjadi 65,38%. Akan tetapi pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Cirebon sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 63,79%. Penurunan TPAK ini terjadi dikarenakan beberapa kondisi dan salah satunya disebabkan dengan adanya pandemi covid-19.

Tabel 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	TPAK	No.	Kabupaten/Kota	TPAK
1.	Pangandaran	75,18	15.	Kota Depok	65,03
2.	Majalengka	67,97	16.	Bekasi	64,03
3.	Indramayu	67,89	17.	Sumedang	63,98
4.	Subang	67,88	18.	Purwakarta	63,93
5.	Kota Banjar	67,69	19.	Kota Bogor	63,73
6.	Ciamis	67,56	20.	Karawang	63,62
7.	Tasikmalaya	66,66	21.	Kota Cimahi	63,39
8.	Cianjur	66,14	22.	Kota Cirebon	62,84
9.	Kota Bandung	65,98	23.	Garut	62,70

No.	Kabupaten/Kota	TPAK	No.	Kabupaten/Kota	TPAK
10.	Kota Bekasi	65,70	24.	Sukabumi	62,68
11.	Bogor	65,42	25.	Kota Sukabumi	62,56
12.	Bandung	65,38	26.	Bandung Barat	62,09
13.	Cirebon	65,38	27.	Kuningan	61,31
14.	Kota Tasikmalaya	65,38			

Sumber: Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 2.18

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016–2020



Sumber: 1. BPS Jawa Barat Tahun 2021, diolah
2. BPS RI Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 angkanya mencapai 9,21 persen. Selanjutnya meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 10,28 persen. Selanjutnya TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 11,52 persen. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 yang setahun belakangan ini telah menimpa wilayah Indonesia dan salah satunya termasuk di Kabupaten Cirebon.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016-2019 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat, selalu berada diatas TPT Provinsi Jawa Barat. Dimana pada tahun 2019 TPT Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 7,99 persen dan TPT Indonesia sebesar 5,28, sedangkan Kabupaten Cirebon pada tahun yang

sama angkanya mencapai 10,28 persen.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Barat pada Tahun 2019 menunjukkan angka yang bervariasi antara 4,37 persen sampai dengan 10,28 persen. Daerah dengan TPT lebih rendah dari provinsi meliputi 10 kabupaten/kota. Tiga daerah dengan TPT terendah yaitu Kabupaten Majalengka sebesar 4,37 persen, Kabupaten.

Pangandaran sebesar 4,48 Persen, dan Kabupaten Ciamis sebesar 5,10 persen. Sementara daerah dengan TPT lebih tinggi dari provinsi sebanyak 16, yang terdiri dari: (1) Kabupaten Cirebon, (2) Kabupaten Cianjur, (3) Kabupaten Purwakarta, (4) Kabupaten Kuningan, (5) Kabupaten Karawang, (6) Kota Bogor, (7) Kabupaten Bogor, (8) Kota Cirebon, (9) Kabupaten Bekasi, (10) Kabupaten Subang, (11) Kota Sukabumi, (12) Kabupaten Indramayu, (13) Kota Bekasi, (14) Kabupaten Bandung Barat, (15) Kota Bandung, dan (16) Kota Cimahi. Sementara Kota Sukabumi memiliki capaian yang sama dengan Provinsi pada angka 7,99 Persen.

Tabel 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Bogor	n/a	9,55	9,83	9,11	14,29
2.	Kabupaten Sukabumi	n/a	7,66	7,84	8,05	9,60
3.	Kabupaten Cianjur	n/a	10,1	10,23	9,81	11,05
4.	Kabupaten Bandung	n/a	3,92	5,07	5,51	8,58
5.	Kabupaten Garut	n/a	7,86	7,12	7,35	8,95
6.	Kabupaten Tasikmalaya	n/a	6,61	6,92	6,31	7,12
7.	Kabupaten Ciamis	n/a	5,17	4,64	5,16	5,66
8.	Kabupaten Kuningan	n/a	7,94	9,10	9,68	11,22
9.	Kabupaten Cirebon	n/a	9,61	10,64	10,35	11,52
10.	Kabupaten Majalengka	n/a	5,02	5,00	4,37	5,84
11.	Kabupaten Sumedang	n/a	7,15	7,54	7,70	9,89
12.	Kabupaten Indramayu	n/a	8,64	8,46	8,35	9,21
13.	Kabupaten Subang	n/a	8,74	8,71	8,68	9,48
14.	Kabupaten Purwakarta	n/a	9,11	9,94	9,73	11,07
15.	Kabupaten Karawang	n/a	9,55	9,12	9,68	11,52
16.	Kabupaten Bekasi	n/a	10,97	9,74	9,00	11,54
17.	Kabupaten Bandung Barat	n/a	9,33	8,55	8,24	12,25
18.	Kabupaten Pangandaran	n/a	3,34	3,59	4,52	5,08
19.	Kota Bogor	n/a	9,57	9,74	9,16	12,68
20.	Kota Sukabumi	n/a	8	8,57	8,49	12,17
21.	Kota Bandung	n/a	8,44	8,05	8,18	11,19
22.	Kota Cirebon	n/a	9,29	9,07	9,04	10,97
23.	Kota Bekasi	n/a	9,32	9,14	8,30	10,68
24.	Kota Depok	n/a	7	6,66	6,12	9,87

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
25.	Kota Cimahi	n/a	8,43	8,00	8,09	13,30
26.	Kota Tasikmalaya	n/a	6,89	6,89	6,78	7,99
27.	Kota Banjar	n/a	5,97	5,95	6,16	6,73
	Provinsi Jawa Barat	8,89	8,22	8,23	8,04	10,46

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2021

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Dalam kerangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan berbagai pelayanan umum yang meliputi layanan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengukur capaian tingkat pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan indikator-indikator sesuai dengan bidang pelayanan yang diselenggarakan.

2.1.4.1 Layanan Urusan Wajib

2.1.4.1.1 Pendidikan

Bidang pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban kearah yang lebih baik. Selain itu, dengan berbekal sumber daya manusia berkualitas akan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia masa depan ditentukan oleh keberhasilan bidang pendidikan.

Selanjutnya untuk melihat kinerja pada bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon, berikut disajikan capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan sumber lainnya.

Tabel 2.17 Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Pendidikan						
	Pendidikan Anak Usia Dini						
	- APK PAUD	%	49,09	49,39	49,39	65,80	42,03
	Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA						
	- APK SD/MI	%	120,79	120,90	120,90	116,52	104,64
	- APK SMP/MTs	%	115,97	114,41	114,41	122,27	88,04
	- APK SMA/K	%	96,64	100,65	112,45	95,86	82,30
	Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA						
	- APM SD/MI	%	106,5	106,52	106,52	103,32	95,84
	- APM SMP/MTs	%	94,85	95,54	95,54	97,88	79,71
	- APM SMA/K	%	85,40	75,92	86,40	66,95	59,30

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Angka Putus Sekolah						
	- Angka Putus Sekolah Sederajat SD	%	0,10	0,01	0,01	0,07	0,023
	- Angka Putus Sekolah Sederajat SMP	%	0,35	0,29	0,29	0,20	0,20
	- Angka Putus Sekolah Sederajat SMA	%	0,29	0,56	0,38	0,35	0,09
	- Angka Putus Sekolah Sederajat SMK	%	0,06	0,02	0,27	0,17	0,19
	Angka Kelulusan						
	- Angka Lulusan SD/MI sederajat	%	96,5	95,8	95,8	97,47	98,96
	- Angka Lulusan SMP sederajat	%	83,23	82,06	82,06	81,04	95,53
	- Angka Lulusan SMA sederajat	%	83,61	74,42	83,70	68,22	64,05
	- Angka Lulusan SMK sederajat	%	66,46	77,38	79,62	68,18	72,18
	Angka Melanjutkan						
	- Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	110,41	109,35	109,35	110,66	82,99
	- Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	107,8	108,99	108,99	118,20	117,07
	Fasilitas Pendidikan						
	- Ruang Kelas Baik SD/MI	%	65,87	65,87	65,82	64,60	59,27
	- Ruang Kelas Baik SMP/MTs	%	79,47	79,47	79,38	80,36	75,54
	- Ruang Kelas Baik SMA/MA	%	74,31	79,24	86,29	83,36	82,23
	- Ruang Kelas Baik SMK	%	92,67	92,15	90,32	89,35	79,85
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan						
	- SD	Siswa/guru	20	20	21	20	21
	- SMP	Siswa/guru	17	17	18	15	15
	- SMA	Siswa/guru	16	15	15	14	14
	- SMK	Siswa/guru	17	14	14	15	15
	Rasio Murid/kelas rata-rata						
	- SD	Siswa	30	27	27	26	27
	- SMP	Siswa	31	29	29	31	22

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	- SMA	Siswa	35	37	33	32	32
	- SMK	Siswa	34	33	32	32	31
	Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun	%	94,77	98,92	98,97	99,73	99,73
	Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV						
	- PAUD	%					
	- SD	%	89,66	94,05	94,05	96,86	97,06
	- SMP	%	95,05	96,46	96,46	97,73	97,63
	- SMA	%	99,07	98,78	98,89	98,80	98,93
	- SMK	%	96,57	97,00	97,25	97,13	97,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- a. APK PAUD tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 sebesar 49,09% menjadi 65,80% di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 42,03%;
- b. Angka APK SD/MI mengalami kenaikan dari 120,79% menjadi 120,90% di tahun 2018, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 104,64%;
- c. Angka APK SMP/MTs mengalami kenaikan dari 115,97% di tahun 2016 menjadi 122,27% di tahun 2019, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 menjadi 88,04%;
- d. Angka APK SMA/K mengalami fluktuasi, yang semula 96,64% ditahun 2016 dan kemudian meningkat menjadi 112,45% ditahun 2018, namun pada tahun 2020 turun kembali menjadi 82,30%;
- e. Angka APM SD/MI pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung turun, dimana pada tahun 2016 mencapai 106,5% namun pada tahun 2020 turun menjadi 95,84%;
- f. Angka APM SMP/MTs pada tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan dari 94,85% ditahun 2016 menjadi 97,88% pada tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 79,71%;
- g. Angka APM SMA/K pada tahun 2016 sebesar 85,40%, namun pada tahun 2020 turun menjadi 59,30%;
- h. Angka putus sekolah SD pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan posisi terakhir sebesar 0,023% di tahun 2019;
- i. Angka Putus Sekolah SMP Sederajat pada tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,20 pada tahun 2020;
- j. Angka Putus Sekolah SMA Sederajat dari yang semula 0,29% pada tahun 2016, naik menjadi 0,56% di tahun 2017, namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan menjadi 0,09 di tahun 2020;
- k. Angka Putus Sekolah SMK Sederajat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi hingga diposisi tahun terakhir mencapai 0,19%;
- l. Angka kelulusan untuk SD/MI pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi dan

- cenderung meningkat di tahun terakhir menjadi 98,96% (2019);
- m. Angka kelulusan untuk SMP dan SMA dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Angka lulusan SMP sederajat turun dari 83,23% menjadi 81,04%, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 95,53%;
 - n. Angka lulusan SMA sederajat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dengan posisi terakhir yaitu 64,05% di tahun 2020. Sedangkan Angka lulusan SMK pada periode yang sama juga mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat dengan posisi terakhir yaitu mencapai 72,18%;
 - o. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun hingga menjadi 82,99% di tahun 2020. Untuk Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga pada tahun yang sama mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat hingga mencapai 117,07% di tahun 2020;
 - p. Fasilitas ruang kelas Baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan MA pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun terakhir (2019 ke 2020);
 - q. Rasio guru murid sekolah pendidikan dasar SD pada tahun 2020 mencapai 21 siswa/guru. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 20 siswa/guru di tahun 2019. Untuk Rasio guru murid sekolah pada jenjang SMA selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari 16 siswa/guru (2016) menjadi hanya 14 siswa/guru (2020). Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMK pada tahun yang sama mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.
 - r. Rasio murid/kelas rata-rata untuk jenjang SD, SMP dan SMA selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Namun untuk jenjang SMK pada periode yang sama angkanya terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 hanya mencapai 31 siswa atau mengalami penurunan sebesar 3 siswa di banding dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai 34 siswa;
 - s. Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun pada tahun 2020 mencapai 99,73%, mengalami kenaikan sebesar 4,96% dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 94,77%;
 - t. Angka guru yang memiliki kualifikasi S1/D4 untuk jenjang SD pada tahun 2016 hanya mencapai 89,66% dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 97,06%. Untuk jenjang SMP dan SMK pada tahun yang sama mengalami fluktuasi, dengan posisi terakhir yaitu sebesar 97,63% (SMP) dan 97,10% (SMK). Sedangkan Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk jenjang SMA pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga menjadi 98,93% di tahun 2020 atau turun sebesar 0,14% dibanding dengan tahun 2016 yang mencapai 99,07%.

Selain itu, sebagai modal dasar pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, tentu saja harus diimbangi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu dan berkualitas, minimal sesuai standar nasional. Berikut sarana penunjang utama pendidikan, yakni guru dan sekolah beserta rasionya terhadap total murid di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.18 Sarana Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid		Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sekolah Dasar (SD)	885	48	193.312	8.260	8.955	510
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	80	118	57.008	23.757	3.066	1.436
Sekolah Menengah Atas (SMA)	21	26	17.466	4.408	886	310
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	8	101	9.990	43.430	490	2.105

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.19 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,05%	0,11%
2.	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	100,00%	91,67%
3.	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	1.151,49	
4.	Presentase Ibu hamil mendapatkan kesehatan ibu hamil	96,67%	98,24%
5.	Presentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan	95,99%	98,65%
6.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	104,90%	98,03%
7.	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,88%	87,19%
8.	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,27%	71,43%
9.	Presentase usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52,60%	14,60%
10.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke	9,66%	72,42%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
	atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
11.	Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayan kesehatan sesuai standar	17,65%	27,08%
12.	Presentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	159,70%	78,94%
13.	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00%	43,48%
14.	Presentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	53,63%	32,17%
15.	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	61,99%	62,31%
16.	Presentase Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	87,03%	87,03%
17.	Presentase Balita Gizi Buruk / Stunting yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100,00%	100,00%
18.	Presentase penemuan dan penanganan penderita DBD	90,16%	86,82%
19.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	70,23%	84,16%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.1.4.12 Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kabupaten Cirebon memiliki dua rumah sakit umum daerah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Rumah Sakit Umum Daerah Waled. Setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon juga telah memiliki puskesmas induk yang merupakan fasilitas kesehatan utama yang berada di pusat kecamatan. Selain itu, unit pembantu pengembangan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) juga telah tersedia di setiap kecamatan. Adapun Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit) Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit), Tahun 2018-2020

Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020
Rumah Sakit	12	12	12
Rumah Sakit Bersalin	0	0	0
Poliklinik	83	58	78

Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020
Puskesmas	67	55	58
Puskesmas Pembantu	107	74	81
Apotek	126	133	153

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Dari fasilitas kesehatan yang tersedia di atas, dalam satu bulan di tahun 2020 telah melakukan pelayanan kesehatan baik itu dalam perawatan jalan maupun inap sebagaimana tercermin pada data presentase berikut.

Tabel 2.21 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2020

Tempat Berobat	Laki –laki	Perempuan	Jumlah
Rumah Sakit	17,51	10,64	13,91
Prektek Dokter/Bidan	37,96	33,78	35,67
Klinik/Praktek Dokter Bersama	5,50	5,39	5,44
Puskesmas/Pustu	46,46	52,77	49,93
Lainnya	3,68	2,69	3,15

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.22 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Jenis Kelamin	BCG	DPT	Polio	Campak	HB
Laki-laki	92,80	87,13	95,47	63,24	92,29
Perempuan	87,58	86,39	89,81	61,83	89,67

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD

Lebih lanjut untuk Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23 Capaian Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	4,28	3,99	2,97	2,62	2,82
2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	1,94	0,75	3,18	2,8	2,9
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	90	18	73,26	70,23	84,16
4.	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 balita	15,77	15,86	13,50	15,3	14,4

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,080	0,079	0,09	0,084	0,097
6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,005	0,005	0,005	0,004	0,01
7.	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,224	0,259	0,261	0,151	0,151
8.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,224	0,259	0,261	0,151	0,151
9.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	119,71	121,04	139,8	135,0	158,6
10.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,17	93,61	101	95,5	98,6
11.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	87,26	72,17	83,49	87,03	87,03
12.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
13.	Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	98,09	93,40	97,12	97,12	88,27
14.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	2,70	2,22	3,6	3,6	0,36
15.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	61,59	67,47	108,7	90	92
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	14,22	15,35	100	106	65
17.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	2,24	2,95	1,6	4,75	4,74
18.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	14,22	15,35	100	106	65
19.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	75,68	49,76	82	84	83

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
20.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	93,50	75,18	91,60	90,16	86,82
21.	Penderita diare yang ditangani	%	159,80	138,86	75,46	66,7	52,1
22.	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,50	0,40	0,01	0,23	0,99
23.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01	0,01	0,01	0,42	0,43
24.	Cakupan kunjungan bayi	%	100,37	103,03	102,04	100	101,91
25.	Cakupan puskesmas	%	142,5	142,5	150	150	150
26.	Cakupan pembantu puskesmas	%	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
27.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	92,22	94,92	100,41	96,8	98,2
28.	Cakupan pelayanan nifas	%	91,48	93,79	47,04	95,5	99
29.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	86,33	106,28	40,17	112,7	100,89
30.	Cakupan pelayanan anak balita	%	93,89	97,20	49,25	100,8	87,19
31.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	92,04	74,18	95,99	93,75	80,35
32.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa:

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 mencapai 4,28 dan pada tahun 2020 turun menjadi 2,82;
- 2) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, pada tahun 2016 hanya mencapai 1,94, namun pada tahun 2020 naik menjadi 2,9;
- 3) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mencapai 90 dan tahun 2020 mencapai 84,16;
- 4) Rasio Posyandu per satuan balita dari 2016-2020 mengalami penurunan dari 15,77 menjadi 14,4 per 1000 balita;

- 5) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk mengalami kenaikan dari 0,080 menjadi 0,097 per 1000 penduduk;
- 6) Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mencapai 0,005 dan pada tahun 2020 mencapai 0,01 per 1000 penduduk;
- 7) Rasio dokter per satuan penduduk mengalami fluktuasi dari 0,224 pada tahun 2016 menjadi 0,151 per 1000 penduduk di tahun 2020;
- 8) Rasio tenaga medis per satuan penduduk mengalami fluktuasi dari 0,224 pada tahun 2015 menjadi 0,151 per 1000 penduduk di tahun 2020;
- 9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami kenaikan selama kurun waktu tahun 2016-2020 dari 119,71% menjadi 158,6%;
- 10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami fluktuasi dari 92,17% pada tahun 2016 menjadi 98,6% di tahun 2020;
- 11) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dari 87,26 di tahun 2016 menjadi 87,03 pada tahun 2020;
- 12) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan stabil dalam angka 100%;
- 13) Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 sebesar 98,09% dan pada tahun 2020 turun menjadi 88,27%;
- 14) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk mengalami fluktuasi dan cenderung turun, dimana pada tahun 2016 mencapai 2,70, namun pada tahun 2020 turun menjadi 0,36%;
- 15) Cakupan balita pneumonia yang ditangani mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 mencapai 61,59% dan pada tahun 2020 naik menjadi 92%;
- 16) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mencapai 14,22% dan pada tahun 2020 menjadi 65%;
- 17) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mengalami kenaikan 2,24 menjadi 4,74 per 100.000 penduduk;
- 18) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mencapai 14,22% dan pada tahun 2020 menjadi 65%;
- 19) Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami fluktuasi dari 75,68% menjadi 83%;
- 20) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mengalami penurunan dari 93,50% menjadi 86,82%;
- 21) Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan dari 159,80% menjadi 52,1%;
- 22) Angka kejadian Malaria naik, dari 0,50 menjadi 0,99 per 100.000 penduduk;
- 23) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi naik, dari 0,01% menjadi 0,43%;
- 24) Cakupan kunjungan bayi dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, dari 100,37% menjadi 101,91%;
- 25) Cakupan puskesmas mengalami kenaikan 142,5% menjadi 150%;
- 26) Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2016-2020 masih sama yaitu 16,75%;
- 27) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami fluktuasi, dari 92,22% pada tahun

- 2016 menjadi 98,2% di tahun 2020;
- 28) Cakupan pelayanan nifas mengalami kenaikan 91,48% menjadi 99%;
 - 29) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dari 86,33% menjadi 100,89%;
 - 30) Cakupan pelayanan anak balita mengalami fluktuasi, dari 93,89% menjadi 87,19%;
 - 31) Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat mengalami fluktuasi, dari 92,04% menjadi 80,35%;
 - 32) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam stabil diangka 100%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.24 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,05%	0,11%
2.	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	100,00%	91,67%
3.	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	1.151,49	-
4.	Presentase Ibu hamil mendapatkan kesehatan ibu hamil	96,67%	98,24%
5.	Presentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan	95,99%	98,65%
6.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	104,90%	98,03%
7.	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,88%	87,19%
8.	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,27%	71,43%
9.	Presentase usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52,60%	14,60%
10.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	9,66%	72,42%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
11.	Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayan kesehatan sesuai standar	17,65%	27,08%
12.	Presentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	159,70%	78,94%
13.	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00%	43,48%
14.	Presentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	53,63%	32,17%
15.	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	61,99%	62,31%
16.	Presentase Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	87,03%	87,03%
17.	Presentase Balita Gizi Buruk / Stunting yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100,00%	100,00%
18.	Presentase penemuan dan penanganan penderita DBD	90,16%	86,82%
19.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	70,23%	84,16%

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD.

2.1.4.13 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Keberadaan sarana penghubung di Kabupaten Cirebon relatif cukup baik dilihat dari kondisi jalan kabupaten, jalan propinsi maupun jalan negara.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan, dari 471,72 km pada tahun 2016 menjadi 694,22 km di tahun 2020. Sedangkan untuk kondisi sedang pada tahun yang sama angkanya mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi sedang hanya mencapai 339,19 km.

Adapun Panjang Jalan Kabupaten (km) di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020 disajikan lengkap pada tabel berikut ini:

Tabel 2.25 Panjang Jalan Kabupaten (km) di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kondisi Baik	Km	471,72	496,127	568,51	679,68	694,22
Kondisi Sedang	Km	474,15	482,811	441,12	337,62	339,19

Kondisi Rusak Ringan	Km	197,15	163,6	152,37	121,73	137,51
Kondisi Rusak Berat	Km	97,28	97,766	78,30	101,28	69,40

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Lebih lanjut mengenai Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26 Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik	Persen	26,21	40,00	45,84	54,80	55,97
2.	Persentase jalan drainase/saluran pembuangan air	Persen	1,31	2,20	3,03	3,55	3,77
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	62,88	62,2	62,22	71,08	72,54
4.	Rasio jaringan irigasi	Persen	16,84	16,84	16,84	17,44	17,44
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m)	Persen	0,05	0,43	0,66	0,85	0,87

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik mengalami kenaikan pada tahun 2016-2020 dari 26,21% menjadi 55,97%;
- 2) Persentase jalan drainase/saluran pembuangan air dari 2016-2020 mengalami kenaikan juga, dari 1,31% menjadi 3,77%;
- 3) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari 62,88% menjadi 72,54%;
- 4) Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m) masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,87% di tahun 2020.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.27 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	82,02%	83,32%
2.	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi / direkonstruksi	29,21%	n/a
3.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100,00%	4.72%
4.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100,00%	0,00%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	67,87%	65,07%
6.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,24%	74,86%
7.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,00%	20,00%
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1,00%	100,00%

2.1.4.14 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dari tahun 2016-2018 terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2016 mencapai 75% dan tahun 2018 naik menjadi 96,5%. Adapun data Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	94	96,16	96,5	97,96	98,13

Sumber: DKPP Kab. Cirebon, 2018 yang dikelola dalam SIPD.

2.1.4.15 Air Bersih

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menjadi salah satu penentu dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan produktifitas masyarakat di bidang ekonomi. Meningkatkan ketersediaan air bersih dimasa mendatang merupakan hal terpenting bagi kehidupan semua manusia. Air sebagai salah satu hajat dasar manusia, ketersediaan air bersih adalah hal utama menjamin kelayakan keberlangsungan hidup.

Tabel 2.29 Jumlah Pelanggan Air Bersih PDAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	33.125	n.a	n.a	67,87%	n/a
2.	Jumlah Rumah Tangga	677.089	n.a	n.a	n.a	n.a
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih (11/12)	4.89	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Buku Cirebon dalam Angka Tahun 2016-2017, PDAM Kab.Cirebon yang dikelola dalam SIPD.

Untuk pengguna PDAM yang saat ini paling banyak adalah jenis pelanggan rumah tangga yang prosentasenya mencapai 96,421% atau sebanyak 33.215 rumah tangga. Disusul oleh jenis pelanggan sosial yang mencapai 1,475% atau sebanyak 508 pelanggan. Adapun pelanggan yang paling sedikit adalah dari jenis industri dengan prosentase sebesar 0,009% atau sebanyak 3 pelanggan.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.30 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Rumah Tangga Bersanitasi	78,24%	n/a
2.	Rumah tangga pengguna air bersih	67,87%	n/a

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
3.	Kawasan Kumuh	0,01%	n/a
4.	Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah	52,66%	n/a
5.	Rasio Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani / ditangani oleh jaringan irigasi	9,96%	72,15%
6.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	0%
7.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	100,00%	0%
8.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	94,09%	5,91%
9.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	2,04%	1,87%
10.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)	11,13%	7,35%
11.	Rumah layak huni	97,96%	98,13%

2.1.4.16 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, capaian Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Cirebon dari tahun 2016-2018 stabil sebesar 100% per tahun. Begitupula Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebesar 100% selama 3 tahun. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2016 sebesar 35% dan turun menjadi 10,7% pada tahun 2018. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) dari tahun 2016 sampai 2017 naik dari 28,50% menjadi 74,87%. Prosentase Penegakan Perda dari tahun 2016 sampai 2018 naik dari 83,89% menjadi 86,43%.

Capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31 Capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat						
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Cirebon	%	100	100	100	n.a	n.a

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	n.a	n.a
3.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	35	30	10,7	n.a	n.a
4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	28,50	74,87	-	n.a	n.a
5.	Prosentase Penegakan Perda	%	83,89	79,24	86,43	n.a	n.a

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Cirebon, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.32 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	68,44%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	10,79%	10,79%
3.	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	n/a	n/a
4.	Jumlah Warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	n/a	n/a
5.	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n/a	n/a
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana	86,75%	n/a
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	n/a	n/a
8.	Persentase personil Satpol PP berkualitas PPNS	8,22%	n/a

2.1.4.17 Sosial

PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama kurun waktu tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 mencapai 48,96% dan naik menjadi 67,06% di tahun 2017, namun turun kembali pada tahun 2018 menjadi 28%. Adapun Capaian Bidang Sosial Tahun 2016-2018 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33 Capaian Bidang Sosial Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Sosial						
1.	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	48,96	67,06	28	n.a	n.a
2.	Prosentase PMKS yang tertangani	%	48,96	67,06	139	n.a	n.a
3.	Prosentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	%	28,02	18,59	80	n.a	n.a
4.	Prosentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	%	8,61	2,53	80	n.a	n.a
5.	Prosentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	229	80	n.a	n.a
6.	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	n.a	n.a
7.	Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	n.a	n.a

Sumber: Dinsos Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Sosial dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.34 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	8,79%	5,27%
2.	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	9,52%	11,51%
3.	Rasio rumah singgah / shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	0,02%	n/a
4.	Persentase penyandang disabilitas , anak terlantar , usia lanjut terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100,00%	n/a
5.	Rasio pekerja sosial / TKS / Relawan sosial yang disediakan	2,50%	n/a
6.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	8,79%	5,27%
7.	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	9,52%	11,51%
8.	Rasio rumah singgah / shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	0,02%	n/a
9.	Persentase penyandang disabilitas , anak terlantar , usia lanjut terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100,00%	n/a

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
10.	Rasio pekerja sosial / TKS / Relawan sosial yang disediakan	2,50%	n/a

2.1.4.18 Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2018 disajikan secara lengkap sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.35 Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketenagakerjaan						
1.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun	-	-	-	-	n.a	n.a
2.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi	%	61,4	55,65	82	n.a	n.a
3.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kewirausahaan	%	80	81,63	78	n.a	n.a
4.	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45,84	49,08	-	n.a	n.a
5.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	73,58	40,63	-	n.a	n.a
6.	Kepesertaan Jamsostek	%	53,51	65,05	55	n.a	n.a
7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	46,70	-	-	n.a	n.a
8.	Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan	%	53,17	-	-	n.a	n.a
9.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	100	320	-	n.a	n.a
10.	Prosentase transmigran swakarsa	%	0	0	0	n.a	n.a
11.	Keselamatan dan Perlindungan	-	-	-	-	n.a	n.a

Sumber: Disnakertrans Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Tenaga Kerja dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai

bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.36 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga Kerja Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	26,32%	100,00%
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,00%	81,08%
3.	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	37.859.607,84	5,282%
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP / PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	6,70%	100%
5.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	47,96%	31,44%
6.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	52,78%	-
7.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	62,50%	-
8.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	95,61%	-

2.1.4.19 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Guna mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Lebih lanjut indikator pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.37 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja Langsung APBD	0,27%	0%
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,01%	0,006%
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak pidana perdagangan orang/manusia) per 100.000 Penduduk Perempuan	3,51	0,000655%
4.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00%	n.a
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	47,89%	n.a

2.1.4.110 Pangan

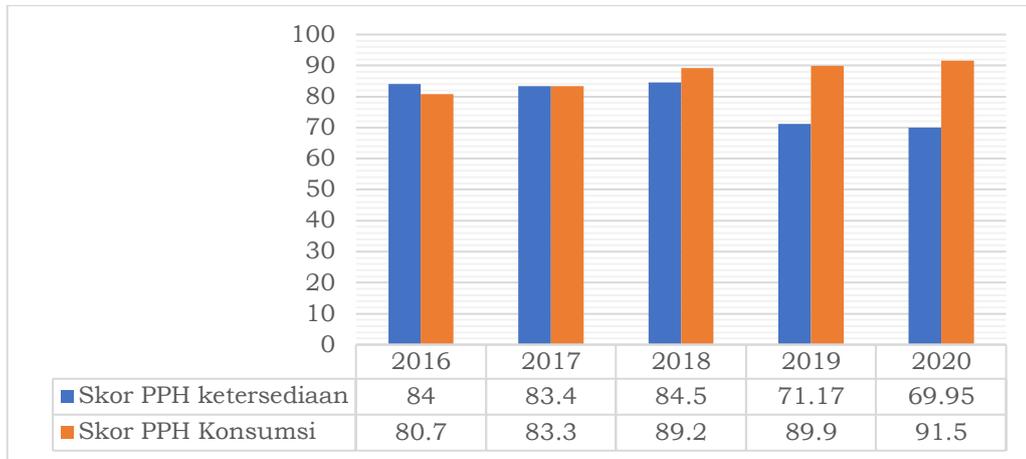
Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Kabupaten Cirebon telah mampu mengeluarkan Produk Domestik Regional Bruto demi mencukupi kebutuhan pangan di daerahnya. Beberapa sektor untuk memenuhi kebutuhan pangan meliputi produk tanaman pangan berupa padi dan palawija, tanaman hortikultura musiman dan tahunan berupa sayur dan buah-buahan, peternakan berupa unggas, sapi, kambing, babi dll, serta sektor perikanan dimana sebagian wilayah di Kabupaten Cirebon merupakan daerah pesisir pantai.

a. Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Skor PPH ketersediaan selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun di tahun 2020 menjadi 69,95% dari yang semula 84% di tahun 2016. Untuk Skor PPH Konsumsi pada tahun 2016-2020 nilainya terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 80,7% dan pada tahun 2020 naik menjadi 91,5%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.19

Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: Dishanpang Kab.Cirebon, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Lebih lanjut Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38 Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.9	Ketahanan Pangan						
1.	Skor PPH ketersediaan	%	84	83,4	84,5	71,17	69,95
2.	Jumlah Desa Rawan Pangan yang diintervensi	Desa	5	5	6	7	n.a
3.	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CCPD)	%	24	42	86	90,71 9	182
4.	Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (CV)	koefisien	9,75	9,75	9,75	4	2,80
5.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan	buah	1	2	-	1	-
6.	Skor PPH Konsumsi	%	80,7	83,3	89,2	89,9	91,50
7.	Tingkat Keamanan Pangan	%	83	92	92	67	88

Sumber: Dishanpang Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Jumlah Desa Rawan Pangan yang diintervensi mengalami kenaikan dari 2016 sebanyak 5 Desa kemudian 2019 sebanyak 7 desa;
- 2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CCPD) dari 2016-2020 mengalami kenaikan 24% menjadi 182%;
- 3) Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (CV) 2016-2020 mengalami penurunan dari 9,75 menjadi 2,80;

- 4) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan juga mengalami mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 1 buah, naik pada tahun 2017 menjadi 2 buah, namun pada tahun 2019 turun kembali menjadi 1 buah; dan
- 5) Tingkat Keamanan Pangan dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 83 persen dan tahun 2020 naik menjadi 88 persen.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pangan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.39 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	171,30%	152,07%
2.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	n/a	n/a

2.1.4.1.11 Pertanian

Capaian indikator pada bidang pertanian di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pertanian dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.40 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	2,33%	0%
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100,00%	100%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	2,33%	0%
4.	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	0%
5.	Luas lahan bersertifikat (aset Pemkab)	29,96%	-
6.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100,00%	0%
7.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	40,00%	100%

2.1.4.112 Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis dan hal penting dalam pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan mengandung implikasi perubahan yang direncanakan. Perubahan yang terjadi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk tetapi tidak mengganggu aspek lingkungan hidup. Implikasi lainnya yaitu adanya eksploitasi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan/atau pertumbuhan ekonomi wilayah yang acapkali bersinggungan dengan aspek lingkungan hidup. Oleh karenanya, harus dapat dipastikan pembangunan daerah berada dalam bingkai atau koridor pembangunan berkelanjutan.

Adapun Indikator yang dapat merepresentasikan capaian pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon adalah diantaranya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Terlaksananya Pengelolaan sampah dan Ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Capaian beberapa indikator tersebut disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.41 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-
2.	Terlaksananya Pengelolaan sampah	6,09%	2,12%
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100,00%	59,06%

2.1.4.1.13 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk pula bagi Kabupaten Cirebon. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk menjadi salah satu tantangan pembangunan di bidang kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Berikut disajikan data Capaian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2020.

Tabel 2.42 Capaian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	1,29	1,22	0,93	n.a	n.a
2.	Rasio bayi berakta kelahiran	%	0,36	0,36	0,19	23,92	23,8
3.	Jumlah pasangan berakta nikah	pasangan	1.038.345	1.023.159	1.040.827		1.054.030
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Buah	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	Sudah	Sudah	Sudah	sudah	sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	88,5	81	93	97,64	99,87
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	36,2	78,98	80,51	85,36	83,86

Sumber: Disdukcapil Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2016-2018 mengalami penurunan dari 1,29% menjadi 0,93%;
- 2) Rasio bayi berakta kelahiran mengalami penurunan dari 0,36% menjadi 0,19% pada tahun 2018, namun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga menjadi 23,8% di tahun 2020;
- 3) Jumlah pasangan berakta nikah mengalami penurunan, dari semula 1.038.345 pasangan pada tahun 2016 menjadi 1.023.159 pasangan di tahun 2017, namun pada tahun berikutnya terus mengalami kenaikan hingga menjadi 1.054.030 pasangan di tahun 2020;

- 4) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami kenaikan dari 88,5% menjadi 99,87%;
- 5) Cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami kenaikan 36,2% menjadi 83,86%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.43 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	96,57%	88,07%
2.	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	97,60%	99,87%

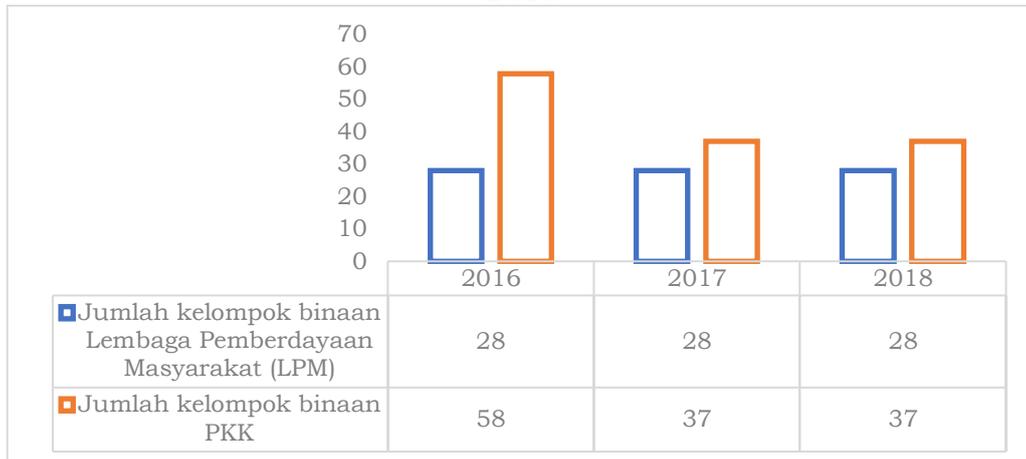
2.1.4.114 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengarahkan haluan pembangunan dunia menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), stakeholders dalam bidang pembangunan berlomba-lomba menyasar satu atau beberapa dari tujuh belas tujuan pembangunan yang ada sebagai capaian. Banalitas proyeksi program ini tak terlepas berimbas pada program-program pemberdayaan masyarakat.

a. Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Cirebon diwujudkan dalam terbentuknya kelompok binaan. Perkembangan kelompok binaan di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Tabel 2.44 Jumlah Kelompok Binaan LPM dan PKK Kabupaten Cirebon 2016-2018



Sumber: DPMD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2016-2018 stabil di angka 28%. Sedangkan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 angkanya sebesar 58%, namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 37%.

Selanjutnya, selain Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK, berikut disajikan juga Indikator Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2018:

Tabel 2.45 Indikator Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	16,26	61,89	40	n.a	n.a
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	28	28	28	n.a	n.a
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	58	37	37	n.a	n.a
4.	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	n.a	n.a
5.	Persentase LPM Berprestasi	%	28	28	20	n.a	n.a
6.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	n.a	n.a
7.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	n.a	n.a
8.	Swadaya masyarakat terhadap	%	100	100	65	n.a	n.a

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	program pemberdayaan masyarakat						
9.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	55	n.a	n.a

Sumber: DPMD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mengalami fluktuasi, tahun 2016 hanya mencapai 16,26% dan naik menjadi 61,89% ditahun 2017, lalu kemudian turun kembali menjadi 40% di tahun 2018;
- 2) Persentase LSM aktif stabil diangka 100%;
- 3) Persentase LPM Berprestasi menurun dari angka 28% menjadi 20%;
- 4) Persentase PKK Aktif stabil diangka 100%;
- 5) Persentase Posyandu Aktif stabil diangka 100%;
- 6) Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat menurun dari 100% menjadi 65% dan 55%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.46 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

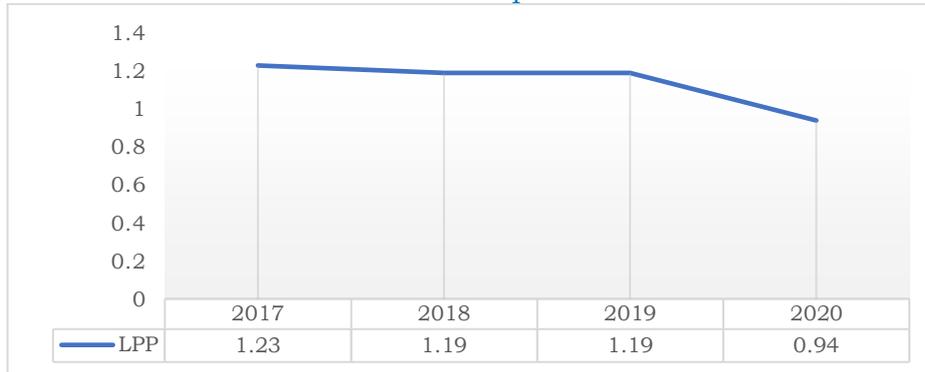
NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	72,09%	83,33 %
2.	Persentase Peningkatan status Desa Mandiri	100 %	250 %
3.	PKK aktif	100,00%	100
4.	Posyandu	100,00%	100

2.1.4.1.15 Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 LPP di Kabupaten Cirebon mencapai 1,23 persen dan pada tahun 2018 serta 2019 turun menjadi 1,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 LPP di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan kembali hingga menjadi 0,94 persen. Hal tersebut sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.20

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2020



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Selain Laju pertumbuhan penduduk tersebut diatas, indikator lainnya pada bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.47 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	-
2.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility / Rate / ASFR 15-19 Tahun)	-	-
3.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR)	74,99%	75,90%
4.	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	25,01%	13,30%

2.1.4.116 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu aspek pendukung demi percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu melaksanakan hal-hal terkait perhubungan seperti Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian. Bukan hanya di kota besar, akan tetapi transportasi yang memadai harus tersedia sampai ke pelosok desa di

setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah tabel jumlah kendaraan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.48 Jumlah Kendaraan Angkutan Pedesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018

No.	Kecamatan	2016	2017	2018
1.	Waled	21	21	21
2.	Pasaleman	21	21	21
3.	Ciledug	91	91	91
4.	Pabuaran	29	29	29
5.	Losari	73	73	73
6.	Pabedilan	0	0	0
7.	Babakan	23	23	23
8.	Gebang	46	46	46
9.	Karangsembung	46	46	46
10.	Karangwareng	8	8	8
11.	Lemahabang	74	74	74
12.	Susukan Lebak	75	75	75
13.	Sedong	39	39	39
14.	Astanajapura	31	31	31
15.	Pangenan	14	14	14
16.	Mundu	0	0	0
17.	Beber	5	5	5
18.	Greged	22	22	22
19.	Talun	10	10	10
20.	Sumber	245	245	245
21.	Dikupuntang	119	119	119
22.	Palimanan	118	118	118
23.	Plumbon	217	217	217
24.	Depok	181	181	181
25.	Weru	307	307	307
26.	Plered	286	286	286
27.	Tengahtani	20	20	20
28.	Kedawung	20	20	20
29.	Gunungjati	61	61	61
30.	Kapetakan	0	0	0
31.	Suranenggala	36	36	36
32.	Klangenan	178	178	178
33.	Jamblang	233	233	233
34.	Arjawinangun	353	353	353
35.	Panguragan	59	59	59
36.	Ciwaringin	60	60	60
37.	Gempol	5	5	5
38.	Susukan	39	39	39
39.	Gegesik	114	114	114
40.	Kaliwedi	67	67	67

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang dikelola dalam SIPD.

Adapun fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.49 Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

Sarana Prasarana/Fasilitas	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Terminal Type	-	-	-	-	-
Jumlah Sub Terminal	5	3	3	3	3
Jumlah Rambu Lalin	273	390	171	55	150
Jumlah Traffic Light	-	-	-	-	-
Jumlah Warning Light	2	6	6	-	-
Jumlah Lampu PJU	1.117	1.698	1.934	1.770	4
Panjang Pagar Pengaman	97	140	170	220	173
Shelter (Buah)	4	2	4	4	4
Jumlah Trayek Layanan	48	48	48	48	48

Sumber: Dishub Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Cakupan fasilitas perlengkapan jalan untuk sub terminal mengalami penurunan dari 2016-2018 dari 5 sub terminal menjadi 3 sub terminal;
- 2) Jumlah rambu lalu lintas juga mengalami penurunan dari 273 buah pada tahun 2016 menjadi 171 buah di tahun 2018;
- 3) Jumlah warning light mengalami kenaikan dari 2 menjadi 6 warning light;
- 4) Jumlah lampu PJU jumlahnya naik dari 1.117 buah menjadi 1.934 buah;
- 5) Pagar pengaman jalan jumlahnya naik dari 97 buah menjadi 170 buah;
- 6) Shelter meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2017, namun pada tahun 2018 naik kembali menjadi 4 buah;
- 7) Jumlah trayek layanan jumlahnya tetap sebanyak 48 trayek.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perhubungan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.50 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Rasio konektivitas Kabupaten	-	-
2.	Kinerja lalu lintas Kabupaten	-	-

2.1.4.117 Komunikasi dan Informatika

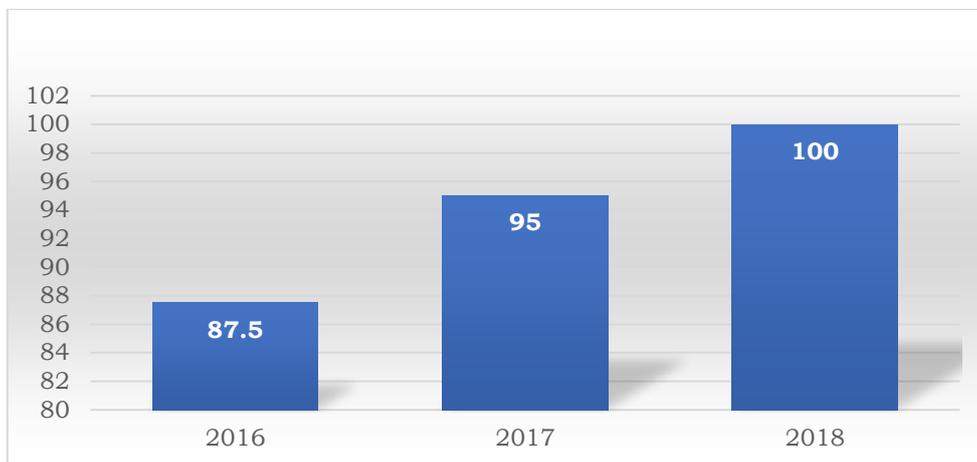
Pada era teknologi informasi sekarang ini, komunikasi dan informatika menjadi hal yang umum dalam keseharian masyarakat. Meskipun begitu, perihal ini belum menjadi domain utama masyarakat Cirebon dalam mengembangkan berbagai bidang kehidupannya sehari-hari.

a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Untuk cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, persentasenya naik dari tahun 2016 yang sebesar 87,5% menjadi 100% pada tahun 2018. Sedangkan untuk cakupan layanan telekomunikasi persentasenya stabil dari tahun 2015-2018 yaitu sebesar 100%. Hal tersebut sesuai dengan gambar dan tabel berikut ini.

Gambar 2.21

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2018



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.51 Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	100	n.a	n.a

Sumber: Diskominfo Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.52 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Pesentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan	100,00%	100%
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25,00%	100%
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	3,19%	100%
4.	Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi e-government	1	2
5.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	100,00%	100 %

2.1.4.118 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Koperasi

Kabupaten Cirebon memiliki koperasi usaha yang bergerak dalam banyak bidang usaha seperti peternakan, perikanan, perkebunan/ pertanian, angkutan darat dan lain-lain. Total jumlah koperasi di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun banyak diantara koperasi-koperasi tersebut yang tidak aktif. Menurut data yang tersedia Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah Koperasi Aktif hanya 721 koperasi dan pada tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 784 koperasi.

Selain Koperasi, Kabupaten Cirebon juga memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam banyak bidang usaha baik industri, jasa dan perdagangan yang tersebar di 40 Kecamatan. Saat ini mulai diupayakan adanya sentra-sentra usaha berdasarkan komoditas yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Ada beberapa sentra usaha seperti pindang, kerupuk, emping melinjo, rotan, batik, gerabah, kulit, batu alam, sandal, meubel, konveksi dan usaha lainnya. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta sarana dan prasarana.

Adapun Kondisi Perkoperasian dan UMKMDi Kabupaten Cirebon pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53 Kondisi Perkoperasian dan UMKM Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.17	Koperasi dan UMKM						
1.	Prosentase Koperasi Aktif	unit	721	749	754	756	784
2.	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	Persen	3/3	3/5	3/6	3/8	3/9
	Jumlah LKM Aktif	Unit	3	5	6	8	9
	Jumlah non BPR	Unit	3	3	3	3	3
3	Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	19/3	19/5	19/6	19/8	19/9
4	Usaha Mikro dan Kecil	Unit (mikro)	20.348	20.348	31.054	31.054	31.054
		Unit (mikro-kecil)	25.118	25.118	35.824	35.824	35.824
		Persen	95,12	95,12	96,53	96,53	96,53

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Cirebon, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.54 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

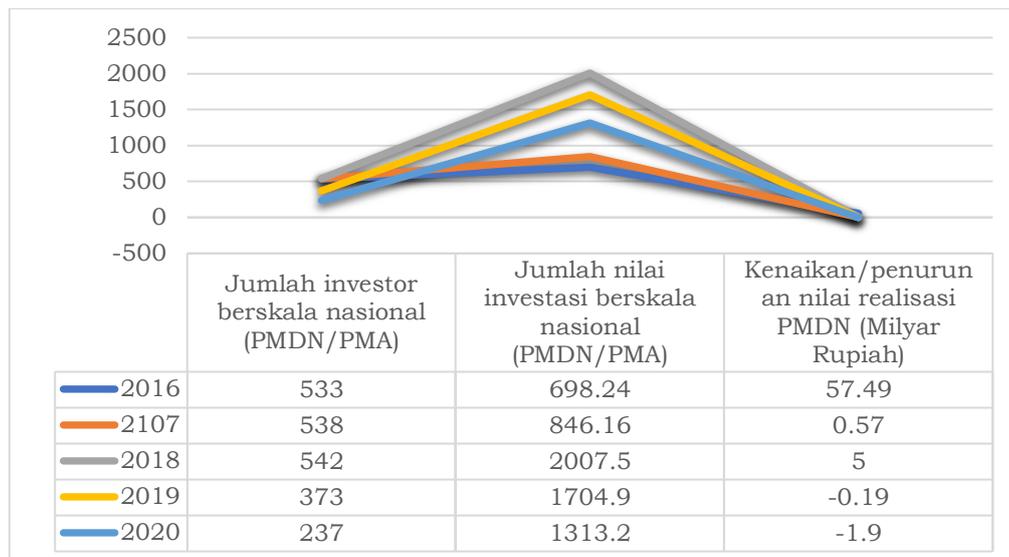
NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,04%	46,90%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100,00%	100,00%
3.	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,73%	-
4.	Koperasi aktif	28,63%	-

2.1.4.119 Penanaman Modal

Penanaman modal oleh investor dapat berdampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah secara langsung. Selain itu, pembukaan lapangan usaha oleh investor yang diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja secara langsung akan menurunkan tingkat pengangguran. Iklim investasi di Kabupaten Cirebon cukup fluktuatif baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Gambar 2.22

Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: DPMPSTSP Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sebanyak 533 investor dan meningkat menjadi 542 investor tahun 2018. Namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga menjadi 237 investor di tahun 2020.

Nilai total investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional sebesar Rp. 698,24 Milyar dan mengalami kenaikan hingga tahun 2018 menjadi Rp. 2.007,5 Milyar. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 1.313,20 Milyar di tahun 2020.

Selanjutnya, disajikan juga Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.55 Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018

No.	Indikator Iklim Investasi	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Perda Perizinan	9	9	9
2.	Penerbitan Perizinan	9.151	8.789	5.870
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	81,71	81,24	81,3

No.	Indikator Iklim Investasi	Tahun		
		2016	2017	2018
4.	Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi	4	4	3
5.	Retribusi perizinan (jutaan)	7.460,17	7.216,67	6.537,60
6.	Nilai Investasi (Jutaan)	698.246	846.160	2.007.508
7.	Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)	-	-	-
	Pertanian	238.055	5.338	6.210
	Pertambangan	0	0	0
	Industri Pengolahan	187.752	251.435	1.612.808
	Pengadaan Listrik dan Gas	66.386	400	400
	Pengadaan Air	1.400	300	-
	Bangunan/Konstruksi	29.193	8.672	19.590
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	30.395	490.679	26.117
	Transportasi dan Pergudangan	49.384	8.155	38.190
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.700	2.670	7.550
	Informasi dan Komunikasi	6.346	14.131	7.658
	Jasa Keuangan	300	350	100
	Real Estate	60.225	34.400	50.201
	Jasa Perusahaan	0	8.700	25.600
	Jasa Pendidikan	9.100	11.539	12.199
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.270	6.506	156.525	
Jasa Lainnya	5.740	2.882	44.359	

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Untuk tingkat pelayanan perizinan di DPM-PTSP dapat diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tahun 2016 menjadi 81,71 dan tahun 2017 menjadi 81,24 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor;
- 2) Nilai investasi tahun 2016 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan prosentase investasinya yang mencapai 57,98% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor industri pengolahan 29,71% dan diikuti oleh sektor real estate sebesar 4,06%;
- 3) Pada tahun 2017, pendapatan asli daerah dari retribusi perizinan sebesar Rp.7.216.670.595,-. Jumlahnya berkurang dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp. 7.460.171.318,-. Jenis-jenis retribusi perizinan yang diperoleh dari izin mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang gangguan (HO), izin trayek, izin usaha perikanan;
- 4) Sektor yang nilai investasinya meningkat di tahun 2017 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan peningkatan 4.502,84%. Adapun sektor yang mengalami penurunan investasi adalah sektor pertanian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi,

Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan jasa lainnya.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.56 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-15,07%	-22,972%

2.1.4.120 Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Namun dalam pembinaannya masih memerlukan peningkatan mutu dan kualitas.

Sementara, untuk fasilitas prasarana olahraga semakin bertambah. Pada tahun 2016, tambahan sarana prasarana yang dibangun sebanyak 6 sarana olahraga dan yang terpelihara 5 unit. Fasilitas ini digunakan untuk mendorong budaya masyarakat berolahraga. Gedung olahraga tersebut digunakan untuk pembinaan berbagai cabang olahraga terutama cabang olahraga unggulan. Beberapa cabang olahraga unggulan diantaranya adalah pencak silat, atletik, gulat, tenis meja, tenis lapang, bulutangkis, bola basket, sepak bola, bola voli, sepak takraw, karate, taekwondo, dan renang. Adapun jenis olahraga tradisional yang terdapat di Kabupaten Cirebon dan sedang dikembangkan adalah egrang, hadang, terompah panjang, dan dagongan. Prestasi olahraga POPDA ke-13, PORPEMDA ke-9 dan PORSENITAS ke-1 dan jumlah cabor yang masuk dalam program pembibitan olahraga prestasi 18 cabor.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.57 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,30%	0,01%
2.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,33%	4,124%
3.	Peningkatan prestasi olahraga	n/a	n/a
4.	Persentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi disatuan pendidikan	43,06%	n/a

2.1.4.121 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang menggambarkan pemajuan kebudayaan adalah persentase seni dan budaya yang dilestarikan.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa indikator pada bidang kebudayaan di Kabupaten Cirebon yaitu Terlestarikannya Cagar Budaya dan Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya, dimana tingkat capaiannya disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kebudayaan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.58 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	12,83%	100%
2.	Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	-	-

2.1.4.122 Statistik dan Persandian

Di Kabupaten Cirebon terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon mempublikasikan

buku Kabupaten Cirebon Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Cirebon sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

Tabel 2.59 Jumlah Publikasi yang Diterbitkan BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

Publikasi	2016	2017	2018	2019	2020
Buku Kabupaten Cirebon dalam Angka	1	1	1	n.a	n.a
Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1	1	1	n.a	n.a

Sumber: Statistik Kabupaten Cirebon Tahun 2019, BPS yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Statistik dan Persandian dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.60 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Statistik dan Persandian Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100%
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	9,09%	100%
3.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	5%

2.1.4.1.23 Perpustakaan

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki perangkat daerah khusus yang menangani urusan perpustakaan, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perpustakaan daerah merupakan salah satu program kegiatan dari perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyebarluasan data dan informasi sekaligus sosialisasi untuk lebih mengetahui berbagai capaian pembangunan di Kabupaten Cirebon. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kabupaten Cirebon memiliki perpustakaan daerah dengan ketersediaan buku dan jumlah pengunjung seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.23

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: Disarsipus Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 45,89% dan tahun 2020 turun menjadi 9,93%. Untuk koleksi buku juga demikian, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 60,31% dan tahun 2019 turun menjadi 20,06%. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali menjadi 25,06%.

Lebih lengkap nya berikut disajikan Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018.

Tabel 2.61 Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.23	Perpustakaan						
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	45,89	31,08	31,00	35,98	9,93
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	60,31	57,95	50,09	20,061	25,061
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,036	0,039	0,041	0,898	0,90
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan tahun	pengunjung	27.566	27.572	24.092	37,239	7,492
5.	Jumlah koleksi judul buku	buku	27.631	28.299	28.603	31,115	31,380

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	perpustakaan						
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	3	3	3	11	10

Sumber: Disarsipus Kab.Cirebon, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perpustakaan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.62 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

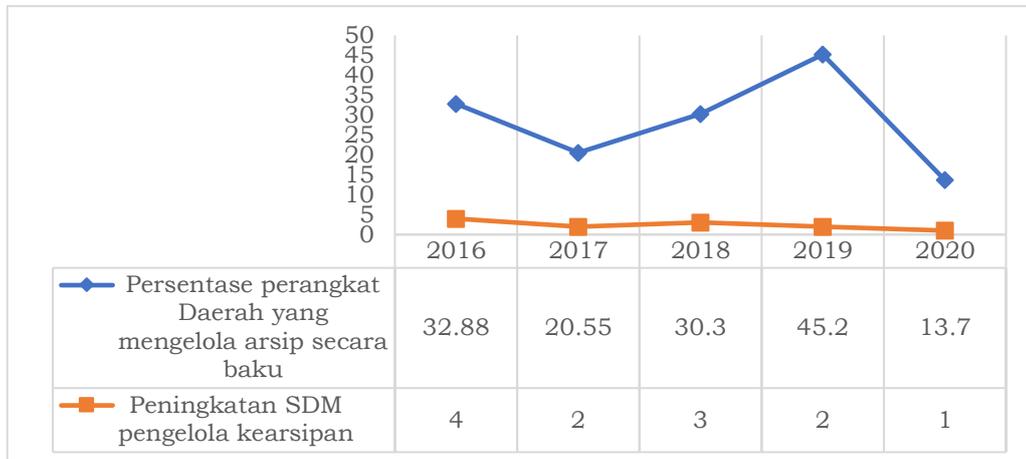
NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Nilai Budaya Baca	57 (Cukup)	50-75 (Cukup)
2.	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang di kelola dan dilestarikan	100,00%	100,00%
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	54,00%	1,393

2.1.4.124 Kearsipan

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, urusan kearsipan memiliki posisi penting guna menyusun setiap database pembangunan, baik berupa dokumen, bukti fisik, hingga dalam bentuk softcopy untuk menjadi bahan rujukan berbagai implementasi pembangunan.

Gambar 2. 24

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: Disarsipus Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami fluktuasi, yang semula sebanyak 32,88% di tahun 2016 menjadi 13,70% pada tahun 2020. Begitu pula dengan Jumlah peningkatan SDM pengelolaan kearsipan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 4 kegiatan dan pada tahun 2020 hanya sebanyak 1 kegiatan.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kearsipan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.63 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU 43/2009)	38,34%	41,125%
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	36,31%	50%

2.1.4.2 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan pilihan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

2.1.4.2.1 Kelautan dan Perikanan

Perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Cirebon. Bahkan beberapa kecamatan yang memiliki daerah perairan menjadikan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Adapun jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.64 Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Nelayan

No.	Kecamatan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan Utama	Jumlah
1.	Waled	0	0	0
2.	Pasaleman	0	0	0
3.	Ciledug	0	0	0
4.	Pabuaran	0	0	0
5.	Losari	1.200	0	1.200
6.	Pabedilan	0	0	0
7.	Babakan	0	0	0
8.	Gebang	6.025	800	6.825
9.	Karangsembung	0	0	0
10.	Karangwareng	0	0	0
11.	Lemahabang	0	0	0
12.	Susukan Lebak	0	0	0
13.	Sedong	0	0	0
14.	Astanajapura	0	54	54
15.	Pangenan	1.253	0	1.253
16.	Mundu	851	1.670	2.521
17.	Beber	0	0	0
18.	Greged	0	0	0
19.	Talun	0	0	0
20.	Sumber	0	0	0
21.	Dukupuntang	0	0	0
22.	Palimanan	0	0	0
23.	Plumbon	0	0	0
24.	Depok	0	0	0
25.	Weru	0	0	0
26.	Plered	0	0	0
27.	Tengahatani	0	0	0
28.	Kedawung	0	0	0

No.	Kecamatan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan Utama	Jumlah
29.	Gunungjati	3.700	0	3.700
30.	Kapetakan	1.178	0	1.178
31.	Suranenggala	1.113	121	1.234
32.	Klangenan	0	0	0
33.	Jamblang	0	0	0
34.	Arjawinangun	0	0	0
35.	Panguragan	0	0	0
36.	Ciwaringin	0	0	0
37.	Gempol	0	0	0
38.	Susukan	0	0	0
39.	Gegesik	0	0	0
40.	Kaliwedi	0	0	0
Kab. Cirebon		15.320	2.645	17.965

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon yang dikelola dalam SIPD.

Selanjutnya, berikut disajikan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2018.

Tabel 2.65 Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2021

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tercapainya hasil perikanan tangkap (Ton)	Ton	29.214,10	31.212,67	33.645,65	36.056,91	34.134,34
2.	Tercapainya hasil perikanan budidaya (Ton)	Ton	42.622,99	45.050,32	45.607,19	48.410,22	41.157,93
3.	Terpenuhinya kebutuhan benih ikan air tawar berkualitas (Juta Ekor)	Juta Ekor	113,12	121,91	101,42	112,61	290,29
4.	Hasil garam rakyat (Ton)	Ton	1.160	63.363	404.512	136.179	2.671
5.	Hasil Olahan dan pemasaran perikanan (Ton)	Ton	6.862,00	5.353	10.447,00	10.790,84	12.564,59
6.	Peningkatan konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun (Kg/kapita)	Kg/Kapita	26,55	27	25,75	26,89	27,88

Sumber: Dislakan Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hasil produksi perikanan tangkap (ton) besarnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 produksinya mencapai 29.214,10 ton dan pada tahun 2020 produksinya mencapai 34.134,34 ton;
- 2) Hasil budidaya perikanan juga produksinya fluktuatif pada tahun 2016 mencapai 42.622,99 ton dan pada tahun 2020 produksinya mencapai 41.157,93 ton

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.66 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten	n/a	n/a
2.	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	35,00%	n/a

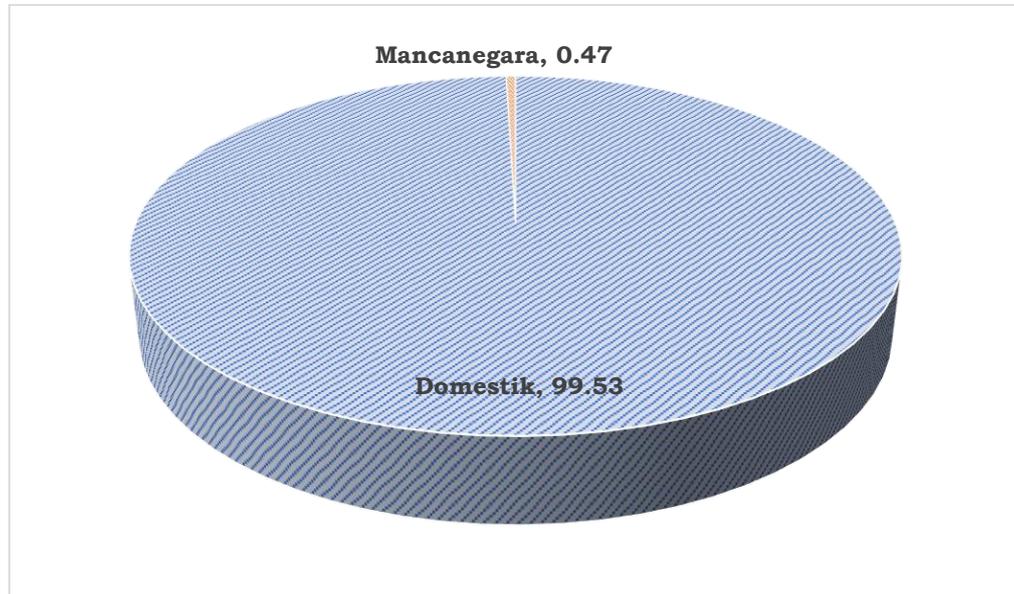
2.1.4.2.2 Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya).

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon, Jumlah persentase wisatawan Domestik jauh lebih besar dari wisatawan Mancanegara seperti dalam gambar berikut.

Gambar 2.25

Persentase Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Cirebon, 2020



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Jumlah Wisatawan Asing yang berkunjung ke Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dan menurun tajam di tahun 2020, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 3.759 wisatawan dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 63.414 wisatawan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.357 wisatawan.

Sama halnya dengan Jumlah Wisatawan Asing, kondisi Jumlah Wisatawan Domestik juga mengalami hal serupa, dimana pada tahun 2020 jumlahnya turun menjadi 511.497 wisatawan atau turun dibanding kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 1.481.048 wisatawan.

Penurunan Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi covid 19 yang sedang melanda dunia dan indonesia pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan terbitnya beberapa kebijakan seperti PSBB dan penutupan beberapa obyek wisata di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.67 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

Jenis Wisatawan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wisatawan Asing	3.759	11.910	63.414	5.193	2.357
Jumlah Wisatawan Domestik	635.377	701.681	1.379.655	1.481.048	511.497
Jumlah	639.136	713.591	1.443.069	1.486.241	513.854

Sumber: Kab. Cirebon dalam Angka, 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Fluktuasinya Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik tidak berimbang kepada Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, dimana pada tahun 2016-2019 jumlahnya masih sama yaitu 39 buah.

Tabel 2.68 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2016-2019

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1.	Waled	0	0	0	0
2.	Pasaleman	0	0	0	0
3.	Ciledug	0	0	0	0
4.	Pabuaran	0	0	0	0
5.	Losari	7	7	7	7
6.	Pabedilan	0	0	0	0
7.	Babakan	1	1	1	1
8.	Gebang	1	1	1	1
9.	Karangsembung	0	0	0	0
10.	Karangwareng	0	0	0	0
11.	Lemahabang	0	0	0	0
12.	Susukan Lebak	0	0	0	0
13.	Sedong	0	0	0	0
14.	Astanajapura	0	0	0	0
15.	Pangenan	0	0	0	0
16.	Mundu	0	0	0	0
17.	Beber	9	9	9	9
18.	Greged	0	0	0	0
19.	Talun	1	1	1	1
20.	Sumber	5	5	5	5
21.	Dukupuntang	9	9	9	9
22.	Palimanan	0	0	0	0
23.	Plumbon	0	0	0	0
24.	Depok	0	0	0	0
25.	Weru	0	0	0	0
26.	Plered	0	0	0	0
27.	Tengahtani	0	0	0	0
28.	Kedawung	5	5	5	5
29.	Gunungjati	1	1	1	1
30.	Kapetakan	0	0	0	0
31.	Suranenggala	0	0	0	0
32.	Klangenan	0	0	0	0
33.	Jamblang	0	0	0	0
34.	Arjawinangun	0	0	0	0
35.	Panguragan	0	0	0	0
36.	Ciwaringin	0	0	0	0
37.	Gempol	0	0	0	0
38.	Susukan	0	0	0	0
39.	Gegesik	0	0	0	0

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
40.	Kaliwedi	0	0	0	0
Kab. Cirebon		39	39	39	39

Sumber: Kab. Cirebon dalam Angka, BPS, 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Kabupaten Cirebon terdapat 16 usaha akomodasi yaitu 3 hotel berbintang dan 13 hotel non bintang dengan 433 kamar dan 646 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 170 kamar atau 39,26 persen tersedia di hotel berbintang, sedangkan sekitar 263 kamar terdapat pada hotel non bintang/melati.

Adapun tempat-tempat objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Cirebon berupa wisata religi dan cagar budaya, wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja batik, dan wisata kearifan lokal.

a. Wisata Ziarah

Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya sesuai dengan kesepakatan bersama antara gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/BAPP tentang Prioritas Pembangunan Ekonomi WKPP di Jawa Barat. Lokasi wisata ziarah yang berada di Kabupaten Cirebon adalah:

1) Wisata Ziarah Makam Sunan Gunung Jati.

Obyek wisata ini berada di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati tidak hanya menjadi obyek wisata, tetapi obyek ini juga sudah ditetapkan menjadi cagar budaya yang harus dilindungi. Obyek wisata ini tidak hanya menjadi aset Kabupaten Cirebon tetapi juga aset Propinsi Jawa Barat. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal, regional Jawa dan seluruh Indonesia.

2) Wisata Ziarah Kramat Talun.

Obyek wisata ini merupakan tempat peristirahatan sesepuh Cirebon, Mbah Kuwu Cirebon Girang. Obyek wisata ini berada di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun. Obyek wisata ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal, dan regional Jawa.

3) Wisata Ziarah Makam Syech Magelung Sakti.

Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan regional Jawa Barat.

4) Wisata ziarah makam Nyi Mas Gandasari.

Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan regional Jawa Barat.

b. Wisata Alam

Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata alam. Lokasi wisata alam adalah:

1) Wisata alam Gronggong dan Ciperna.

Gronggong memiliki ketinggian sekitar 50 meter dpl dengan suasana alam yang menarik. Pada ketinggian ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan

suasana kota Cirebon dan pesisir Cirebon. Obyek wisata ini berada di jalur Cirebon-Kuningan. Secara administratif berada di Desa Patapan Kecamatan Beber. Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung obyek wisata ini adalah hotel, losmen, restoran, rumah makan, pusat kesegaran jasmani, padang golf, dan areal leshan alam terbuka.

2) Wisata alam Setu Patok.

Obyek wisata ini berada di Desa Setu Patok Kecamatan Mundu. Wisata alam ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal pemancingan, pemandian, dan outbond.

3) Wisata alam Plangon.

Obyek wisata ini berada di Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber. Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa monyet dan petilasan Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.

4) Wisata Alam Belawa.

Obyek wisata ini berada di Desa Belawa Kecamatan Sedong. Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa unik berupa labi-labi. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.

5) Wisata Banyu Panas.

Obyek wisata ini berada di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol berupa wisata pemandian air panas yang kaya akan kandungan belerang. Obyek wisata Banyu Panas ini merupakan daya tarik yang berkembang seiring pengembangan sarana prasarana wisata di lokasi dan promosi wisata yang memadai.

c. Wisata Kuliner

Kabupaten Cirebon memiliki wisata kuliner berbagai macam makanan khas. Jenis wisata kuliner di Kabupaten Cirebon adalah:

1) Wisata kuliner ikan bakar.

Obyek wisata ini berada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang.

2) Wisata kuliner nasi Jamblang/Sega Jamblang.

Obyek wisata ini berada tersebar di Kecamatan Jamblang, Plered, Kedawung, dan Sumber.

3) Wisata kuliner Empal Gentong.

Obyek wisata ini berada tersebar di 40 kecamatan.

d. Wisata Belanja Batik

Kabupaten Cirebon mempunyai wisata belanja batik. Lokasinya berada di Desa Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah Kecamatan Plered.

e. Wisata Kearifan Lokal

Kabupaten Cirebon memiliki wisata kearifan lokal berupa perayaan tradisional atau pesta rakyat. Wisata jenis ini dilaksanakan berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat. Obyek wisata kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cirebon adalah:

1) Wisata Kearifan Lokal Nadran.

Obyek wisata ini dilaksanakan di wilayah pesisir Cirebon.

2) Wisata Kearifan Lokal Mauludan.

Obyek wisata ini berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Obyek wisata ini berada di Kecamatan Gegesik, Kecamatan Gunungjati, dan Kecamatan Plered.

3) Wisata Kearifan Lokal Mapag Sri.

Obyek wisata ini berkaitan dengan tradisi masyarakat untuk menyambut datangnya panen raya.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pariwisata dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.69 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-28,98%	-54,612%
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	7,19%	-65,937%
3.	Tingkat Hunian akomodasi	30,59%	19,652%
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2019	3,16%	n/a
5.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	4,29%	n/a

2.1.4.2.3 Pertanian, Peternakan dan Kehutanan

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima yang berperan penting yaitu: berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja dipedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon tahun 2020 memiliki total luas lahan pertanian basah dan pertanian kering mencapai 68.677 Ha, Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan oleh gubernur. Pada tahun 2020 total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 709.105 Ton. Adapun hasil produksi tanaman pangan lain termasuk Padi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70 Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2020

Kecamatan	Produksi (Ton)							
	Padi	Jagung Manis	Jagung Pipilan	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Waled	15.908	1.528	0	1	4	0	0	115
Pasaleman	1.137	640	76	28	11	12	0	86
Ciledug	7.068	5.250	0	0	0	0	0	0
Pabuaran	5.896	3.143	0	0	0	0	0	0
Losari	11.942	870	0	0	0	3	0	0
Pabedilan	13.170	11.884	0	0	0	0	0	0
Babakan	13.225	19.620	63	0	0	0	0	0
Gebang	12.756	21.543	0	0	0	0	0	0
Karangsembung	10.489	447	0	0	0	0	0	0
Karangwareng	13.184	695	0	0	0	0	0	0
Lemahabang	7.073	365	153	0	0	13	45	0
Susukan Lebak	16.516	157	63	0	3	4	224	0
Sedong	21.389	0	25	0	0	8	258	128
Astanajapura	10.503	0	0	0	0	24	0	0
Panganan	9.300	2.153	0	0	0	0	0	0
Mundu	13.691	0	0	0	0	0	0	0
Beber	13.055	0	20	0	0	7	6.323	273
Greged	12.695	0	0	0	0	30	183	0
Talun	9.734	0	38	0	5	6	245	170
Sumber	12.974	10	0	0	0	0	25	42
Dikupuntang	26.436	0	768	0	0	0	0	0
Palimanan	19.078	0	0	0	275	0	0	0
Plumbon	12.141	0	13	0	5	0	24	0
Depok	11.387	0	6	0	0	0	0	0
Weru	3.428	0	83	0	10	0	0	0
Plered	10.063	0	17	0	0	0	0	0
Tengahtani	6.984	0	45	0	0	0	0	0
Kedawung	1.737	0	0	0	0	0	0	0
Gunungjati	11.584	0	0	0	0	0	0	0
Kapetakan	48.128	0	0	0	0	0	0	0
Suranenggala	21.800	0	0	0	0	0	0	0
Klangenan	23.940	0	0	0	0	0	0	0
Jamblang	18.920	0	0	0	0	0	0	0
Arjawinangun	22.393	0	0	0	18	0	0	0
Panguragan	26.925	0	0	0	0	0	0	0

Kecamatan	Produksi (Ton)							
	Padi	Jagung Manis	Jagung Pipilan	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Ciwaringin	18.387	0	0	0	637	0	0	0
Gempol	15.376	0	6	54	514	0	0	0
Susukan	59.257	0	19	0	604	0	0	0
Gegesik	83.776	0	13	0	0	0	6.323	115
Kaliwedi	35.660	0	0	0	0	0	183	86
Cirebon	709.105	68.305	1.408	83	2.086	107	7.412	1.026

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Selain padi, tanah di Kabupaten Cirebon dapat juga ditanami berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan antara lain: bawang merah, cabai rawit, petai, tomat, bawang daun, melon, semangka, alpukat, salak, rambutan dan berbagai macam sayur dan buah-buahan lain. Diantara berbagai tanaman sayuran tersebut, Bawang merah merupakan tanaman sayuran yang memiliki hasil panen terbesar di Kabupaten Cirebon di mana pada tahun 2020 produksi mencapai 34.636 Ton. Adapun Hasil produksi buah dan sayur di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut::

Tabel 2.71 Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kabupaten Cirebon Tahun 2020 (Ton/Tahun)

Kecamatan	Bawang Merah	Cabai Besar	Terung	Ketimun	Kacang Panjang	Kangkung	Jamur (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Waled	4.270	2.900	562	9	27	39	0
Pasaleman	0	276	0	0	9	0	0
Ciledug	1.169	121	16	42	42	0	0
Pabuaran	947	0	0	0	0	0	0
Losari	5.786	1.624	203	0	0	50	0
Pabedilan	12.190	110	99	52	0	0	0
Babakan	3.838	0	40	0	0	0	0
Gebang	4.436	0	26	0	0	0	0
Karangsembung	0	0	0	51	42	10	0
Karangwareng	11	0	24	20	51	0	0
Lemahabang	493	45	0	0	26	7	0
Susukan Lebak	18	8	0	0	0	0	0
Sedong	0	0	0	0	0	0	0
Astanajapura	0	0	0	0	0	0	0
Pangenan	1.420	98	0	0	0	0	0
Mundu	40	0	0	0	0	0	0
Beber	0	0	0	0	0	0	0
Greged	0	8	0	0	0	0	0
Talun	0	0	0	0	0	0	0
Sumber	0	0	0	12	0	0	0
Dikupuntang	0	0	0	12	0	0	0
Palimanan	0	14	0	0	0	0	0
Plumbon	18	0	0	0	0	0	0

Kecamatan	Bawang Merah	Cabai Besar	Terung	Ketimun	Kacang Panjang	Kangkung	Jamur (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Depok	0	0	0	24	0	0	0
Weru	0	0	0	0	0	0	0
Plered	0	0	0	50	0	0	0
Tengahtani	0	0	0	23	0	0	0
Kedawung	0	0	0	0	0	0	0
Gunungjati	0	0	0	0	0	0	0
Kapetakan	0	0	0	0	0	0	0
Suranenggala	0	0	0	0	0	0	0
Klangenan	0	33	12	0	30	0	0
Jamblang	0	0	0	0	0	0	0
Arjawinangun	0	143	0	0	0	0	0
Panguragan	0	0	0	0	0	0	0
Ciwaringin	0	0	0	0	0	0	0
Gempol	0	150	0	0	0	0	0
Susukan	0	530	0	0	0	0	0
Gegesik	0	99	57	56	0	0	0
Kaliwedi	0	0	32	43	4	0	0
Cirebon	34.636	6.159	1.071	394	271	106	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.72 Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Cirebon (Kw), 2020

No.	Kecamatan	Total Produksi (Kw)
1.	Jengkol	0
2.	Petai	7.235
3.	Melinjo	11.599
4.	Sukun	2.763
5.	Sirsak	1.128
6.	Sawo	2.975
7.	Salak	543
8.	Rambutan	3.255
9.	Pisang	130.529
10.	Pepaya	79.129
11.	Nangka	15.137
12.	Mangga	536.248
13.	Jeruk Besar	0
14.	Jeruk Siam	324
15.	Jambu Air	7.533
16.	Jambu Biji	29.062
17.	Durian	2.421
18.	Duku	0
19.	Belimbing	1.494
20.	Alpukat	1.625

No.	Kecamatan	Total Produksi (Kw)
21.	Melon	0
22.	Semangka	18.766

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Cirebon, antara lain meliputi ternak sapi, kerbau, kambing, Kambing, Domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Dari beberapa jenis ternak di Kabupaten Cirebon tersebut telah menghasilkan Daging, telur dan susu sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.73 Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Cirebon, 2019 dan 2020

Jenis Ternak	Daging (Ton)		Telur (Ton)		Susu (Liter)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Sapi Potong/ <i>Beef Cattle</i>	3.715	4.371	-	-	-	-
Sapi Perah/ <i>Dairy Cattle</i>	-	-	-	-	412.118,6	398.535,5
Kerbau/ <i>Buffalo</i>	10,39	6,8	-	-	-	-
Kuda/ <i>Horse</i>	-	-	-	-	-	-
Kambing/ <i>Goat</i>	40,30	78,31	-	-	-	-
Domba/ <i>Sheep</i>	3.717,16	1.661,71	-	-	-	-
Ayam Buras/ <i>Native Chicken</i>	1.387,62	1.388,82	2.898,09	2.900,61	-	-
Kelinci/ <i>Rabbit</i>	4,36	3,85	-	-	-	-
Ayam Ras Petelur/ <i>Laying hens</i>	57,84	62,91	710,25	772,56	-	-
Ayam Ras Pedaging/ <i>Broilers</i>	20.907,69	24.436,75	-	-	-	-
Itik/Itik Manila/ <i>Duck</i>	589,96	596,62	4.957,89	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu berdasarkan data yang tersedia diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mengalami kenaikan dari 2016-2020 sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.74 Realisasi Kinerja Urusan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator Daerah	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.1.	Pertanian						
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	-	696,63	11,27	11,27	n.a	n.a
2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	5,40	45,3	45,3	n.a	n.a
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman beras) terhadap PDRB	%	11,62	12,19	12,19	n.a	n.a
4.	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100
5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kg/ha	65,79	54,38	63,80	64,0 3	64,1 9
6.	Cakupan bina kelompok tani	%	16,37	38,08	16,32	23,9 3	42,3 6

Sumber: Distan Kab.Cirebon, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.75 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

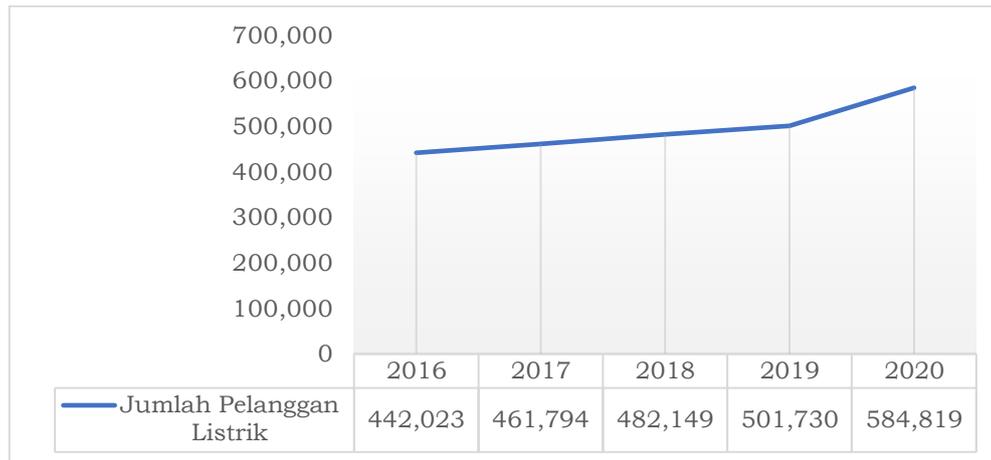
NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Produktivitas Pertanian per hektar	64,03	64,19
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	15,45	15,90
3.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (hewan ke manusia)	-58,17%	-3,261

2.1.4.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 442.023 pelanggan, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 584.819 pelanggan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.26

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.76 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100,00%	0,00%

2.1.4.2.5 Perindustrian dan Perdagangan

Pada urusan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 mencapai 21,42% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 20,45%. Selanjutnya pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi 20,60%. Pertumbuhan industri juga sama mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016

mencapai 3,19% dan posisi terakhir hanya 1,15% pada tahun 2020. Sedangkan Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 92,95% menjadi 110,21% pada tahun 2018.

Untuk urusan perdagangan, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dari 4,7% menjadi 6,1%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,88%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan dari 2016-2020 yaitu dari 16,3% di tahun 2016 menjadi 14,5% di tahun 2020. Ekspor bersih pedagang mengalami kenaikan dari 2016-2020 dari Rp. 11.476.669 Juta menjadi Rp. 16.503.417 Juta.

Tabel 2.77 Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.3	Perindustrian						
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	21.42	21.24	20.96	20.45	20.60
2.	Pertumbuhan Industri	%	3.19	1.67	1.68	2.19	1.15
3.	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	%	92,95	101,61	110,21	n.a	n.a
2.4	Perdagangan						
1.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	4,7	1,7	6,1	5,47	5.88
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	16,3	15,8	15,8	15,4	14,5
3.	Ekspor bersih pedagang	Rp (Juta)	11.476.669	12,970386	14.472.046	15.930.746	16.503.417

Sumber: Disperdagin Kab.Cirebon, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.78 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Pertambahan jumlah industri besar di Kabupaten	5,92%	1,151%
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	n/a	n/a
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	100,00%	78,57%
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	100,00%	0%
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	100,00%	100%
6.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	15,44%	n/a
7.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	80,62%	100%
8.	Persentase Kinerja realisasi pupuk	0,06%	45,175%
9.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	72,77%	52,82%

2.1.4.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.3.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk urusan perencanaan, seluruh indikator menunjukkan tingkat capaian yang 100%. Hal ini tercermin dari indikator capaian yang tiap tahun selama periode 2016-2020 mencapai 100% dari target, seperti indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd, Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD; dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Tabel 2.79 Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.1	Perencanaan						
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA;	buah	1	1	1	1	1
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA;	buah	1	1	1	1	1
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA;	buah	1	1	1	1	1
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA;	buah	1	1	1	1	1
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd;	program	212	212	212	-	-
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD; dan	program	212	212	212	-	-
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kab.Cirebon, Tahun 2021 yang dikelola dalam SIPD.

2.14.3.2 Keuangan

Dalam hal urusan Keuangan, Kabupaten Cirebon dari tahun 2016-2020 mendapatkan predikat WTP lima kali berturut-turut. Selain itu persentase SILPA terhadap APBD dari tahun 2016-2018 tergolong cukup kecil karena berada di bawah 10%. Persentase belanja untuk urusan pendidikan juga masih cukup besar di atas 30% dari tahun 2016-2018. Kemudian, prosentase belanja kesehatan juga masih diatas 10% dari tahun 2016-2018. Untuk perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung proporsinya masih baik artinya belanja untuk publik masih lebih besar daripada belanja pegawai. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 0,49% menjadi 0,55% tahun 2018. Untuk penetapan APBD, dari tahun 2016-2018 selalu ditetapkan secara tepat waktu.

Tabel 2.80 Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.2	Keuangan						
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA	%	10,26%	7,53%	7,61%	n.a	n.a
3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10,26%	7,53%	7,61%	n.a	n.a
4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,50%	0,50%	0,50%	n.a	n.a
5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	36%	35%	32%	n.a	n.a
6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	11%	17%	19%	n.a	n.a
7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	72%	82%	72%	n.a	n.a
8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,49%	0,51%	0,55%	n.a	n.a
9.	Penetapan APBD	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	n.a	n.a

Sumber: BKAD Kab.Cirebon, Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD.

2.1.4.3.3 Pengawasan

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam urusan pengawasan Inspektorat, prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat cenderung mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun, dari 65% pada tahun 2016 menjadi 60% pada tahun 2018. Untuk prosentase penanganan kasus di Lingkungan Pemda (ASN) sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan juga demikian, dari 50% pada tahun 2016 menjadi 37% pada tahun 2018. Untuk penyelesaian temuan BPK mengalami penurunan dari tahun 2016 yang sebesar 100% menjadi 86% pada tahun 2018.

Tabel 2.81 Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.3	Pengawasan						
1.	Prosentase Tindak Lanjut	%	65	73	60	n.a	n.a

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Cirebon						
2.	Prosentase Penanganan Kasus di Lingkungan Pemda (ASN) sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan	%	50	100	37	n.a	n.a
3.	Prosentase Penyelesaian Temuan BPK	%	100	87	86	n.a	n.a

Sumber: Disarsipus Kab.Cirebon, Tahun 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.82 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2020

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1.	Sistem Informasi Manajemen Pemda		
2.	Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD	87,50%	
3.	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan tenaga kesehatan	19,96%	4,892%
4.	Rasio PAD	0,000013	0,126%
5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	43,03%	81,043%
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
7.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
8.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang di tanda tangani pada kuartal pertama	0,00%	0%
9.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	15,86%	7,077%
10.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30,87%	17,871%
11.	Persentase Pegawai Fungsional terhadap seluruh	19,47%	8,971%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
	jumlah pegawai Pemerintah Daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
12.	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	19,47%	8,97%
13.	Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	92,29%	
14.	Assets Management		
15.	Cash management : Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,15%	7,175%
16.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	99,85%	100%
17.	Akses Publik terhadap informasi keuangan Daerah (Public Acces to Fiscal Information)	100,00%	100%

2.15 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.15.1 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Pengeluaran Kabupaten Cirebon atas dasar harga Berlaku (ADHB) di tahun 2019 meningkat sebesar 8,19 %, yakni dari 45.462 miliar Rupiah menjadi 49.186 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010 (adhb 2010), maka peningkatan ini jauh lebih rendah, yakni dari 32.160 miliar Rupiah menjadi 33.724 miliar Rupiah, atau meningkat sebesar 4,86 %.

Pada periode tahun 2016 - 2019 PDRB Kabupaten Cirebon atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 38.840 miliar Rupiah (2016); 41.919 miliar Rupiah (2017); 45.461 miliar Rupiah (2018) dan 49.186 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Cirebon pada periode 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini berikut ini:

Tabel 2.83 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Cirebon 2016 - 2019

(Trilyun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018*	2019**
Konsumsi Rumah Tangga	34,91	37,38	40,68	44,17
Konsumsi LNPRT	0,70	0,75	0,90	0,97
Konsumsi Pemerintah	3,46	3,31	3,50	3,71
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	13,52	14,06	15,17	16,26
Perubahan Inventori	1,50	1,58	1,69	1,72
Net (Ekspor-Impor)	-15,25	-15,16	-16,48	-17,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	38,84	41,92	45,46	49,19

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2015-2019

2.1.5.2 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Cirebon pada periode 2016 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.84 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Cirebon, 2016 - 2019

(Trilyun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018*	2019**
Konsumsi Rumahtangga	25,41	26,30	27,48	28,81
Konsumsi LNPRT	0,55	0,57	0,65	0,68
Konsumsi Pemerintah	2,34	2,18	2,24	2,36
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9,96	10,20	10,68	11,21
Perubahan Inventori	1,06	1,07	1,08	1,08
Net (Ekspor-Impor)	-10,17	-9,69	-9,97	-10,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29,15	30,62	32,16	33,72

*Angka Sementara

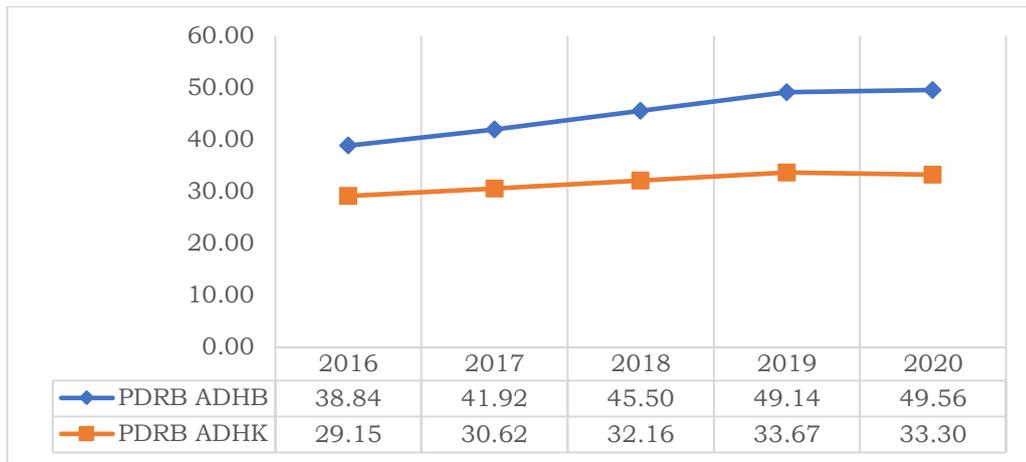
**Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2015-2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Cirebon meningkat, yakni sebesar 29.149 miliar Rupiah (2016); 30.623 miliar Rupiah (2017); 32.160 miliar Rupiah (2018) dan 33.723 miliar Rupiah (2019).

Gambar 2.27

Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cirebon 2016 – 2020



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2016-2021

Dari gambar diatas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

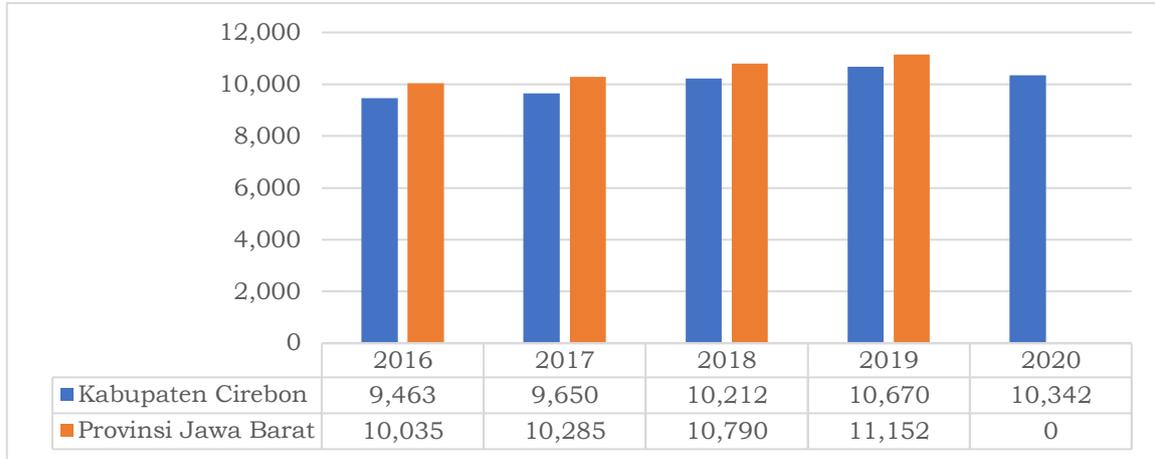
2.1.5.3 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita penduduk merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2019 mencapai 10.670, namun pada tahun 2020 angkanya turun menjadi 10.342.

Angka pengeluaran per kapita Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 masih berada di bawah pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai 11.152 Juta Rupiah pada tahun yang sama.

Gambar 2.28

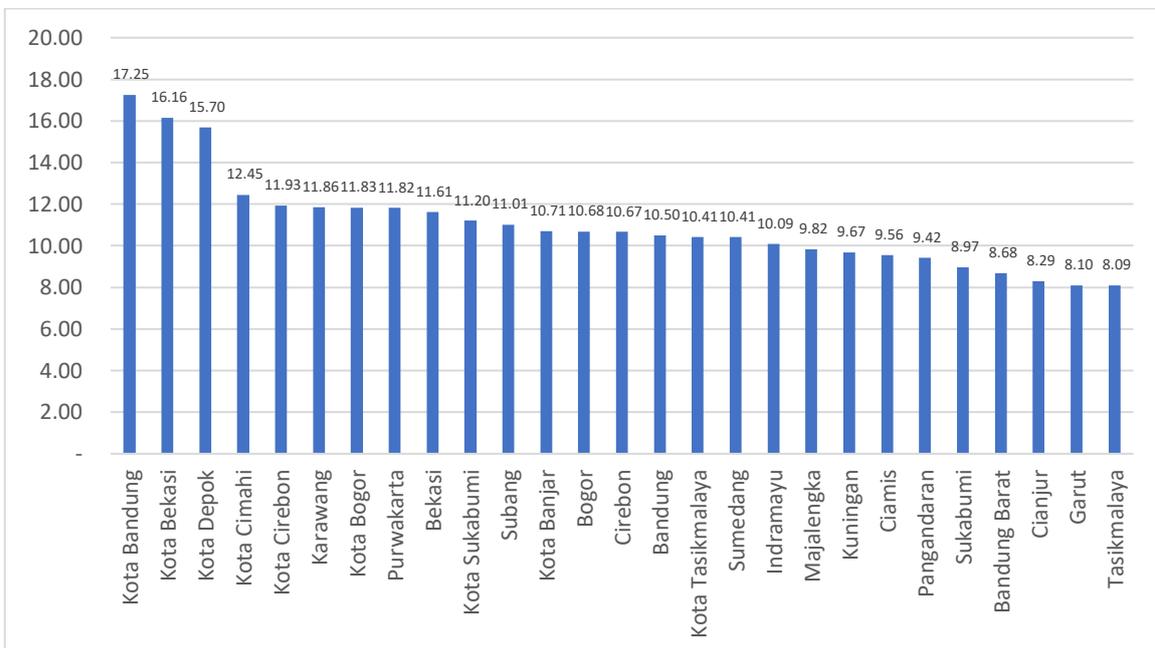
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020 dan 2021, BPS yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.29

Pengeluaran Per Kapita Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber: Indikator Strategis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD.

2.1.5.4 Sektor Basis dan Non Basis

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor.

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria. sektor basis. Pada analisis LQ ini yang dianalisis adalah pada jumlah produksi per sektor di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Jawa Barat, sehingga terlihat keunggulan komparatif masing-masing sektor di tingkat Jawa Barat.

Tabel 2.85 Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon

Kategori	Uraian	2016	2017	Rata-Rata	Ket
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,95	1,94	1,95	BASIS
B	Pertambangan dan Penggalian	0,68	0,69	0,69	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,48	0,48	0,48	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,34	0,42	0,38	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,02	1,03	1,03	BASIS
F	Konstruksi	1,49	1,45	1,47	BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,02	1,02	1,02	BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	1,55	1,58	1,57	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,40	1,41	BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	0,79	0,78	0,79	NON BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	1,43	1,42	BASIS
L	Real Estate	1,93	1,94	1,94	BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	2,03	2,06	2,05	BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,44	1,45	1,45	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,87	1,89	1,88	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77	2,76	2,77	BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,84	1,84	1,84	BASIS

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Tahun 2016 – 2017 yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sektor Basis

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.
- c. Konstruksi.
- d. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

- e. Transportasi dan Pergudangan.
 - f. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
 - g. Jasa Keuangan dan Asuransi.
 - h. Real Estate.
 - i. Jasa Perusahaan.
 - j. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial.
 - k. Jasa Pendidikan.
 - l. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
 - m. Jasa Lainnya.
2. Sektor Non Basis
- a. Pertambangan dan Penggalian.
 - b. Industri Pengolahan.
 - c. Pengadaan Listrik dan Gas.
 - d. Informasi dan Komunikasi.

Tabel 2.86 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.	PDRB ADHB	Milyar Rp	38.840,78	41.919,30	45.449,28	49.135,81	49.561,30
2.	PDRB ADHK	Milyar Rp	29.149,31	30.623,31	32.161,84	33.668,10	33.304,50
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,63	5,06	5,02	4,68	-1,08
4.	PDRB per kapita:						
	- ADHB	Juta Rp	18.124.494	19.410.878	20.907.550	22.406.740	22.429.650
	- ADHK	Juta Rp	13.602.112	14.180.233	14.778.810	15.353.210	15.072.410
5.	Laju PDRB Per Kapita	Persen	4,80	4,25	4,22	3,89	-1,83
6.	Laju Inflasi	Persen	1,87	4,36	2,80	2,00	n.a
7.	Indeks Gini	Poin	0,356	0,355	0,364	0,343	0,338
8.	Persentase penduduk miskin	Persen	13,49	12,97	10,70	9,94	11,24
9.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	288,49	279,55	232,37	217,64	247,94
10.	Garis Kemiskinan	Rp	333.758	346.240	370.747	381.372	393.452
11.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	66,70	67,39	68,05	68,69	68,75
12.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,03	12,21	12,22	12,24	12,25
13.	Angka Rata-Rata lama sekolah	Tahun	6,41	6,61	6,62	6,71	6,92
14.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,43	71,49	71,66	71,82	71,99
15.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	58,45	58,21	n.a	65,38	63,79
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,21	9,61	10,56	10,28	11,52
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Fokus Layanan Urusan Wajib						
1.1	Pendidikan						
1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini						

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	APK PAUD	Persen	49,09	49,39	49,39	65,80	42,03
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA						
	APK SD/MI	Persen	120,79	120,90	120,90	116,52	104,64
	APK SMP/MTs	Persen	115,97	114,41	114,41	122,27	88,04
	APK SMA/K	Persen	96,64	100,65	112,45	95,86	82,30
1.1.3	Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA						
	APM SD/MI	Persen	106,5	106,52	106,52	103,32	95,84
	APM SMP/MTs	Persen	94,85	95,54	95,54	97,88	79,71
	APM SMA/K	Persen	85,40	75,92	86,40	66,95	59,30
1.1.4	Angka Putus Sekolah						
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	Persen	0,10	0,01	0,01	0,07	0,023
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Persen	0,35	0,29	0,29	0,20	0,20
	Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	Persen	0,29	0,56	0,38	0,35	0,09
	Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	Persen	0,06	0,02	0,27	0,17	0,19
1.1.5	Angka Kelulusan						
	Angka Lulusan SD/MI sederajat	Persen	96,5	95,8	95,8	97,47	98,96
	Angka Lulusan SMP sederajat	Persen	83,23	82,06	82,06	81,04	95,53
	Angka Lulusan SMA sederajat	Persen	83,61	74,42	83,70	68,22	64,05
	Angka Lulusan SMK sederajat	Persen	66,46	77,38	79,62	68,18	72,18
1.1.6	Angka Melanjutkan						
	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	110,41	109,35	109,35	110,66	82,99
	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	107,8	108,99	108,99	118,20	117,07
1.1.7	Fasilitas Pendidikan						
	Ruang Kelas Baik SD/MI	Persen	65,87	65,87	65,82	64,60	59,27
	Ruang Kelas Baik SMP/MTs	Persen	79,47	79,47	79,38	80,36	75,54
	Ruang Kelas Baik SMA/MA	Persen	74,31	79,24	86,29	83,36	82,23

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ruang Kelas Baik SMK	Persen	92,67	92,15	90,32	89,35	79,85
1.1.8	Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar						
	SD	Siswa/guru	20	20	21	20	21
	SMP	Siswa/guru	17	17	18	15	15
	SMA	Siswa/guru	16	15	15	14	14
	SMK	Siswa/guru	17	14	14	15	15
1.1.9	Rasio Murid/kelas rata-rata sekolah dasar						
	SD	Siswa	30	27	27	26	27
	SMP	Siswa	31	29	29	31	22
	SMA	Siswa	35	37	33	32	32
	SMK	Siswa	34	33	32	32	31
1.1.10	Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun	Persen	94,77	98,92	98,97	99,73	99,73
1.1.11	Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV						
	PAUD	Persen	89,66	94,05	94,05	96,86	97,06
	SD	Persen	95,05	96,46	96,46	97,73	97,63
	SMP	Persen	99,07	98,78	98,89	98,80	98,93
	SMA	Persen	96,57	97,00	97,25	97,13	97,10
	SMK	Persen	89,66	94,05	94,05	96,86	97,06
1.2	Kesehatan						
1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	4,28	3,99	2,97	2,62	2,82

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	1,94	0,75	3,18	2,8	2,9
1.2.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	90	18	73,26	70,23	84,16
1.2.4	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 balita	15,77	15,86	13,50	15,3	14,4
1.2.5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,080	0,079	0,09	0,084	0,097
1.2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,005	0,005	0,005	0,004	0,01
1.2.7	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,224	0,259	0,261	0,151	0,151
1.2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,224	0,259	0,261	0,151	0,151
1.2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	119,71	121,04	139,8	135,0	158,6
1.2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	92,17	93,61	101	95,5	98,6
1.2.11	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	87,26	72,17	83,49	87,03	87,03
1.2.12	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100
1.2.13	Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	98,09	93,40	97,12	97,12	88,27
1.2.14	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	2,70	2,22	3,6	3,6	0,36
1.2.15	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	61,59	67,47	108,7	90	92

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	14,22	15,35	100	106	65
1.2.17	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	2,24	2,95	1,6	4,75	4,74
1.2.18	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	14,22	15,35	100	106	65
1.2.19	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	75,68	49,76	82	84	83
1.2.20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	93,50	75,18	91,60	90,16	86,82
1.2.21	Penderita diare yang ditangani	Persen	159,80	138,86	75,46	66,7	52,1
1.2.22	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,50	0,40	0,01	0,23	0,99
1.2.23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,01	0,01	0,01	0,42	0,43
1.2.24	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,37	103,03	102,04	100	101,91
1.2.25	Cakupan puskesmas	Persen	142,5	142,5	150	150	150
1.2.26	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
1.2.27	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	92,22	94,92	100,41	96,8	98,2
1.2.28	Cakupan pelayanan nifas	Persen	91,48	93,79	47,04	95,5	99
1.2.29	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	86,33	106,28	40,17	112,7	100,89
1.2.30	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	93,89	97,20	49,25	100,8	87,19
1.2.31	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	92,04	74,18	95,99	93,75	80,35
1.2.32	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidermiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	Panjang Jalan Kabupaten						
-	Kondisi Baik	Km	471,72	496,127	568,51	679,68	694,22
-	Kondisi Sedang	Km	474,15	482,811	441,12	337,62	339,19
-	Kondisi Rusak Ringan	Km	197,15	163,6	152,37	121,73	137,51
-	Kondisi Rusak Berat	Km	97,28	97,766	78,30	101,28	69,40
1.3.2	Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik	Persen	26,21	40,00	45,84	54,80	55,97
1.3.3	Persentase jalan drainase/saluran pembuangan air	Persen	1,31	2,20	3,03	3,55	3,77
1.3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	62,88	62,2	62,22	71,08	72,54
1.3.5	Rasio jaringan irigasi	Persen	16,84	16,84	16,84	17,44	17,44
1.3.6	Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m)	Persen	0,05	0,43	0,66	0,85	0,87
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1.4.1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	94	96,16	96,5	n.a	n.a
1.4.2	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	-	33.125	n.a	n.a	n.a	n.a
1.4.3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih	Persen	4.89	n.a	n.a	n.a	n.a
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Cirebon	Persen	100	100	100	n.a	n.a
1.5.2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	n.a	n.a
1.5.3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	35	30	10,7	n.a	n.a
1.5.4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	28,50	74,87	n.a	n.a	n.a

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.5	Prosentase Penegakan Perda	Persen	83,89	79,24	86,43	n.a	n.a
1.6	Sosial						
1.6.1	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	48,96	67,06	28	n.a	n.a
1.6.2	Prosentase PMKS yang tertangani	Persen	48,96	67,06	139	n.a	n.a
1.6.3	Prosentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Persen	28,02	18,59	80	n.a	n.a
1.6.4	Prosentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	Persen	8,61	2,53	80	n.a	n.a
1.6.5	Prosentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100	229	80	n.a	n.a
1.6.6	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	n.a	n.a
1.6.7	Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Persen	100	100	100	n.a	n.a
1.7	Tenaga Kerja						
1.7.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1.7.2	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi	Persen	61,4	55,65	82	n.a	n.a
1.7.3	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kewirausahaan	Persen	80	81,63	78	n.a	n.a
1.7.4	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	45,84	49,08	n.a	n.a	n.a
1.7.5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	73,58	40,63	n.a	n.a	n.a
1.7.6	Kepesertaan Jamsostek	Persen	53,51	65,05	55	n.a	n.a
1.7.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	46,70	n.a	n.a	n.a	n.a

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.8	Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan	Persen	53,17	n.a	n.a	n.a	n.a
1.7.9	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	100	320	n.a	n.a	n.a
1.7.10	Prosentase transmigran swakarsa	Persen	0	0	0	n.a	n.a
1.7.11	Keselamatan dan Perlindungan	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.8.1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja Langsung APBD	Persen	n.a	n.a	n.a	0,27	0
1.8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Persen	n.a	n.a	n.a	0,01	0,006
1.8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak pidana perdagangan orang/manusia) per 100.000 Penduduk Perempuan	Persen	n.a	n.a	n.a	3,51	0,000655
1.8.4	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	n.a	n.a	n.a	100,00	n.a
1.8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	n.a	n.a	n.a	47,89	n.a
1.9	Pangan						
1.9.1	Skor PPH ketersediaan	Persen	84	83,4	84,5	71,17	69,95*)
1.9.2	Jumlah Desa Rawan Pangan yang diintervensi	Desa	5	5	6	7	n.a
1.9.3	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CCPD)	Persen	24	42	86	90,719	182
1.9.4	Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (CV)	koefisien	9,75	9,75	9,75	4	2,80
1.9.5	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan	buah	1	2	-	1	-
1.9.6	Skor PPH Konsumsi	Persen	80,7	83,3	89,2	89,9	91,50
1.9.7	Tingkat Keamanan Pangan	Persen	83	92	92	67	88
1.10	Pertanahan						
1.10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai	Persen	n.a	n.a	n.a	2,33	0

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
1.10.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	n.a	n.a	n.a	100,00	100
1.10.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	n.a	n.a	n.a	2,33	0
1.10.4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	n.a	n.a	n.a	100,00	0
1.10.5	Luas lahan bersertifikat (aset Pemkab)	Persen	n.a	n.a	n.a	29,96	
1.10.6	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	n.a	n.a	n.a	100,00	0
1.10.7	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	n.a	n.a	n.a	40,00	100
1.11	Lingkungan Hidup						
1.11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1.11.2	Terlaksananya Pengelolaan sampah	Persen	n.a	n.a	n.a	6,09	2,12
1.11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	n.a	n.a	n.a	100,00	59,06
1.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1.12.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	1,29	1,22	0,93	n.a	n.a
1.12.2	Rasio bayi berakta kelahiran	Persen	0,36	0,36	0,19	23,92	23,8
1.12.3	Jumlah pasangan berakta nikah	pasangan	1.038.345	1.023.159	1.040.827	n.a	1.054.030
1.12.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Buah	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
1.12.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
1.12.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	88,5	81	93	97,64	99,87

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	(KTP)						
1.12.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	36,2	78,98 %	80,51 %	85,36 %	83,86 %
1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.13.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	16,26	61,89	40	n.a	n.a
1.13.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	28	28	28	n.a	n.a
1.13.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	58	37	37	n.a	n.a
1.13.4	Persentase LSM aktif	Persen	100	100	100	n.a	n.a
1.13.5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	28	28	20	n.a	n.a
1.13.6	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	n.a	n.a
1.13.7	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	n.a	n.a
1.13.8	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	65	n.a	n.a
1.13.9	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	55	n.a	n.a
1.14	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1.14.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	n.a	1,23	1,19	1,19	0,94
1.14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR)	Persen	n.a	n.a	n.a	74,99	75,90
1.14.3	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen	n.a	n.a	n.a	25,01	13,30
1.11	Perhubungan						
1.11.1	Jumlah Terminal Type	Unit	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1.11.2	Jumlah Sub Terminal	Unit	5	3	3	n.a	n.a
1.11.3	Jumlah Rambu Lalin	Unit	273	390	171	n.a	n.a
1.11.4	Jumlah Traffic Light	Unit	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1.11.5	Jumlah Warning Light	Unit	2	6	6	n.a	n.a

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.6	Jumlah Lampu PJU	Unit	1.117	1.698	1.934	n.a	n.a
1.11.7	Panjang Pagar Pengaman	Unit	97	140	170	n.a	n.a
1.11.8	Shelter (Buah)	Buah	4	2	4	n.a	n.a
1.11.9	Jumlah Trayek Layanan	Unit	48	48	48	n.a	n.a
1.12	Komunikasi dan Informatika						
1.12.1	Cakupan Pengembangan dan Pmberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Persen	87,5	95	100	n.a	n.a
1.12.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	100	100	100	n.a	n.a
1.13	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1.13.1	Jumlah Koperasi Aktif	unit	721	749	754	756	784
1.13.2	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	Persen	3/3	3/5	3/6	3/8	3/9
	Jumlah LKM Aktif	Unit	3	5	6	8	9
	Jumlah non BPR	Unit	3	3	3	3	3
1.13.3	Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	19/3	19/5	19/6	19/8	19/9
1.13.4	Usaha Mikro dan Kecil	Unit (mikro)	20.348	20.348	31.054	31.054	31.054
		Unit (mikro-kecil)	25.118	25.118	35.824	35.824	35.824
		Persen	95,12	95,12	96,53	96,53	96,53
1.14	Penanaman Modal						
1.14.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)		533	538	542	373	237
1.14.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)		698,24	846,16	2.007,5	1.704,9	1.313,2
1.14.3	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	57,49	0,57	5	-0,19	-1,9
1.15	Kepemudaan dan Olahraga						
1.16	Statistik & Persandian						

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.1	Buku Kabupaten Cirebon dalam Angka	Buah	1	1	1	n.a	n.a
1.16.2	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Buah	1	1	1	n.a	n.a
1.17	Perpustakaan						
1.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	45,89	31,08	31,00	35,98	9,93
1.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	60,31	57,95	50,09	20,061	25,061
1.17.3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,036	0,039	0,041	0,898	0,90
1.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan tahun	pengunjung	27.566	27.572	24.092	37,239	7,492
1.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku	27.631	28.299	28.603	31,115	31,380
1.17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	3	3	3	11	10
1.18	Kearsipan						
1.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	32,88	20,55	30,3	45,20	13,70
1.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	4	2	3	2	1
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran	Trilyun rupiah	38,84	41,92	45,50	49,14	49,56
2.	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran	Trilyun rupiah	29,15	30,62	32,16	33,67	33,30
3.	Pengeluaran Per Kapita	Juta rupiah	9.463	9.650	10.212	10.670	10.342
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
2.1	Kelautan dan Perikanan						
2.1.1	Tercapainya hasil perikanan tangkap (Ton)	Ton	29.214,10	31.212,67	33.645,65	36.056,91	34.134,34
2.1.2	Tercapainya hasil perikanan budidaya (Ton)	Ton	42.622,99	45.050,32	45.607,19	48.410,22	41.157,93

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3	Terpenuhinya kebutuhan benih ikan air tawar berkualitas (Juta Ekor)	Juta Ekor	113,12	121,91	101,42	112,61	290,29
2.1.4	Hasil garam rakyat (Ton)	Ton	1.160	63.363	404.512	136.179	2.671
2.1.5	Hasil Olahan dan pemasaran perikanan (Ton)	Ton	6.862,00	5.353	10.447,00	10.790,84	12.564,59
2.1.6	Peningkatan konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun (Kg/kapita)	Kg/Kapita	26,55	27	25,75	26,89	27,88
2.2	Pariwisata						
2.2.1	Jumlah Wisatawan Asing	Orang	3.759	11.910	63.414	5.193	2.357
2.2.2	Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	635.377	701.681	1.379.655	1.481.048	511.497
2.3	Pertanian						
2.3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	696,63	11,27	11,27	n.a	n.a
2.3.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	5,40	45,3	45,3	n.a	n.a
2.3.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman beras) terhadap PDRB	Persen	11,62	12,19	12,19	n.a	n.a
2.3.4	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	100	100	100	100	100
2.3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kg/ha	65,79	54,38	63,80	64,03	64,19
2.3.6	Cakupan bina kelompok tani	Persen	16,37	38,08	16,32	23,93	42,36
2.4	Energi dan Sumberdaya Mineral						
2.4.1	Jumlah Pelanggan Listrik	Pelanggan	442.023	461.794	482.149	501.730	584.819
2.5	Perindustrian						
2.5.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	21.42	21.24	20.96	20.45	20.60
2.5.2	Pertumbuhan Industri	Persen	3.19	1.67	1.68	2.19	1.15
2.5.3	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	Persen	92,95	101,61	110,21	n.a	n.a
2.6	Perdagangan						

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	4,7	1,7	6,1	5,47	5.88
2.6.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,3	15,8	15,8	15,4	14,5
2.6.3	Ekspor bersih pedagang	Rp (Juta)	13.486.756	14.796.551,-	15.136.308,-	n.a	n.a
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
3.1	Perencanaan						
3.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA;	buah	1	1	1	1	1
3.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA;	buah	1	1	1	1	1
3.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;	buah	1	1	1	1	1
3.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA;	buah	1	1	1	1	1
3.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;	program	212	212	212	-	-
3.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan	program	212	212	212	-	-
3.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	Persen	100	100	100	100	100
3.2	Keuangan						
3.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2.2	Persentase SILPA	Persen	10,26%	7,53%	7,61%	n.a	n.a
3.2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	10,26%	7,53%	7,61%	n.a	n.a
3.2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0,50%	0,50%	0,50%	n.a	n.a
3.2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	36%	35%	32%	n.a	n.a
3.2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	11%	17%	19%	n.a	n.a

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	72%	82%	72%	n.a	n.a
3.2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0,49%	0,51%	0,55%	n.a	n.a
3.2.9	Penetapan APBD	Persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	n.a	n.a
3.3	Pengawasan						
3.3.1	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Cirebon	Persen	65	73	60	n.a	n.a
3.3.2	Prosentase Penanganan Kasus di Lingkungan Pemda (ASN) sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan	Persen	50	100	37	n.a	n.a
3.3.3	Prosentase Penyelesaian Temuan BPK	Persen	100	87	86	n.a	n.a

2.1.6 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dengan Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam SPM adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dengan mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2017-2018 ini terdiri dari pencapaian SPM Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, Urusan Ketenteraman dan Ketertiban dan Urusan Sosial.

2.1.6.1 SPM Bidang Urusan Pendidikan

Penerapan SPM Bidang Pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan target tersebut diatas perlu adanya pengukuran kinerja pelayanan yang biasa disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil yang harus dicapai dalam penerapan SPM Pendidikan Dasar. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran kinerja ini adalah untuk meletakkan SPM sebagai fondasi dalam menentukan kebijakan sehingga penerapan SPM dapat secara penuh dikawal untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.

Kegunaan pengukuran kinerja SPM setidaknya bisa dijadikan alat evaluasi, pengendalian, alat informasi sejauhmana tingkat keberhasilan serta sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dimasa-masa mendatang. Berikut dapat dilihat tingkat pelayanan atau nilai SPM pada jenjang pendidikan SD, SMP Negeri dan SMP Swasta.

Tabel 2.87 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Tahun 2017-2018

No.	Indikator SPM	2017		2018	
		SD	SMP	SD	SMP
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	100%	114%	100%	114%
2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	84%	88%	52%	87%
3.	Disetiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	-	89%	-	90%
4.	Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru	100%	96%	100%	119%

No.	Indikator SPM	2017		2018	
		SD	SMP	SD	SMP
	yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.				
5.	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	76%	-	86%	-
6.	Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	-	100%	-	100%
7.	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	-	100%	-
8.	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV	70%	70%	70%	91%
9.	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	-	69%	-	
10.	Di setiap kabupaten	100%	-	100%	-

No.	Indikator SPM	2017		2018	
		SD	SMP	SD	SMP
	Cirebon semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.				
11.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	100%	-	100%
12.	Di setiap Kabupaten semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%
13.	Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	100%	100%	100%	100%
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	96%	100%	105%	100%
15.	Setiap SD menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	77%	-	66%	-
16.	Setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya	-	20%	-	55%

No.	Indikator SPM	2017		2018	
		SD	SMP	SD	SMP
	oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.				
17.	Setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	98%	-	114%	-
18.	Setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	70%	-	79%	77%
19.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	77%	67%	69%	61%
20.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun.	100%	-	105%	64%
21.	Setiap Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	93%
22.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata	100%	100%	100%	96%

No.	Indikator SPM	2017		2018	
		SD	SMP	SD	SMP
	pelajaran yang diampunya.				
23.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	100%	100%	98%	98%
24.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	99%	100%	112%	73%
25.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	41%	95%	43%	94%
26.	Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada setiap akhir semester.	100%	100%	100%	100%
27.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	100%	100%	99%	98%

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Cirebon, Tahun 2018

2.1.6.2 SPM Bidang Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal. Tabel dibawah adalah jenis layanan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yaitu:

Tabel 2.88 Pencapaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2018

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Pencapaian Tahun 2018
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100,4%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	101,1%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	98,93%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	102,3%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	88,44%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	4,82%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	41,67%
8.	Pelayanan kesehatan	Sesuai standar pelayanan	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi	21,29%

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Pencapaian Tahun 2018
	penderita hipertensi	kesehatan penderita hipertensi.		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	16,11%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/trans gender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	59,43%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Cirebon, Tahun 2018

2.1.6.3 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 4 Sub Bidang SPM dan 4 Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran indikator yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2019 yang meliputi:

Tabel 2.89 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Sub. Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi	
						2017	2018
1.	Sub. Bidang Sumber Daya Air	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	96%	122,44%
2.	Sub Bidang Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	%	131,76%	81,40%
			Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	99,85%	100%
3.	Sub Bidang Jasa Kontruksi	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	-	100%
4.	Sub Bidang Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana	%	0%	4%

No	Sub. Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi	
						2017	2018
				rincinya melalui peta analog dan peta digital			

Sumber: Dinas PUPR Kab.Cirebon, Tahun 2018

2.1.6.4 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Untuk Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan jenis pelayanan dasar:

1. Rumah layak huni dan terjangkau;
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Dari 5 Jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut dijabarkan dalam 15 (lima belas) indikator SPM daerah kabupaten/kota dan 2 (dua) indikator SPM Perumahan Rakyat yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019, dari indikator SPM Pekerjaan Umum tersebut, hanya 5 (lima) Indikator SPM yang menjadi tugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut:

1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
2. Penyediaan sanitasi dengan indikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan.

Dan dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat dengan indikator SPM Perumahan Rakyat yang menjadi tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Rumah layak huni dan terjangkau, dengan indikator:
 - a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni;
 - b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), dengan indikator: lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Tabel 2.90 Pencapaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2018

No.	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Cipta Karya	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% Penduduk	74,81	74,89
		Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	83,37	82,39
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	imb	-	-
2.	Perumahan Rakyat	Rumah layak huni dan terjangkau	Meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	96,16	96,50
				Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	-	-
		Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatnya lingkungan yang sehat serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	-	-

Sumber: Dinas Kimrum, Kab.Cirebon, Tahun 2018

2.1.6.5 SPM Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa pelayanan dasar urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2.1.6.5.1 Kantor Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Bidang Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon wajib melaksanakan pelayanan dasar, sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.91 Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP) Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten	70%	99.30%
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	50%	100%

Sumber: Kantor Satpol PP Kab.Cirebon, Tahun 2018

2.1.6.5.2 Dinas Pemadam Kebakaran

Dalam melaksanakan pelayanan dasar Penanggulangan Bahaya Kebakaran di dasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung pasal 5 ayat (4) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah. Hal ini bertujuan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 tahun 1997 Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang wajib melaksanakan usaha pencegahan bahaya kebaran dan pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib ikut serta secara aktif melaksanakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perlu dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran seperti tidak meninggalkan kompor yang menyala, tidak menggunakan sumber listrik dengan beban yang berat, tidak meletakkan bahan

yang mudah terbakar di dekat api, memeriksa kabel listrik yang terkelupas dan mengganti dengan yang baru, memeriksa secara rutin pipa gas, dan menyediakan media pemadam kebakaran seperti pasir, tandon air, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tipe kebakaran.

Tabel 2.92 Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketertiban Umum (Pemadam Kebakaran) Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Realisasi 2018
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga).	69,2%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate).	97,06%
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.	23,8%
		Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000–5000 liter yang laik pakai.	88,9%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, Kab.Cirebon, Tahun 2018

2.1.6.6 SPM Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran II khususnya untuk Kabupaten/Kota tercantum Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana SPM Bidang Sosial. Adapun indikator dari Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Di Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

1. Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
2. Prosentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
3. Prosentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
4. Prosentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
5. Prosentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel 2.93 Pencapaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator SPM	Realisasi 2018
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Prosentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15,56%

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator SPM	Realisasi 2018
1	2	3	4
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	12,17%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	5,85%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Prosentase Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	22,06%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah Kabupaten Cirebon yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%

Sumber: Dinas Sosial, Kab.Cirebon, Tahun 2018

2.2 ISU FAKTUAL PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CIREBON

Berangkat dari isu strategis yang ada di RPJPD dan memerhatikan kondisi empiris yang ada di daerah, serta bersinergi dengan dokumen teknokratik RPJMN dan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskanlah isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Pengangguran dan Kemiskinan;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;
5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
6. Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
7. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah;
8. Penangan Pandemi Covid-19 dan Dampak-Dampaknya; dan
9. Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

2.2.1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Berbicara tentang reformasi birokrasi, memang bukan sekedar soal kecukupan jumlah saja, melainkan yang terpenting soal kualitas dari birokrasi itu sendiri, serta pelayanan yang diberikan kepada publik. Hingga saat ini, kita masih menemukan masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan yang berdampak pada tidak meratanya

pembangunan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai dalam mendukung kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat tiga elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, *pertama* reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggat waktu, indikator serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur.

Dalam pembenahan struktur dan alokasi sumber daya aparatur perlu dilakukan telaahan dan evaluasi terhadap keberadaan struktur organisasi, beban kerja di masing-masing struktur dan kinerja aparaturnya sehingga dari evaluasi ini diharapkan diperoleh hasil penempatan SDM (pemetaan) sesuai dengan keahlian dan kompetensi dan beban kerja pada struktur jabatan yang dilaksanakan.

Secara umum, isu terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dan terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, di antaranya: menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi; menata kelembagaan dan menempatkan birokrasi sesuai dengan kapasitas dalam rangka mewujudkan profesionalisme; meningkatkan kualitas pelayanan publik; membangun iklim birokrasi yang terintegrasi dengan kebudayaan lokal; menerapkan *e-government* untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi; meningkatkan sistem pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi.

2.2.2 Pengangguran dan Kemiskinan

Meski angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus mengalami penurunan secara signifikan lima tahun belakangan, bahkan sudah mampu menembus angka 9,94% di Tahun 2019, namun bukan berarti persoalan kemiskinan sudah tidak krusial lagi.

Kemiskinan dan ketenagakerjaan menjadi permasalahan yang serius dan harus segera di atasi di Kabupaten Cirebon, mengingat masih terdapat cukup banyak jumlah penduduk miskin serta pengangguran, dimana persoalannya ada pada terbatanya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan upah yang layak.

Namun persoalan seriusnya juga terletak pada terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, sedangkan di sisi lain, rendahnya kemampuan kewirausahaan dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan dan pengangguran ini memang tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan komprehensif dan membutuhkan daya dukung yang besar.

Terkait dengan isu kemiskinan dan pengangguran ini, setidaknya ada beberapa substansi yang akan menjadi fokus perhatian isu ini, diantaranya: meningkatkan keterampilan dan kemampuan wirausaha berbasis lokal, baik desa maupun komunitas; membangun Balai Latihan Kerja dan balai latihan kerja komunitas; membuka akses modal, sarana prasarana dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah; meningkatkan infrastruktur perdesaan; melindungi dan memfasilitasi ekonomi sektor primer (khususnya pertanian); meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin; dan membuat kebijakan yang inklusif guna menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok rentan dan marginal.

2.2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat

Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat merupakan isu yang bersifat lintas sektor/bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketakwaan, hingga budaya. Ada banyak tugas berat Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyelesaikan tantangan yang ada di bidang ini, mengingat isu ini terkait erat dengan *human ware* yang dalam hal ini adalah manusianya serta *soft ware* yang berarti nilai-nilainya, sehingga prosesnya pun dimulai dari membekali dengan pengetahuan, hingga menata sikap dan perilaku.

Modal dasarnya adalah budaya dan agama yang tumbuh kuat di masyarakat selama ini, sehingga dapat dijadikan pegangan dalam berperilaku di lingkungan sosial, maupun dalam kaitannya dengan ibadah rutin masyarakat. Artinya, pendekatan yang dipilih dalam membangun diskursus pada isu ini harus dengan pendekatan spasial dan sektoral. **Pertama**, pendekatan spasial mengarah pada pemberdayaan komunitas dan berbasis wilayah, dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di lokal, baik SDM, modal sosial, keuangan, infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang dimiliki. **Kedua**, pendekatan sektoral mengarah pada model pendekatan berbasis isu sektor, seperti kebudayaan, kesehatan, keagamaan, pendidikan dan lain-lain sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi.

Pada isu ini, ada upaya melakukan internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat sehingga tercipta relasi yang harmonis, toleransi dan saling menghormati, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tentram, serta menciptakan SDM yang berkualitas.

2.2.4 Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 8,19% dari 45.461.939,3 juta rupiah tahun 2018 menjadi 49.186.356,9 juta rupiah pada angka tahun 2019. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil pada Tahun 2018 mencapai 32.160.192,4 juta rupiah atau meningkat sebesar 4,86% dari Tahun 2019 sebesar 33.723.897,2 juta rupiah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 hingga mencapai angka 4,86 persen pada tahun 2019. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian

Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2017-2019 selalu berada dibawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

2.2.5 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Kabupaten Cirebon memiliki 412 desa, dimana setiap desa memiliki kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penguatan pembangunan desa. Desa saat ini memiliki kesempatan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di desa, berbekal kewenangan yang dimiliki sebagai mandat yang diberikan oleh UU Desa, didukung dengan keuangan yang memadai dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di desa.

Akan tetapi, meski sudah memiliki berbagai peluang tersebut, faktanya tidak banyak desa yang mengalami percepatan dalam proses membangun, dan alasannya pun beragam, mulai dari pengetahuan yang terbatas, komitmen politik yang rendah hingga enggan bergeser dari kebiasaan lama dalam proses perencanaan penganggaran desa.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Kabupaten Cirebon, desa memiliki kekayaan yang luar biasa untuk dapat menopang kehidupan masyarakat, produk yang dihasilkan pun beragam, mulai dari dukungan sektor pertanian, perkebunan, nelayan hingga di sektor budaya dan pariwisata. Banyak desa yang sudah melaju pesat pembangunannya, namun tidak sedikit juga yang tidak banyak melakukan perubahan.

Oleh karenanya, mendorong desa untuk mengembangkan potensinya penting menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, dimana sesuai dengan perannya, Kabupaten memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, ke depan, Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen juga untuk melakukan penataan dan pengembangan kawasan perdesaan sehingga terjadi sinergi pembangunan berbasis kawasan.

Pendekatan yang dapat diambil dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan ini melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). PEL mensyaratkan adanya proses yang demokratis dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya lokal termasuk dengan memperkuat kemitraan antar aktor strategis, guna mencapai tujuan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Melalui pendekatan PEL, diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan kemiskinan dan pengangguran yang sampai saat ini masih menjadi beban berat Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain daripada itu perlu didorong agar pemerintahan desa mau ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan sectoral sehingga beban Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dapat dibagi dan didistribusikan ke seluruh desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

2.2.6 Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

Rasa aman dan nyaman masyarakat serta ketentraman sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan negara/pemerintah menegakkan peraturan-peraturan daerah termasuk peraturan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur dan

melindungi rakyatnya. Rasa aman yang dapat diciptakan akan menimbulkan rasa tenang dalam lingkungan kemasyarakatan. Saat rasa aman, nyaman dan tenang itu tidak dapat diciptakan maka akan menurunkan indeks rasa aman dan kenyamanan masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakatnya.

Kabupaten Cirebon masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat sekabupaten Cirebon. Pelanggaran pemanfaatan trotoar dan sempadan jalan sebagai area berdagang oleh pedagang kaki lima serasa masalah yang telah mengakar dan berakar seolah tanpa solusi.

Kabupaten Cirebon memiliki citra positif sebagai kota wali, akan tetapi kawasan atau daerah rawan penyakit masyarakat berkembang sangat pesat terutama di sepanjang daerah pantura Jawa. Kenyataan ini cukup memberikan kerisauan terhadap masyarakat yang bermukim di Kabupaten Cirebon, karena gangguan lingkungan terkait prostitusi, minuman keras dan narkoba masih kerap terjadi di Kabupaten Cirebon.

Maka dari itu untuk mengembalikan citra positif sebagai daerah kota Wali perlu diperkuat dengan penegakan Perda dan perkara, mengoptimalkan cakupan pengawasan terhadap daerah rawan penyakit masyarakat terutama daerah prostitusi, minuman keras dan narkoba.

Perlindungan masyarakat melalui penggalakan siskamling dan swadaya masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan upaya nyata dalam peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari ilustrasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks rasa aman dan nyaman daerah di atas, memberikan gambaran dan tantangan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam membangun rasa aman, nyaman dan tenang masyarakat. Karena secara hakikat aturan main (hukum) yang dibuat oleh manusia secara prinsip adalah untuk mengatur, memberikan kepastian dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari kepastian penegakan hukum sendiri.

2.2.7 Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah

Salah satu indikator mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur wilayah yang baik dan mantap maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

Dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan dan kemandirian infrastruktur wilayah ini, Pemerintah Kabupaten akan bersinergi dengan Desa yang memiliki kewenangan dan keuangan yang salah satu tugasnya juga melaksanakan pembangunan. Infrastruktur yang memang menjadi wilayah kewenangan desa, akan dipenuhi oleh desa sesuai dengan procedure perencanaan dan penganggaran desa. Sedangkan yang berada di wilayah kewenangan kabupaten, maka akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten.

- a. Kemandirian jembatan dan jalan meliputi jalan kabupaten dan poros desa terutama jalan-jalan penghubung ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar meliputi perumahan, sanitasi, dan listrik;
- c. Keterpaduan pembangunan bidang keciptakarya meliputi sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan dan pengembangan bangunan dan lingkungan permukiman;
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan/atau di perbatasan;
- e. Penataan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi jalan pemukiman, taman, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau;
- f. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
- g. Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi meliputi saluran pembuangan air limbah domestic, sampah dan pengolahannya terutama sarana TPS dan TPA sekaligus pengembangan manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan jamban;
- h. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis dengan manajemen sumber daya air berbasis data hidrologis dan timbangan keragaan pengairan;
- i. Prasarana telekomunikasi dan informasi

Selebihnya, yang terpenting dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ini adalah aspek pemerataan. Daerah pinggiran yang selama ini seringkali termarginalkan, ke depan justru harus menjadi prioritas, sehingga desa-desa pinggiran dapat melakukan percepatan pembangunan.

2.2.8 Penangan Pandemi Covid-19 dan Dampak-Dampaknya

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Cirebon, termasuk Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Seperti juga dilakukan oleh daerah-daerah lain, pergeseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.

Memerhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta IKU dan hasil (outcome) perangkat daerah. Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini.

2.2.9 Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Beberapa persoalan lingkungan yang berasal dari kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon seperti alih fungsi lahan dan hutan, kelangkaan air baku, penggunaan pupuk yang berlebihan, tidak adanya tindakan reklamasi bekas tambang, pembuangan limbah industri/RT langsung ke laut, limbah industri batu alam, batik, dan sejenisnya masih belum mendapatkan solusi dan penanganan yang tepat. Dengan kata lain, resiko tercemarnya lingkungan hidup selalu bertambah dari hari ke hari.

Ancaman pencemaran lingkungan ini harus diselesaikan secepatnya agar tidak berimbas pada dampak lain seperti banjir, longsor, kehilangan ekosistem, dan musibah kebakaran lahan. Beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon Bagian Timur (banjir) dan daerah perbukitan Bagian Selatan perlu mendapat perhatian serius. Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak optimal juga berdampak pada degradasi habitat bagi aneka ragam hayati, terutama yang hidup di sungai dan laut di wilayah Kabupaten Cirebon. Meskipun usaha-usaha konservatif telah dilaksanakan termasuk di antaranya kampanye penanganan sampah, akan tetapi usaha-usaha yang lebih solutif mesti dipikirkan sebagai usaha untuk membangun kolaborasi atas isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, penjagaan lingkungan yang bersifat kolaboratif-konstruktif dari elemen masyarakat juga harus dicanangkan. Terutama, untuk menjembatani kebutuhan antar sektor, seperti para pengolah batu alam dan para petani yang saling berbagi kebutuhan sumber air. Semangat penjagaan terhadap lingkungan ini, juga perlu dilakukan agar potensi konflik atas dasar kesejahteraan, terutama di tengah masa Pandemi ini bisa dihindari. Implementasi perencanaan yang baik dalam mengatasi isu ini juga akan menunjukkan dukungan nyata pemerintah Kabupaten terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat dari semua golongan terhadap lingkungan hidup.



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**

PENYUSUNAN
RIK RENCANA
INDUK
KELITBANGAN
KABUPATEN CIREBON

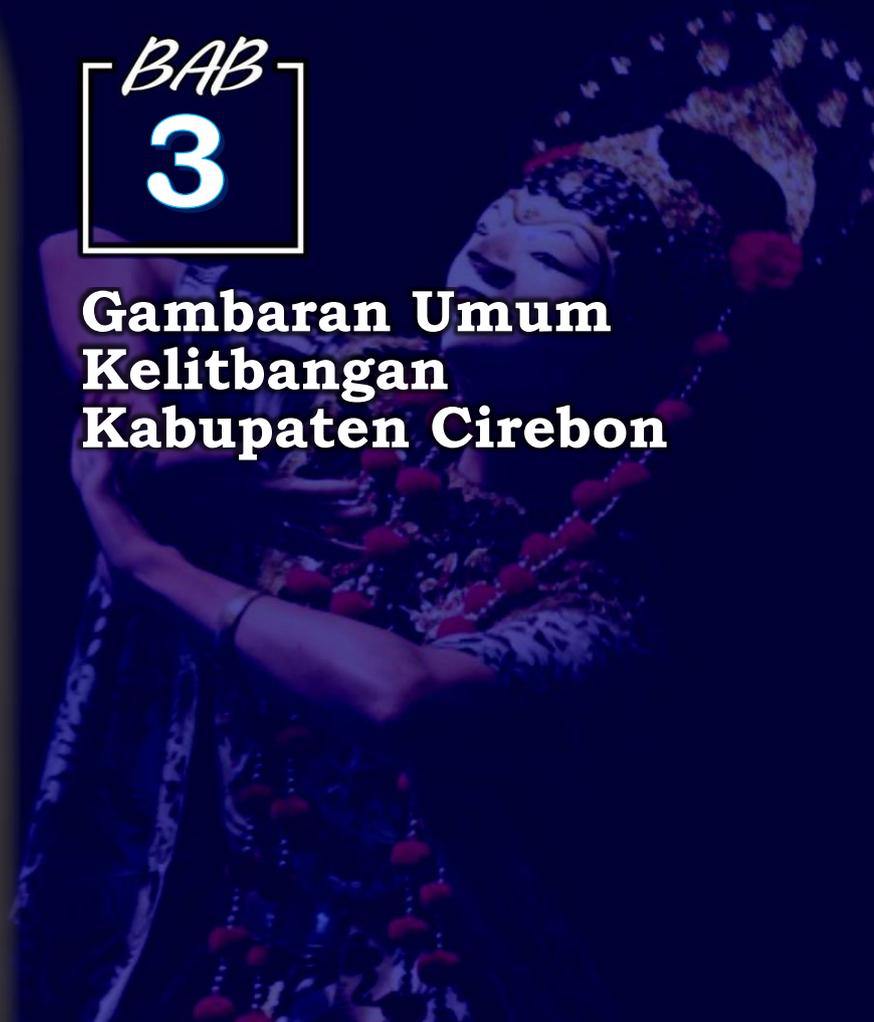
BAB

3

**Gambaran Umum
Kelitbangan
Kabupaten Cirebon**

Laporan Akhir

2021



3.1 KONDISI SUMBER DAYA KELITBANGAN

3.1.1 Kelembagaan

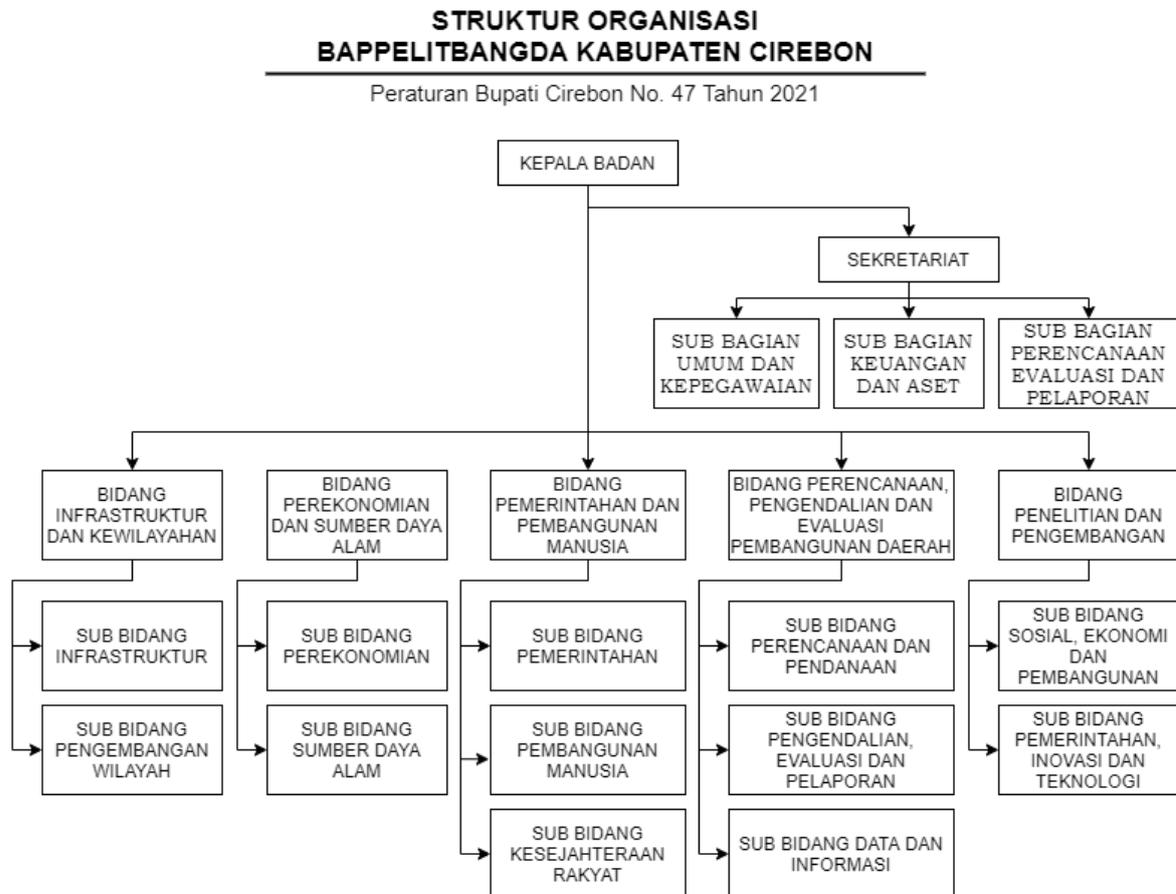
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi Kepala Badan, Sekretariat dengan dibawahnya 3 (tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset, Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan 5 (lima) Kepala Bidang berjumlah 12 (dua belas) kasubid ditambah 1 (satu)

Jabatan Fungsional, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan;
 - a. Sub Bidang Infrastruktur
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan;
 - a. Sub Bidang Perekonomian.
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan;
 - a. Sub Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan;
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan;
 - a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan.
 - b. Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi.

Adapun struktur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2020



Sumber: Bappelitbangda, 2020

3.1.2 Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2020, kekuatan sumber daya manusia Bappelitbangda adalah sebanyak 58 orang, terdiri atas 42 PNS dan 17 non PNS. Dari sejumlah PNS itu, 14 orang (33%) berpendidikan master, 19 orang (45%) berpendidikan Sarjana, 5 orang (12%) berpendidikan SLTA, dan 2 orang (5%) berpendidikan SLTP/SD sebagaimana Tabel 1.1. Dari pegawai tersebut 21 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural, dua orang arsiparis dan sisanya sebanyak 19 orang sebagai pelaksana. Bappelitbangda adalah salah satu lembaga di tingkat daerah yang pegawainya memiliki latar belakang pendidikan paling bervariasi, terdiri dari teknik (24 %), ilmu administrasi (31%), dan sosial (4 %). Sementara itu, latar belakang keilmuan lainnya memiliki persentase 15 %.

Jumlah PNS di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sebanyak 42 orang dengan didominasi oleh golongan III sebanyak 25 orang atau 59,52 % dari keseluruhan pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, disusul 11 orang (26,19 %) golongan IV dan 6 orang (14,29%) golongan I dan II. Pegawai non PNS sebanyak 16 orang, jumlah total sebanyak 58 orang.

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Menurut Golongan Pangkat Tahun 2020

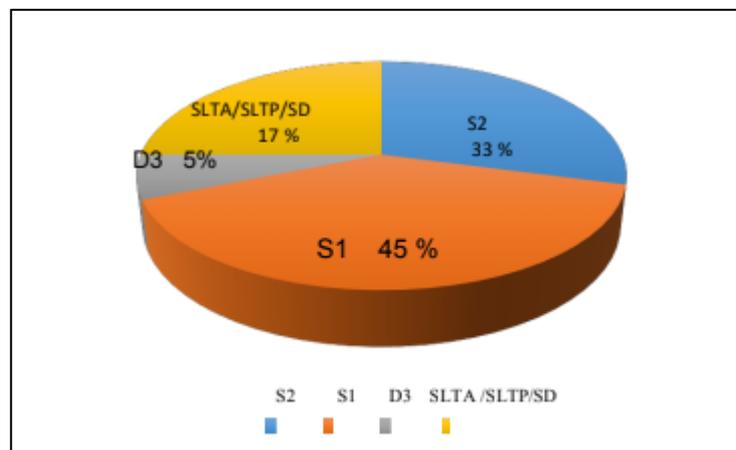
Unit	Gol.I-II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala	-	-	1	1
Sekretariat	4	8	3	15
Bidang Ekonomi	-	4	1	5
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1	3	2	6
Bidang Fisik dan Prasarana	1	2	2	5
Bidang Pengendalian dan Evaluasi	-	4	1	5
Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	3	1	4
Menjabat Kuwu	-	1	-	-
Jumlah	6	25	11	42

Sumber: Bappelitbangda, 2020

Mayoritas pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berpendidikan S2 atau 33 % dari jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, disusul dengan 45 % berpendidikan S1 dan 17 % berpendidikan SLTA/SLTP/SD, dan 5 % berpendidikan D3. Berdasarkan jabatan struktural, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 6 pejabat eselon III, 14 pejabat eselon IV, 18 Pelaksana, dan 2 Jabatan Fungsional (JF) Arsiparis serta 1 orang yang menjabat kuwu. Dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2020



Sumber: Bappelitbangda, 2020

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik struktural maupun fungsional teknis khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

3.1.3 Pendanaan Kelitbangan

1. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon, khususnya pada sektor industri pengolahan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, menjadikan daya tarik bagi berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon;
2. Pernah dilaksanakan lomba riset tematik tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dengan fokus penelitian wilayah Kabupaten Cirebon, untuk meningkatkan daya riset di tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi;
3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan inovasi, dibuktikan dengan kegiatan IGA (Innovative Government Award), dimana kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui inovasi;
4. Adanya dukungan dari akademisi yang kompeten dan ahli di bidangnya serta sesuai dengan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Cirebon dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon;
5. Keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di daerah Kabupaten Cirebon, meskipun memiliki bisnis inti di bidang tekstile dan industri manufaktur serta insdutri pertambangan, namun tetap berpotensi untuk dijadikan mitra dalam pengembangan kelitbangan.

Pada tahun anggaran 2020, realisasi belanja daerah sebesar Rp 13.073.976.175,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 14.369.480.700,00. Pagu anggaran untuk program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Pagu Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

No	Program	Anggaran			
		Pagu 2020	Realisasi 2020	%	Pagu 2019
1	Belanja Daerah	14.369.480.700,00	13.073.976.175,00	90,98	18.887.919.850,00
2	Belanja Tidak Langsung	7.429.179.000,00	6.424.738.456,00	86,48	6.506.132.000,00
3	Belanja Langsung	6.940.301.700,00	6.649.237.719,99	95,81	12.381.787.850,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN					
1	Program Pengembangan Data/Informasi	286.435.600,00	278.940.100,00	97,38	532.818.900,00
2	Program Kerjasama Pembangunan	37.350.000,00	37.350.000,00	100	74.151.500,00
3	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	83.150.000,00	82.625.000,00	99,37	100.000.000,00
4	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	169.475.000,00	168.829.500,00	99,62	300.000.000,00
5	Program Perenc. Pengemb. Kota-kota Menengah dan Besar	390.525.000,0	388.799.500,00	99,56	650.000.000,00

6	Program Perencanaan Pemb. Daerah	2.078.016.000,00	1.888.717.537,00	90,89	2.197.810.350,00
7	Program Perencanaan Pemb. Ekonomi	415.944.000,00	406.325.008,00	97,69	1.835.900.000,00
8	Program Perencanaan Pemb. Sosbud	566.569.400,00	560.429.300,00	98,92	1.500.000.000,00
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	67.600.000,00	67.542.500,00	99,91	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
1	Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Daerah	168.889.600,00	162.166.507,00	96,02	500.000.000,00
2	Program Penelitian dan Pengembangan, Sosial, Ekonomi dan Kewilayaha	191.418.400,00	189.064.400,00	99,91	500.000.000,00
NON URUSAN					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.458.520.700,00	1.408.174.167,00	96,55	1.526.478.200,00
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	664.167.000,00	648.972.700,00	97,71	1.234.096.800,00
3	Program Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.088.600,00	63.088.600,00	100	243.450.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	172.059.200,00	171.119.700,00	99,45	110.376.000,00
5	Program Pengembangan Sistem Perenc. Sektoral	127.093.200,00	127.093.200,00	100	100.000.000,00

Sumber: *Bappelitbangda, 2020*

3.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON

3.2.1 Potensi

- Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon, khususnya pada sektor industri pengolahan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, menjadikan daya tarik bagi berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon;
- Pernah dilaksanakan lomba riset tematik tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dengan fokus penelitian wilayah Kabupaten Cirebon, untuk meningkatkan daya riset di tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi;
- Adanya komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan inovasi, dibuktikan dengan kegiatan IGA (Innovative Government Award), dimana kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi

dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui inovasi;

9. Adanya dukungan dari akademisi yang kompeten dan ahli di bidangnya serta sesuai dengan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Cirebon dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon;
10. Keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di daerah Kabupaten Cirebon, meskipun memiliki bisnis inti di bidang tekstile dan industri manufaktur serta insdutri pertambangan, namun tetap berpotensi untuk dijadikan mitra dalam pengembangan kelitbangan.

3.2.2 Permasalahan

1. Keterbatasan pagu anggaran yang dialokasikan daerah dalam mendukung kegiatan kelitbangan sehingga proses penelitian dan pengembangan tidak berjalan dengan optimal;
2. Belum tersedianya data dasar yang lengkap dan akurat untuk dijadikan sebagai pendukung dalam merancang kajian pembangunan daerah termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;
3. Masih kurangnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia, khususnya tenaga peneliti dan tenaga perencana di daerah;
4. Pihak swasta sebagai salah satu leading sector penggerak perekonomian di Kabupaten Cirebon belum memiliki program penelitian dan pengembangan yang berorientasi langsung terhadap pembangunan daerah, padahal peran sektor swasta sangat berpengaruh dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Selama ini, program yang dilakukan oleh pihak swasta hanya sebatas pada program-program CSR (Corporate Social Responsibility) yang diberikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat;
5. Minim tindak lanjut dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah berjalan di Kabupaten Cirebon. Tanpa adanya usaha untuk menindaklanjuti hasil dari penelitian dan pengembangan tersebut, maka tujuan untuk menghasilkan inovasi-inovasi menjadi tidak tercapai;
6. Belum optimalnya jalinan komunikasi, kemitraan, dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan institusi pendidikan dalam hal pengembangan kelitbangan;

3.3 PELUANG DAN TANTANGAN KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON

3.3.1 Peluang

Peluang dalam pengembangan kelitbangan sebagai berikut:

1. Disusunnya Rencana Induk Kelitbangan menjadi media untuk membuat perencanaan bidang kelitbangan semakin terarah dan sinergis antar sektor pemerintahan, sekaligus memudahkan kolaborasi antar pihak dalam kerja sama pelaksanaan kelitbangan;
2. Hasil-hasil yang didapat dari kegiatan kelitbangan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik

- sehingga kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan yang tepat dan bermanfaat karena memiliki basis data dan informasi yang kuat;
3. Peluang yang terbuka lebar untuk membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan pihak swasta dalam melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, mengingat daya tarik yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon;
 4. Banyaknya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan jejaring dan kolaborasi, kerjasama serta sinergitas dalam melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.

3.3.2 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dan teridentifikasi dalam pengembangan kelitbangan adalah:

1. Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang sangat dinamis;
2. Kondisi geografis daerah yang terdiri atas tiga wilayah dataran yang berbeda yaitu daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi membuat kegiatan penelitian dan pengembangan membutuhkan pembiayaan yang relatif lebih tinggi dibanding daerah yang hanya memiliki satu wilayah dataran baik dalam proses pelaksanaan maupun implementasinya;
3. Tantangan untuk dapat meningkatkan implementasi dari hasil-hasil kelitbangan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tujuan kelitbangan untuk menghasilkan inovasi- inovasi dapat terwujud, termasuk juga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan hasil-hasil kelitbangan (*research based policy*);
4. Kebijakan yang dihasilkan harus transparan dan akuntabel;
5. Adanya kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Kabupaten Cirebon menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menghasilkan produk-produk kelitbangan yang lebih berkualitas.

3.4 ISU STRATEGIS KELITBANGAN

3.4.1 Isu Global (RIPP Provinsi Jawa Barat)

Isu global yang tertera pada Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

1. **Geo ekonomi**;Ekonomi global; pergeseran pusat ekonomi ke Asia Pasifik; Perdagangan Jasa meningkat, tren harga produk menurun kecuali manufaktur; meningkatnya hambatan ekspor, MEA,AFTA,NAFTA
2. **Geo Politik**;konstelasi geo-politik global; lingkungan Geo-Politik Regional
3. **Agenda Sustainable Development Goals (SDG's)**
4. **Pangan dan Energi**

3.4.2 Isu Nasional (RPJMD Jawa Barat)

1. Peran Kabupaten Cirebon sebagai Pendukung PKN Cirebon dan Cirebon Metro Raya
Pengembangan kawasan metropolitan di Jawa Barat dimulai dengan mengembangkan tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang didorong menjadi kawasan metropolitan Jawa Barat. Salah satu kawasan yang akan dikembangkan adalah

Kawasan Metropolitan Cirebon Raya. Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya merupakan salah satu target pengembangan Jawa Barat sebagai koridor perekonomian di Pulau Jawa.

2. Pembangunan KEK Rebana Metropolitan;
3. Pembangunan infrastruktur Pelabuhan di Patimban, Jalan Tol Cipali & Palimanan

3.4.3 Indikator Capaian SDG'S Jawa Barat 2017

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi terbarukan
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

3.4.4 Tema Kelitbangan Nasional (Rencana Induk Riset Nasional)

Tema kelitbangan nasional yang tertera pada Rencana Induk Riset Nasional adalah sebagai berikut:

1. **Pangan**, ketersediaan dan kedaulatan konsumsi untuk asupan masyarakat meliputi proses produksi, pengolahan dan manufaktur produk turunannya
2. **Energi**, meliputi pencarian sumber energi, pengolahan serta peningkatan konversi sumber daya alam menjadi energi
3. **Kesehatan**, meliputi solusi masalah Kesehatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan manufaktur alat kesehatan
4. **Transportasi**, meliputi system moda transportasi serta teknologi pendukungnya
5. **Produk Rekayasa Keteknikan**, meliputi seluruh bidang proses menciptakan nilai tambah dan solusi berbasis keteknikan (arsitek, elektro)
6. **Pertahanan dan Keamanan**, mengembangkan sistem dan perangkat alat utama pertahanan

7. **Kemaritiman**, menciptakan nilai tambah dari sumber daya kelautan serta potensi perariran dan peningkatan mobilitas masyarakat
8. **Sosial Humaniora**, Pemahaman masalah social masyarakat dan mendukung penerapan IPTEK berkelanjutan

3.4.5 Isu Strategi RPJMD Jawa Barat 2018-2023

Isu strategis RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial;
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
5. Reformasi Birokrasi

3.4.6 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Berangkat dari isu strategis yang ada di RPJPD dan memerhatikan kondisi empiris yang ada di daerah, serta bersinergi dengan dokumen teknokratik RPJMN dan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskanlah isu-isu strategis Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Pengangguran dan Kemiskinan
3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
6. Percepatan integrasi sistem informasi;
7. Sistem Informasi belum terkelola dengan baik;
8. Penanganan Pandemi Covid 19 dan dampaknya;
9. Komitmen penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

3.4.7 Isu Kelitbangan Kabupaten Cirebon

Isu strategis kelitbangan Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Semakin besarnya tuntutan system perencanaan dan penganggaran yang **efektif, efisien, partisipatif & transparan berbasis IT**;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non-formal lainnya;
3. **Integrasi perencanaan dan penganggaran** yang efektif, efisien dan transparan
4. **Percepatan integrasi sistem informasi**;
5. Sistem Informasi **belum terkelola dengan baik**;
6. Penguatan sinergitas perencanaan pembangunan **belum terjalin lintas sektor**, terutama dengan perguruan tinggi;
7. **Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah** dapat ditingkatkan dengan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus, teliti dan inovatif.



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**

PENYUSUNAN
RIK RENCANA
INDUK
KELITBANGAN
KABUPATEN CIREBON

BAB

4

**Arah Kebijakan
Pembangunan
Eksisting Kabupaten
Cirebon**

Laporan Akhir

2021



4.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah ini bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 dengan maksud agar kelitbangan yang direncanakan didalam Rencana Induk Kelitbangan ini dapat berkontribusi dan memiliki keselarasan dengan target jangka panjang daerah.

4.1.1 Arahan Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun.

Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada perodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang terdiri dari :

- 1) RPJMD tahap ke -1 Tahun 2005-2009
- 2) RPJMD tahap ke -2 Tahun 2009-2014
- 3) RPJMD tahap ke -3 Tahun 2014-2019
- 4) RPJMD tahap ke -4 Tahun 2019-2025

Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah pembangunan dan strategi jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun (2005-2025) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup antar dan inter umat beragama;
 - b. Menurunnya jumlah penyakit masyarakat;
 - c. Meningkatnya indeks kesehatan;
 - d. Meningkatnya indeks pendidikan;
 - e. Meningkatnya daya beli masyarakat;
 - f. Menurunnya jumlah pengangguran.
2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- b. Berkurangnya daerah rawan banjir dan kekeringan;
 - c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta modal pembangunan daerah;
 - d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
3. Terwujudnya perekonomian yang kuat, ditandai oleh hal-hal berikut:
- a. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi;
 - b. Meningkatnya infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi yang efisien dan modern, dan sarana-prasarana dasar permukiman yang berkualitas;
 - c. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan investasi di daerah;
 - d. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - e. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi.
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel, ditandai hal-hal berikut:
- a. Tidak adanya keluhan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Berkurangnya angka demo masyarakat terhadap pemerintah;
 - c. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pemerintah dapat selalu diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Cirebon

4.1.2.1 Visi

Setiap Kepala Daerah memiliki orientasi untuk melakukan perubahan, hal itu tercermin dari visi dan misi yang pernah ditawarkan pada saat pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon tersebut merupakan janji politik Kepala Daerah terpilih yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Visi dan Misi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai visi daerah. Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon yang ditetapkan periode tahun 2019-2024:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

Adapun yang dimaksud dengan visi di atas, sebagai berikut:

Berbudaya

Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

Sejahtera

Sejahteran dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Agamis

Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif.

Maju

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparat pemerintah sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

Aman

Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

4.1.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

2. SEJAHTERA

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. AGAMIS

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

4. MAJU

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. AMAN

Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

4.2 Arahan Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan dan strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Arah kebijakan dan strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai berikut

Arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut penjelasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya	Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya lokal yang strategis untuk direvitalisasi
2. Pengembangan fasilitas aktifitas-aktifitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya	Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya
	Mengembangkan potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat
	Internalisasi nilai-nilai budaya dalam dunia pendidikan
3. Penguatan institusi-institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal	Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan yang pernah ada
	Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	institusi budaya lokal
4. Pengarusutamaan pengembangan budaya dalam perencanaan daerah dan desa	Mengoptimalkan pembentukan rintisan desa/kampung budaya sinkronisasi dan sinergitas program kabupaten dan desa di bidang kebudayaan
5. Pengembangan sektor wisata berbasis budaya melalui Pengembangan Promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal	Mengembangkan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata Menyelenggarakan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata
6. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya	meningkatkan Tata kelola keragaman budaya dan kesenian meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya
7. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan	Memperluas jaminan akses dan fasilitasi pendidikan dasar meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan yang inklusif Melakukan Penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga meningkatkan Kualitas SDM bidang pendidikan
8. Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan	Memperluas akses cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan mengembangkan dan penguatan KIE Kesehatan Keluarga meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana,
9. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Fasilitasi jaminan sosial bagi warga rentan Pendampingan kelompok usaha bagi warga rentan meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan
10. Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja	Harmonisasi kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja meningkatkan kualitas, produktifitas dan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>perlindungan bagi tenaga kerja</p> <p>mengoptimalikan Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat</p>
<p>11. Penguatan kelompok usaha dalam rangka membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung ekonomi unggulan kabupaten</p>	<p>Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan BUMDes</p>
<p>12. Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya peluang kerja</p>	<p>Kemudahan perizinan, insentif pajak dan konsistensi kebijakan daerah untuk mendukung iklim investasi</p>
<p>13. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan</p>	<p>Mendorong Peran dan Kreativitas pemuda dalam keolahragaan dan kepeloporan pemuda</p>
<p>14. Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan peningkatan keshalehan sosial</p>	<p>meningkatkan peran serta masyarakat dan penegak aturan untuk mengurangi penyakit masyarakat (PEKAT)</p>
	<p>meningkatkan kualitas layanan kegiatan keagamaan</p>
	<p>Internalisasi nilai-nilai agama dalam dunia pendidikan</p>
<p>15. Peningkatan kerukunan antar umat beragama</p>	<p>memperkuat dan mengoptimalkan peran Forum Antar Umat Beragama dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama</p>
	<p>Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan seperti DMI, Organisasi NU, Muhammadiyah dll</p>
<p>16. Pengembangan potensi usaha pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa berbasis sumber daya lokal</p>	<p>Mengoptimalkan dukungan sektor swasta dalam pemerataan ekonomi</p>
	<p>meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal</p>
	<p>Melakukan perlindungan kawasan pertanian dan perikanan</p>
<p>17. Penciptaan pusat-pusat pengembangan baru berbasis pada kegiatan ekonomi unggulan</p>	<p>Mengembangkan sektor ekonomi inklusif berbasis pariwisata yang didukung oleh potensi daerah dan budaya lokal yang berdaya saing</p>
	<p>Mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal yang dapat memicu perkembangan wilayah dan memberikan dampak kemajuan pada daerah sekitarnya</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
18. Peningkatan daya saing komoditas unggulan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif	memperbaiki tata niaga, jalur dan rantai distribusi barang
	Melakukan pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi
	memperluas sumber pendapatan alternatif
	menambah akses pasar rakyat
	mengembangkan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa
19. Pengembangan ekonomi inklusif dan berkeadilan	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha-usaha produktif.
20. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal	meningkatkan produksi sektor pertanian
	Memperbaiki tata kelola distribusi pangan daerah
	Memperbaiki pola konsumsi dan peningkatan keamanan pangan
21. Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah	Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan konektivitas antar wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan berbasis keruangan
22. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
23. Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima	Meningkatkan intensitas , profesionalitas dan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintahan daerah
	menyederhanakan mekanisme dan standar pelayanan
	Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan
24. Optimalisasi pendapatan asli daerah	meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah
25. Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan	meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif
26. Penguatan pemerintahan tatakelola berbasis	meningkatkan aksesibilitas , kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance	<p>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi</p> <p>meningkatkan kualitas dan kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah</p>
27. Peningkatan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance)	<p>Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik serta Memperjelas kewenangan desa</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan dalam perencanaan pembangunan desa</p> <p>Meningkatkan kapasitas pendamping desa dan Aparatur kecamatan selaku Pembina desa</p>
28. Mengoptimalkan Dana Desa dari APBN dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan desa	<p>Mensinergikan perencanaan dan penganggaran desa / kelurahan dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah</p> <p>Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintahan desa / Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran Desa</p>
29. Peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa	<p>mendayagunakan aset desa dan keuangan desa untuk menyejahterakan masyarakat desa</p> <p>mengembangkan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas; pembukaan lapangan kerja; serta kesejahteraan warga</p>
30. Peningkatan peran dan sinergitas semua stakeholder dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan	<p>menguatkan dan mengembangkan kapasitas SDM pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan</p>
31. Peningkatan upaya pencegahan-pencegahan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	<p>meningkatkan penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat secara komprehensif serta peningkatan pencegahan tindak kriminal dengan melibatkan peran serta masyarakat</p>
32. Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	<p>Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana</p>

Selanjutnya penjabaran terkait keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel beriku.

Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Cirebon

VISI: “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA			
MISI 1: Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat			
1. Melestarikan dan menumbuhkan kembangkan budaya Masyarakat	1.1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat	Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya.	Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya lokal yang strategis untuk direvitalisasi
		Pengembangan fasilitasi aktifitas-aktifitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya	Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya Pengembangan potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat
		Penguatan institusi-institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal.	Internalisasi nilai-nilai budaya dalam dunia pendidikan Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan yang pernah ada
		Pengarusutamaan pengembangan budaya dalam perencanaan daerah dan desa.	Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal Mengoptimalkan pembentukan rintisan desa/kampung budaya
			sinkronisasi dan sinergitas program kabupaten dan desa di bidang kebudayaan
	1.2. Berkembang nya sektor wisata berbasis budaya.	Pengembangan sektor wisata berbasis budaya melalui Pengembangan Promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal	Pengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata Penyelenggaraan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata
		Pengembangan SDM pelaku wisata budaya.	Peningkatan Tata kelola keragaman budaya dan kesenian
			Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya
	KABUPATEN CIREBON SEJAHTERA		
MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan			

dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi			
1. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera	1.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan.	Perluasan jaminan akses dan fasilitasi pendidikan dasar
			Peningkatan kualitas layanan dan pendidikan yang inklusif
			Penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga
			Peningkatan Kualitas SDM bidang pendidikan
			Meningkatkan minat baca masyarakat
	1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan.	Memperluas akses cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat
			Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan
			Pengembangan dan penguatan KIE Kesehatan Keluarga
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan
			Peningkatan pelayanan keluarga berencana
1. Menurunnya angka kemiskinan	3	Perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Fasilitasi jaminan sosial bagi warga rentan
			Pendampingan kelompok usaha bagi warga rentan
			Mewujudkan

			smart society
			Penguatan perlindungan dan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan
	1.4. Menurunnya angka pengangguran	Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja.	Harmonisasi kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
			Peningkatan kualitas, produktifitas dan perlindungan bagi tenaga kerja
			Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat
		Penguatan kelompok usaha dalam rangka membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung ekonomi unggulan kabupaten.	Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan BUMDes
		Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya peluang kerja.	Kemudahan perizinan, insentif pajak dan konsistensi kebijakan daerah untuk mendukung iklim investasi
	1.5 Meningkatnya Prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangun	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Mendorong Peran dan Kreativitas pemuda dalam keolahragaan dan kepeloporan pemuda
KABUPATEN CIREBON AGAMIS			
MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika			
1. Meningkatkan	1.1.	Optimalisasi penegakan	meningkatkan

keshalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama	Menurunnya angka asusila masyarakat.	regulasi ketertiban umum dan peningkatan keshalehan sosial.	peran serta masyarakat dan penegak aturan untuk mengurangi penyakit masyarakat (PEKAT)
			meningkatkan kualitas layanan kegiatan keagamaan
			Internalisasi nilai-nilai agama dalam dunia pendidikan
	1.2. Menurunnya gesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	peningkatan kerukunan antar umat beragama.	memperkuat dan mengoptimalkan peran Forum Antar Umat Beragama dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama
			Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan seperti DMI, Organisasi NU, Muhammadiyah dll
KABUPATEN CIREBON MAJU			
MISI 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.	1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.	Pengembangan potensi usaha pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa berbasis sumber daya lokal.	Mengoptimalkan dukungan sektor swasta dalam pemerataan ekonomi
			Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal
			Melakukan perlindungan kawasan

Tujuan			pertanian dan perikanan
		Penciptaan pusat-pusat pengembangan baru berbasis pada kegiatan ekonomi unggulan dan mewujudkan smart economy	Mengembangkan sektor ekonomi inklusif berbasis pariwisata yang didukung oleh potensi daerah dan budaya lokal yang berdaya saing
			Mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal yang dapat memicu perkembangan wilayah dan memberikan dampak kemajuan pada daerah sekitarnya
		Peningkatan daya saing komoditas unggulan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif dan mengembangkan smart branding	Melakukan pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi
			memperluas sumber pendapatan alternatif
			menambah akses pasar rakyat
			mengembangkan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa
			Melakukan pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi
		Pengembangan ekonomi inklusif dan berkeadilan.	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha-usaha produktif.
		1.2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal.
		Memperbaiki tata kelola distribusi pangan daerah	

	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memperbaiki Pola konsumsi dan peningkatan keamanan pangan
	1.3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah.	Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah	Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan konektivitas antar wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan berbasis keruangan
	1.4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	meningkatkan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan
			Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
			Mewujudkan dan menyusun roadmap smart environment
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pengelolaan sampah mandiri
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima.	Meningkatkan intensitas, profesionalitas dan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintahan daerah
			menyederhanakan mekanisme dan

			standar pelayanan
			Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan
		Optimalisasi pendapatan asli daerah	meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah
3.2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan.		meningkatkan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif
3.3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik.	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian <i>smart governance</i> .		meningkatkan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan public
			Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi dan menyusun roadmap Smart Governance
			meningkatkan kualitas dan kebijakan publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah
3.4.	Peningkatan tata kelola dan		Meningkatkan

	Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian Desa.	kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance)	kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik serta Memperjelas kewenangan desa.
			Meningkatkan kualitas SDM lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan dalam perencanaan pembangunan desa
			Meningkatkan kapasitas pendamping desa dan Aparatur kecamatan selaku Pembina desa
	Mengoptimalkan Dana Desa dari APBN dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan desa		Mensinergikan perencanaan dan penganggaran desa / kelurahan dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah
			Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan dan penganggaran Desa
	Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Desa terutama Badan Usaha Milik Desa		mendayagunakan aset desa dan keuangan desa untuk menyejahterakan masyarakat desa
			mengembangkan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas; pembukaan lapangan kerja; serta kesejahteraan

			warga
		Peningkatan peran dan sinergitas semua stakeholder dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan.	menguatkan dan mengembangkan kapasitas SDM pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan
KABUPATEN CIREBON AMAN			
MISI 5: Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional			
1. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	1.1. meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan upaya pencegahan-pencegahan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat secara komprehensif serta peningkatan pencegahan tindak kriminal dengan melibatkan peran serta masyarakat
	1.2. Menurunnya resiko bencana.	Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

4.3 Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah. prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat Prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2019-2024.

1. Kabupaten Cirebon **BERBUDAYA**

Membangun Wahana atau Gedung Pusat Budaya sebagai Pusat Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Sebagai ajang kreativitas seni dan budaya lokal Kabupaten Cirebon yang masih eksis dan hampir punah dari para seniman dan budayawan Cirebon agar dapat tetap lestari. Revitalisasi Sanggar Seni Budaya, Cirebon Tematik Festival, Cagar Budaya Lestari. Wisata berbasis Budaya.

2. Kabupaten Cirebon **SEJAHTERA**

Dalam rangka menjamin kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat pra sejahtera atau keluarga sangat miskin dan miskin sesuai indikator kemiskinan daerah/local dalam sistem yang terintegrasi (Kartu PEPEK Sejahtera). Kartu PEPEK ini merupakan kartu pelengkap bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani KIS atau Penerima Bantutan Iuran BPJS dari APBN, tidak terlayani Kartu Indonesia Pintar, Sembako Murah dan lain-lain. Mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa dengan mengembangkan produk unggulan desa dan meningkatkan BUMDes yang berkembang atau BUMDes yang Berdaya.

3. Kabupaten Cirebon **AGAMIS**

Salah satu upaya yang dilakukan dengan mendirikan Pusat kegiatan Keagamaan di Kabupaten Cirebon (Masjid Raya dan Islamic Center).

Langkah berikutnya adalah memasukkan atau mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan formal. Kegiatan MDTA terintegrasi dalam kegiatan Ekstrakurikuler wajib Sekolah dasar.

Setelah urusan pemerintahan wajib terpenuhi dan sesuai kemampuan keuangan daerah, maka akan diberikan insentif bagi imam masjid dan musholah untuk menggerakkan melek huruf Al Quran dan gerakan magrib mengaji bagi umat Islam dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren.

4. Kabupaten Cirebon **MAJU**

Mendorong kemajuan Kabupaten Cirebon melalui pembangunan pusat masyarakat ekonomi digital dalam rangka mendorong dan meningkatkan daya saing dan produk dari masyarakat Kabupaten Cirebon melalui Desa Pintar (memanfaatkan teknologi informasi). Membangun dan meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis keruangan atau sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama Pusat kegiatan Lokal dan Pusat Pengembangan Kota.

5. Kabupaten Cirebon **AMAN**

Membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang sadar hukum melalui desa sadar hukum dan bisa menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat melalui Sistem

keamanan lingkungan Siaga dan Desa Tangguh Bencana terutama desa atau daerah yang rawan bencana.

Sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran kepala daerah. Secara rinci, penjelasan tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 (Matriks Indikator Kinerja) Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Cirebon

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formulasi perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program Unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
MISI 1: Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat																
Tujuan Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya Masyarakat	Budaya daerah yang dilestarikan	Prosentase		52 %	56 %		58 %		60 %		62 %		64 %		Dis bud par por a	
Sasaran 1.1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat	Meningkatnya pelestarian karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah karya seni yang	Jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk mendapat HKI ke Kemenkumham		1		1		1		1		1	5	Dis bud par por a	
Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Jumlah kelompok budaya	Jumlah kelompok/komunitas budaya yang rutin menggelar aktivitas budaya/seni minimal 5 kali setahun	175	180		185		190		195		200		Dis bud par por a	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2	2		2		2		2		2			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana			
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah festival	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang digelar setiap tahun	4	8		8		8		8		8		8		Wisata berbasis Budaya	Disbudparpora
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama/MoU dengan pihak lain dalam pengelolaan kekayaan budaya/situs	Jumlah kerjasama/MoU	Jumlah kerjasama/MoU dengan pihak lain dalam pengelolaan kekayaan budaya/situs yang bukan milik Pemda	1	2		2		2		2		2		2		Wisata berbasis Budaya	Disbudparpora
Sasaran 1.2 Berkembangnya sektor wisata berbasis budaya.	Jumlah wisatawan berbasis kebudayaan	jumlah	Jumlah wisatawan berbasis kebudayaan	996.330	1.016.356		1.026.520		1.036.785		1.047.153		1.057.624					
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	jumlah	jumlah destinasi wisata baru yang dikembangkan	1	1		1		1		1		1		1		Wisata berbasis Budaya	
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama pengembangan	jumlah	Jumlah kerjasama	4 kerjasa	8		8		8		8		8		8		Wisata berbasis	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana		
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	kemitraan pariwisata dengan pelaku pariwisata		pengembangan kemitraan pariwisata dengan pelaku pariwisata	ma												Budaya	
MISI 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi																	
Tujuan Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			68,05	69,15		69,68		70,21		70,73		71,24				
Sasaran 2.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki	6,62	6,72		6,77		6,82		6,87		6,92			Cirebon Sejahtera	Di nas Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			dan pendidikan yang ditamatkan													
	Harapan Lama Sekolah	tahun			12,52		12,67		12,82		12,97		13,12		Cirebon Sejahtera	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Angka melek aksara	prosentase	$LIT + t = L + t$ $P + tx$		96 %		96,58 %		97,16 %		97,74%		98 %		Cirebon Sejahtera	Dinas Pendidikan
	Angka Lulusan Paket A Setara SD (%) Paket B Setara SMP (%) Paket C Setara SMA (%)	Prosentase			95 95 95		95 95 95		95 95 95		95 95 95		95 95 95		Cirebon Sejahtera	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase Capaian APK APK SD/MI (%) APK SMP/MTs (%)	Prosentase	$APK = \frac{E}{h} \times 100$ $h = P, tx$		115 113		114 112		113 111		112 110		111 109		Cirebon Sejahtera	Dinas Pendidikan
	Prosentase Capaian APM APM SD/MI (%)	prosentase			100 98,30		100 98,59		100 98,89		100 99,19		100 99,48		Cirebon Sejahtera	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formulasi perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	APM SMP/MTs (%)															didikan
	Prosentase Angka Siswa yang Melanjutkan Sekolah SD ke SMP (%) SMP ke SMU (%)	prosentase			100 80		100 83		100 85		100 87		100 90		Cirebon Sejahtera	Dinas Pendidikan
	Prosentase Sarana dan Prasarana Sekolah Kondisi ruang kelas SD yang baik (%) Kondisi ruang kelas SMP yang baik (%)	prosentase			70,4 2		70,8 4		71,2 7		71,7 0		72,1 3		Cirebon Sejahtera	Dinas Pendidikan
					80,5		81,0		81,5 0		82,0		82,4			
Sasaran 2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur		71,8 2		71, 91		71, 99		72, 07		72, 15		Cirebon Sejahtera	
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Prosentase penanganan komplikasi kebidanan	prosentase			81 %		82 %		83 %		84 %		85 %		Cirebon Sejahtera	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	Prosentase neo komplikasi yang	prosentase			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Cirebon Sejahtera	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Balita	ditangani															
Program Upaya kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	indeks			0,21 / 21 %		0,25 / 25 %		0,30 / 30 %		0,35 / 35 %		0,40 / 40 %			
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut	prosentase			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	prosentase			67 %		67 %		71 %		73 %		75 %			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1 x 24 jam	prosentase			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Persentase Imunisasi Dasar lengkap	prosentase			94 %		94 %		94,5 %		95 %		95 %			
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase penderita hipertensi yang dilayani secara standar	prosentase			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Persentase penderita DM yang dilayani secara standar	prosentase			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	prosentase			35 %		40 %		45 %		50 %		60 %			
	Persentase rumah sakit terakreditasi	prosentase			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persentase laboratorium kesehatan terakreditasi	prosentase			40 %		50 %		60 %		70 %		80 %			
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase rumah sehat	prosentase			85,98 %		86,88 %		87,78 %		88,68 %		89,58 %			
		prosentase														
Sasaran 2.3 Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan	prosentase		10,70	9,70		9,20		8,70		8,2		7,7			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya		prosentase														
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		prosentase														
Program Pembinaan Anak Terlantar		prosentase														
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		prosentase														
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tercapainya UHC Kepesertaan JKN KIS				93 %		95 %		97 %		99 %		100 %			
Sasaran 2.4 Menurunnya angka Pengangguran	Prosesntase Angka Penganggura terbuka			10,56	9,11		8,47		7,87		7,31		6,79			
Program Peningkatan	Tercapainya															

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Kesempatan Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja															
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja															
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi															
Program Transmigrasi Lokal	Tercapainya Pembinaan transmigran lokal			100	100		100		100		100		100			
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Tercapainya Pembinaan di lingkungan hasil tembakau			100	100		100		100		100		100			
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja															
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Tercapainya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif															
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah															
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi															
Program Pengembangan	Tercapainya															

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah															
MISI 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan Nilai-Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun dan Beretika																
Tujuan 1 Meningkatkan Keshalehan social dan kerukunan antar dan intern umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Prosen		75 %	78 %		81 %		84 %		87 %		90 %			
Sasaran 3.1 Menurunnya kegiatan Asusila di Masyarakat	Angka penyakit masyarakat	lokasi	Berkurangn ya jumlah lokasi rawan minuman keras dan rawan prostitusi	42 lokasi	25		19		13		7		2			
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Berkurangnya jumlah lokasi rawan minuman keras dan rawan prostitusi			20 titik rawan	8		4		4		4		4			
Sasaran 2.6 Menurunnya Gesekan (Friksi) antar dan internal umat beragama	Angka Konflik Agama			0	4		3		2		2		1			
Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan																
Program Kemitraan																

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formulasi perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
pengembangan Wawasan Kebangsaan																
Sasaran 2.7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan																
Sasaran 2.8 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	poin		87	88	88,50	89,50	89,75	90							
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Penguatan cadangan pangan per 100 ton	prosentase	Jumlah cadangan pangan kabupaten/1440 ton X 100%	10,76	26,38	45,58	66,67	84,72	104,1							
	Daerah rawan pangan yang diintervensi	prosentase	Jumlah desa rawan pangan yang diintervensi / total jumlah desa rawan pangan X 100%	26,01	20	20	20	20	20							
Sasaran 2.9 Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap			77,36	80,16	81,61	83,06	84,51	85,96							
Program Pembangunan Jalan dan jembatan	Prosentase jaringan jalan kabupaten	prosentase	(Panjang jalan	45,81	49,03	52,26	55,48	60,32	63,54							

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	dalam kondisi baik		kondisi baik/ Panjang Jalan Kabupaten) x100%													
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase	prosentase	(Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / Panjang Jalan Kabupaten) x100%	5	5,35		5,56		5,77		5,98		6,14			
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Persentase jalan yang terjaga kemantapannya	Prosentase	(Panjang jalan yang terjaga kemantapannya / Panjang jalan Kabupaten) x100%	47,18	49,67		49,67		49,67		49,67		49,67			
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	prosentase	(Panjang saluran irigasi kondisi baik/ Panjang saluran irigasi	62,36	63,50		64,50		65,50		66,50		67,50			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kabupaten) x100%													
Program Pengendalian Banjir	Persentase berkurangnya luas daerah genangan akibat banjir	prosentase	(Luas daerah banjir tahun berkenaan / Luas daerah rawan banjir) x 100%	1,1	0,9		0,8		0,7		0,6		0,5			
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio ketersediaan sarana prasarana perhubungan (halte/terminal) yang layak fungsi	prosentase	(Jumlah halte/terminal yang layak fungsi / Jumlah kebutuhan (eksisting) halte/terminal) x 100%	45	50		55		60		65		70			
Sasaran 2.10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin		52,43	52,59		52,67		52,76		52,84		52,92			
Program Pengendalian dan Pencemaran	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	Prosentase		48,06	48,54		48,78		49,02		49,26		49,50			
	Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi	Prosentase		81,63	81,66		81,68		81,70		81,71		81,72			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Rumus/Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Pelaksana	
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	baku mutu															
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase SDA yang terkonservasi	Prosentase	SDA yang terkonservasi/ Total SDA yang kritis	4,5	4,5	9	9	9	9	9	9					
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luasan RTH	ha		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5					
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah dan penanganan sampah	Prosentase		6,25	12,5	22,5	40	60	70							
Sasaran 2.11 Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosentase		6,25												



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**

PENYUSUNAN
RIK RENCANA
INDUK
KELITBANGAN
KABUPATEN CIREBON

BAB

5

**Evaluasi
Pelaksanaan
Penelitian dan
Pengembangan**

Laporan Akhir
2021



5.1 EVALUASI SISTEM INOVASI DAERAH DI KABUPATEN CIREBON

Suatu kota sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi dibutuhkan suatu penyusunan kerangka kerja strategis yang dituangkan dalam bentuk roadmap. Road Map SIDA adalah disain kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan kota/kabupaten yang berbasis inovasi. Road Map ini akan mengintegrasikan jejaring institusi, baik institusi pemerintahan sektoral atau lintas sektoral, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia bisnis dan masyarakat. Pada konteks kebijakan, maka dalam Road Map SIDA disusun sebagai petunjuk arah bagi inovasi yang mendukung program-program di kota/kabupaten dan beragam peraturan terkait lainnya.

Dengan demikian penyusunan roadmap harus down up untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, walau tidak menutup kemungkinan permasalahan yang diidentifikasi bisa bersifat top down terkait dengan hasil pemikiran para pakar/akademisi dan praktisi yang diberikan kepada pengambil kebijakan. Pada akhirnya dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai rancangan awal roadmap penguatan sistem inovasi daerah.

5.1.1 Karakter Inovasi

Empat faktor kunci dari Inovasi Tataran Tata Kelola Pemerintah mencakup **karakteristik** sebagai berikut :

1) Inovasi Teknologi

- a. *Relatif*; inovasi lebih menguntungkan/ mempermudah daripada teknologi sebelumnya
- b. *Kompatibilitas*; Inovasi yg selaras dgn nilai-nilai social masyarakat
- c. *Kompleksitas* ; seberapa mmudah inovasi diterima masyarakat
- d. *Trialability*; dapat diuji cobakan di masyarakat
- e. *Observability*; dapat diadopsi masyarakat secara luas

2) Inovasi Proses Perencanaan Tata Ruang

- a. Memiliki data *consolidation plan* yang mempermudah perencanaan dan pengendalian guna lahan;
- b. Skema perencanaan multidisplin yang lebih komprehensif di bawah payung perencanaan tata ruang dan wewenang kementrian tata ruang dan lingkungan perumahan;

- c. Memanfaatkan resources bidang TI.

3) Inovasi Organisasi

- a. Mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan termasuk bisnis, otoritas, lembaga penelitian dan masyarakat
- b. Memfasilitasi semangat kewirausahaan yg melibatkan banyak pemangku kepentingan
- c. Adanya platform startegis antara pemerintah selaku provider, pengusaha sbg penggerak, pelajar –masyarakat selaku user untuk memanfaatkan teknologi teknis terbaru , dampaknya pada bisnis dan kehidupan sehari2
- d. Dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari bbg organinsasi dan individu dgn bbg tingkat tanggung jawab dan akuntabilitas

4) Inovasi Institutional

- a. Titik berat pada sistem tata kelola guna terciptanya layanan prima pada warga/kepentingan masyarakat
- b. Adanya organisasi yang memfasilitasi dan mempromosikan hasil penelitian sektor teknologi mengorganisir serta berpartisipasi aktif dalam roadshow/pameran dagang/ konferensi di tingkat nasional/ internasional

Untuk Kabupaten Cirebon berikut diperoleh karakter inovasi yang telah dilaksanakan adalah

1. Inovasi Teknologi

Inovasi di bidang teknologi sudah banyak dilakukan di Kabupaten Cirebon utamanya yang mengarah pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik namun masih minim inovasi yang menunjang peningkatan Basis Ekonomi Utama daerah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

2. Inovasi Proses Perencanaan

Dukungan peraturan yang mendasari inovasi dilakukan, namun konsolidasi data masih diperlukan antar pihak terkait (misal adanya aplikasi memudahkan investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi terrkait potensi suatu lokasi, pun pemerintah bisa memonitor perkembangan suatu area yang potensial,dst)

3. Inovasi Organisasi

Kolaborasi masih terbatas pada lingkungan internal antar SKPD/OPD, belum melibatkan banyak mitra dari pihak eksternal seperti swasta/dunia usaha, Lembaga penelitian dan masyarakat. Dunia Usaha sebagai “pemilik uang” perlu lebih banyak lagi dilibatkan dalam proses inovasi di daerah.

4. Inovasi Institusional

Inovasi Layanan prima kepada warga sudah banyak dilakukan untuk semua layanan publik sebagai media bagi masyarakat untuk memberikan ide/masukan terhadap perbaikan system layanan yang lebih baik ataupun pihak pemerintah dalam menanggapi segala persoalan masyarakat

5.1.2 Komponen Inovasi

Empat faktor kunci dari Inovasi Tataran Tata Kelola Pemerintah mencakup **karakteristik** sebagai berikut :

1) Inovasi Teknologi

- a. *Relatif*; inovasi lebih menguntungkan/ mempermudah daripada teknologi sebelumnya
- b. *Kompatibilitas*; Inovasi yg selaras dgn nilai-nilai social masyarakat
- c. *Kompleksitas* ; seberapa mmudah inovasi diterima masyarakat
- d. *Trialability*; dapat diuji cobakan di masyarakat
- e. *Observability*; dapat diadopsi masyarakat secara luas

2) Inovasi Proses Perencanaan Tata Ruang

- a. Memiliki data *consolidation plan* yang mempermudah perencanaan dan pengendalian guna lahan
- b. Skema perencanaan multidisplin yang lebih komprehensif di bawah payung perencanaan tata ruang dan wewenang kementerian tata ruang dan lingkungan perumahan;
- c. Memanfaatkan resources bidang TI

3) Inovasi Organisasi

- a. Mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan termasuk bisnis, otoritas, lembaga penelitian dan masyarakat
- b. Memfasilitasi semangat kewirausahaan yg melibatkan banyak pemangku kepentingan
- c. Adanya platform startegis antara pemerintah selaku provider, pengusaha sbg penggerak, pelajar –masyarakat selaku user untuk memanfaatkan teknologi teknis terbaru , dampaknya pada bisnis dan kehidupan sehari2
- d. Dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari bbg organinsasi dan individu dgn bbg tingkat tanggung jawab dan akuntabilitas

4) Inovasi Institutional

- a. Titik berat pada sistem tata kelola guna terciptanya layanan prima pada warga/kepentingan masyarakat
- b. Adanya organisasi yang memfasilitasi dan mempromosikan hasil penelitian sektor teknologi mengorganisir serta berpartisipasi aktif dalam roadshow/pameran dagang/ konferensi di tingkat nasional/ internasional

Untuk Kabupaten Cirebon berikut diperoleh komponen inovasi yang telah dilaksanakan adalah

1) Pembelajaran (Learning)

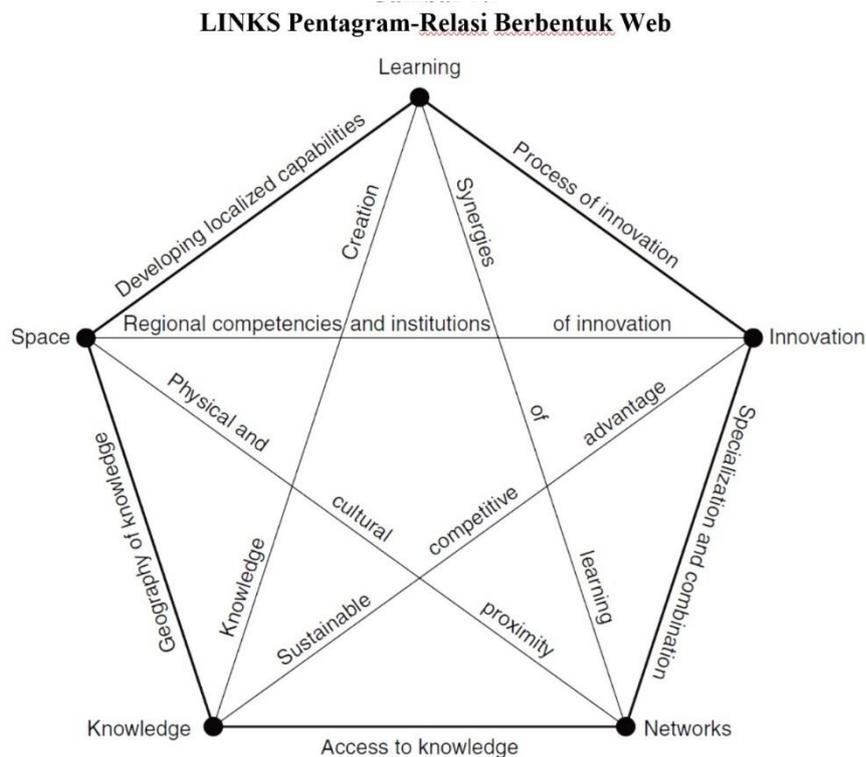
Semua pihak secara intensif diberikan media/stimulan untuk produktif dalam berinovasi agar memiliki semangat inovatif yang semakin berkembang misal melalui Inovasi Award yang lebih banyak lagi mengajak partisipasi semua pihak, tidak hanya di dilingkungan pemerintahan tapi juga masyarakat-Lembaga penelitian/institusi Pendidikan- dunia usaha. Pemerintah disini lebih berperan sebagai fasilitator

2) Jejaring (Network)

Kunci dari penciptaan Kota/Kabupaten yang inovatif adalah melalui pendekatan holistic yang dimodelkan konsep quadruple helix (pemerintah-bisnis-universitas&Lembaga penelitian – warga). Kabupaten Cirebon perlu media/wadah yang lebih banyak yang mempertemukan antar pihak untuk kolaborasi inovasi di daerah.

Gambar 5.1

Empat (4) Komponen dari Inovasi pada Tata Kelola Pemerintahan



Sumber: Rutten, 2003.

3) Penguasaan Pembelajaran (Knowledge)

Dukungan adanya program-program berkaitan dengan pengetahuan yang terbaru berperan besar bagi pengembangan inovasi di Cirebon, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sebagai bentuk investasi di masa depan

4) Spatial (Keruangan)

Masih diperlukan lebih banyak menerapkan hal-hal yang inovatif dalam jangkauan yang lebih kecil (sampai ke tingkat desa/kelurahan tentang system yang sebelumnya bersifat konvensional diubah mengikuti trend perkembangan teknologi

5.1.3 Input dan Proses Sistem Inovasi Daerah

Input dan proses dari Inovasi Daerah, mencakup sebagai berikut :

URBAN FIRMS

Kunci utama INOVASI daerah/kota adalah **BISNIS UTAMA /ECONOMIC BASED** yang mencakup 4 komponen yaitu **1) asset ; 2) pasar; 3) jaringan dan 4) institusi**

URBAN ASSETS

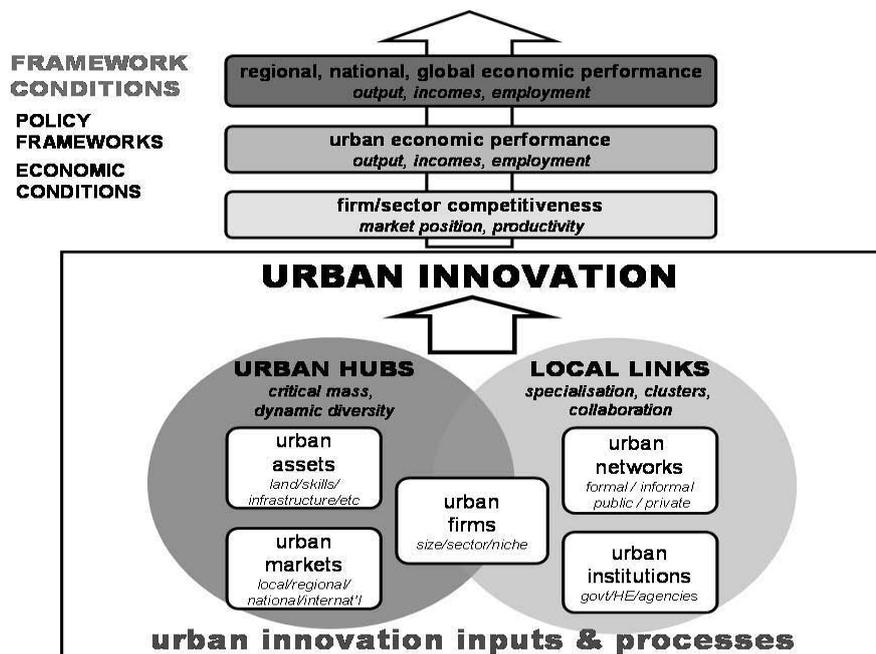
Basis aktivitas inovasi dan perfoma tingkat kompetitif yang dimiliki - utamanya dominan, spesialisasi pekerja, infrastruktur transportasi kepadatan activity (aspek masyarakat sebagai tujuan sangat terbatas dibahas)

URBAN MARKETS

1. Jangkauan pasar dari basis aktivitas ekonomi yang dimiliki wilayah/kota
2. Akses ke pasar local, nasional dan internasional

Gambar 5.2

Input dan Proses Inovasi Daerah



URBAN NETWORKS

- Jejaring yang mendukung rantai pasokan antara perusahaan dan pemasoknya. Misal Industri fashion, akan sangat terbantu dengan peran sector informal lokal dalam mengembangkan konsep desain yang lebih beragam

- Jejaring pengetahuan juga dibutuhkan dalam rangka sharing ide dan kolaborasi

URBAN INSTITUTIONS

- Institusi secara umum di suatu daerah menyangkut institusi privat atau public, mencakup pemerintah, universitas, Lembaga Riset atau Lembaga Pendidikan yang lebih tinggi/setara
- Institusi publik utamanya membantu problem kordinasi, dukungan kebijakan yang memudahkan untuk mensupport perkembangan bisnis utama wilayah/urban firms

5.1.4 Penyelenggaraan Inovasi

Terbitnya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2020 tentang pengusulan inisiatif, penilaian dan pemberian insentif inovasi daerah di Kabupaten Cirebon menjadi dasar bagi pelaksanaan inovasi pada tataran kolektif dan organisasional yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah, dengan semangat menggerakkan seluruh OPD untuk berinovasi . Membiasakan diri dengan melihat fenomena di lingkungan OPD masing-masing, menggali masalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPDnya serta belanja ide dari berbagai sumber inovasi di berbagai saluran/media dijadikan sebagai budaya baru dalam berinovasi di Kabupaten Cirebon.

Berikut inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Cirebon sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 5.1 Kondisi Inovasi yang telah dilakukan Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan
1.	Sekretariat DPRD	2
2.	Inspektorat	4
3.	Dinas Pendidikan	6
4.	Dinas Kesehatan	6
5.	Dinas PUPR	5
6.	Dinas Perumahan	10
7.	Dinas Pemadam	2
8.	Dinas Sosial	4
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Trasn migrasi	2
10.	Dinas Ketahanan Pangan	8
11.	Dinas P2KB3A	8
12.	Dinas Pertanian	4

13.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4
14.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10
15.	Satpol PP	3
16.	Dinas LH	3
17.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4
18.	Dinas KUMKM	2
19.	Dinas Perhubungan	6
20.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	6
25.	Bappelitbangda	10
26.	BKAD	16
27.	Bappenda	22
28.	Bagian Organisasi	2
29.	Diskominfo	9
30.	Sekretariat Daerah	8
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
33.	RSUD Waled	3
34.	Kecamatan	5
	Total	201

Sumber : BappelitbangDa Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 5.2 Rincian Inovasi yang telah dilakukan Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
1	Website Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD
2	Sistem Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
3	Website Inspektorat	Inspektorat
4	SIM Pengawasan	Inspektorat
5	Whistleblowing System	Inspektorat
6	Digitalisasi Data Arsip LHP & Kasus	Inspektorat
7	Website Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
8	Sistem informasi dapodik	Dinas Pendidikan
9	Sim laporan individu sekolah	Dinas Pendidikan
10	PPDB Online SMP	Dinas Pendidikan
11	BOSDA	Dinas Pendidikan
12	EDI BOS 2020	Dinas Pendidikan
13	Website Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
14	Sim rujukan kab.cirebon	Dinas Kesehatan
15	SIM laporan fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan
16	Sistem izin praktek SDM	Dinas Kesehatan
17	Sistem pendaftaran pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
18	Pelayanan Covid Sistem Sigap Cepat Eman Rakyat (Cov-SICERIA)	Dinas Kesehatan
19	Website Dinas PUPR	Dinas PUPR
20	Sistem Informasi sarana prasarana jalan dan jembatan	Dinas PUPR
21	Sistem informasi sarana prasarana sumber daya air	Dinas PUPR
22	Sistem informasi sarana prasarana cipta karya	Dinas PUPR
23	Sistem informasi pengawasan penataan ruang	Dinas PUPR
24	Website Dinas Perumahan	Dinas Perumahan
25	SIM Perumahan	Dinas Perumahan
26	SIM SPAM (Sistem Pelayanan Air Minum)	Dinas Perumahan
27	SIM untuk Pengelolaan Air	Dinas Perumahan

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
	Limbah	
28	SIM Bangunan Gedung ber IMB/SLF	Dinas Perumahan
29	SIM Infrastruktur Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan
30	SIM Pertanahan	Dinas Perumahan
31	Program Daerah Sertifikat Tanah	Dinas Perumahan
32	Inventarisasi data aset penyusunan database perumahan di kabupaten cirebon	Dinas Perumahan
33	Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemda yang Dimohon SKPD serta Updating Database Pertanahan	Dinas Perumahan
34	Website Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam
35	SIM Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam
36	Website Dinas Sosial	Dinas Sosial
37	SIM SLRT	Dinas Sosial
38	SIM PMKS	Dinas Sosial
39	Aplikasi e-akreditasi	Dinas Sosial
40	Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang terintegrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
41	Penerbitan AK.1 (kartu pencari kerja) secara online	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	Website Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
43	Sistem Informasi Komuditas Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
44	Sim Harga Produk Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
45	SIM Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
46	KEGIATAN PANGAN Automatic pesticide meter (Gg SAR)	Dinas Ketahanan Pangan
47	Alfatoksin Reader Instrumen	Dinas Ketahanan Pangan
48	OPAL (Obor Pangan Lestari)	Dinas Ketahanan Pangan
49	Pengembangan Modal KRPL Kawasan Rumah	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
	Pangan Lestari	
50	Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dan Pencapaian Pola PPH konsumsi dalam upaya mewujudkan Cirebon bebas rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
51	Website Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A
52	SIM P2KBP3A	Dinas P2KBP3A
53	PIK Remaja Mandiri	Dinas P2KBP3A
54	Kelompok KB Pria Mandiri	Dinas P2KBP3A
55	Kampung KB	Dinas P2KBP3A
56	Pembentukan Satuan Tugas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Dinas P2KBP3A
57	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Dinas P2KBP3A
58	SIKLA (Sistem Informasi KLA)	Dinas P2KBP3A
59	Website Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
60	SIM Pertanian	Dinas Pertanian
61	Pemberdayaan masyarakat dalam pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban	Dinas Pertanian
62	Pemeriksaan sapi betina produktif di RPH	Dinas Pertanian
63	Optimalisasi pelayanan pemeriksaan antemortem dan postmortem melalui jaringan informasi paguyuban rumah potong hewan Battebat	Dinas Pertanian
64	Website Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
65	Sistem Informasi Bisnis Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
66	Sistem Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
67	Sistem Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
68	Website Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
69	Sim RPAS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
70	SIM Tera	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
71	Website Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
72	Sim Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
73	Sim Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
74	Sim Metrologi legal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
75	Sim informasi Surat Menyurat SKPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
76	SIM Infomrasi Kebutuhan Pokok Masyarakat	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
77	Pusat Kuliner Sumber	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
78	Website Satpol PP	Satpol PP
79	SIM Satpol PP	Satpol PP
80	Call Center Satpol PP	Satpol PP
81	Website Dinas Lingkungan Hidup	Dinas LH
82	SIM Ijin Lingkungan	Dinas LH
83	SIM Pengendalian Lingkungan	Dinas LH
84	Website Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
85	Sim eKTP	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
86	Sim Akta online	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
87	Sim Sintren	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
88	Website Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas KUMKM
89	SIM KUKM	Dinas KUMKM
90	Website Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
91	Aplikasi Uji KIR	Dinas Perhubungan
92	SIM Perhubungan	Dinas Perhubungan
93	SIM Penerimaan Parkir	Dinas Perhubungan
94	SIM Penerimaan Retribusi	Dinas Perhubungan
95	Parkir Berlangganan	Dinas Perhubungan
96	Website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
97	SIM Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
98	SIM Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
99	SIM Pemuda	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
100	SIM Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
101	Website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
102	Aplikasi perpustakaan digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
103	SIM Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
104	Digitalisasi Arsip Statis (arsip/naskah sejarah)	Dinas Kearsipan dan

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
	Cirebon)	Perpustakaan
105	Motor perpustakaan keliling	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
106	Layanan sabtu-minggu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
107	Gerakan Literasi Daerah Terpadu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
108	Layanan e-book	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
109	Otomasi Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
110	Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
111	Aplikasi perizinan online Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
112	Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
113	SIM Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
114	Pembentukan dan Pembinaan Model Desa PRIMA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
115	Aplikasi Siap Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
116	LPPD (Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
117	LKPPD (Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
118	LBPD (Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
119	Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
120	SIM Dashboard Kepegawaia	Badan Kepegawaian dan

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
		Pengembangan Sumber Daya Manusia
121	Sim Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
122	Sim Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
123	Sim Informasi SKP Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
124	SIM Absensi Online	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
125	Website Bappelitbangda	Bappelitbangda
126	e-perencanaan (sistem Informasi Perencanaan Daerah)	Bappelitbangda
127	Sim Produk Unggulan Desa	Bappelitbangda
128	SIM dapok	Bappelitbangda
129	Sim Informasi Sarana dan Prasarana Pokok	Bappelitbangda
130	Sim Pembangunan	Bappelitbangda
131	Sim Pembangunan Kemiskinan	Bappelitbangda
132	Sim Informasi Monitoring	Bappelitbangda
133	Sim informasi Surat Menyurat SKPD	Bappelitbangda
134	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda
135	Website BKAD	BKAD
136	SIPKD (sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	BKAD
137	Sim BMD	BKAD
138	SIM Dashboard Keuangan	BKAD
139	Sistem Barang Kab.Cirebon	BKAD
140	Transformasi Layanan Melalui Penjaminan	BKAD

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
	Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	
141	PETERPAN (Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Penyediaan Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan) di Kabupaten Cirebon	BKAD
142	SIREBON (Sistem Informasi Rekonsiliasi Perbendaharaan Online untuk SKPD di Kabupaten Cirebon)	BKAD
143	Sistem Informasi Rekonsiliasi Aplikasi STS Online (SIRISOL)	BKAD
144	Sistem Informasi Rekonsiliasi Online SKPD (SIRAOS)	BKAD
145	Aplikasi SIRUP CILOK (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Cirebon Lokal)	BKAD
146	Sistem Verifikasi Keuangan Online	BKAD
147	APLIKASI BARIDIN (Bayar Retribusi Daerah Online)	BKAD
148	Pengembangan SIKATON (Sistem Keuangan dan Akuntansi Online)	BKAD
149	Pengembangan E-Verifikasi SPM	BKAD
150	SIM JKN (Sistem Informasi Manajemen Jaminan Kesehatan Nasional)	BKAD
151	Website Bappenda	Bappenda
152	SISMIOF	Bappenda
153	SMART MAP	Bappenda
154	H2H PBB	Bappenda
155	I-PBB	Bappenda
156	WEB SIG PBB	Bappenda
157	I PAD	Bappenda
158	POS PBB	Bappenda
159	e-BPHTB	Bappenda
160	e-SSPB	Bappenda

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
161	SIMPAD	Bappenda
162	H2H BPHTB	Bappenda
163	e-SPTPD	Bappenda
164	H2H PDL	Bappenda
165	EIS	Bappenda
166	H2H Disduk Capil	Bappenda
167	H2H ATR/BPN	Bappenda
168	H2H DPMTSP/Perijinan	Bappenda
169	H2H KPP Pratama	Bappenda
170	E-Signature	Bappenda
171	Sistem informasi pelaporan pajak daerah online	Bappenda
172	Optimalisasi Penyusunan Data Potensi Pajak Daerah Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Potensi Pajak Daerah (SIPJEH)	Bappenda
173	Sim laporan kinerja pemerintahan	Bagian Organisasi
174	Sim informasi pelayanan	Bagian Organisasi
175	Sim Direktori	Diskominfo
176	Sim Pemkab	Diskominfo
177	Sim Direktorat	Diskominfo
178	Sim Email Pemkab	Diskominfo
179	Sim PPID	Diskominfo
180	Sim Pembangunan	Diskominfo
181	SIM Laporan	Diskominfo
182	Sim Laporan Kinerja Pemerintahan	Diskominfo
183	Sim Informasi Pelayanan	Diskominfo
184	Sim laporan kinerja pemerintahan	Sekretariat Daerah
185	Sistem informasi pelayanan	Sekretariat Daerah
186	Sistem Informasi Manajemen	Sekretariat Daerah

No.	Inovasi yang Dihasilkan	OPD Pelaksana
	Pengadaan barang dan Jasa	
187	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan lokal	Sekretariat Daerah
188	Sistem Pelaporan Pengadaan	Sekretariat Daerah
189	Data Pengadaan	Sekretariat Daerah
190	Layanan pendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Sekretariat Daerah
191	Podcast Sisi Bunda	Sekretariat Daerah
192	APLIKASI SIORMAS (SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
193	EWS (Early Warning System)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
194	SIKAMU (sistem kendali administrasi umum) RSUD Arjawinangun	RSUD Waled
195	Pereseapan Obat Elektronik	RSUD Waled
196	Laporan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Elektronik (PPI Elektronik)	RSUD Waled
197	GEMPOL BERSEHATI GEMPOL : Gerakan Memberi Pelayan Profesional BERSEHATI : Bersih, Sehat, Aman, Tertib, dan Indah	Kecamatan
198	Pengembangan Mobile Aplikasi Kecamatan	Kecamatan
199	SICEPAK PLUS	Kecamatan
200	PPOB	Kecamatan
201	SAMSAT DELIVERY	Kecamatan

Sumber : BappelitbangDa Kabupaten Cirebon,2021

5.2 EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN KABUPATEN CIREBON

Evaluasi pelaksanaan penelitian diharapkan dapat mengetahui kajian penelitian apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Cirebon dalam kurun 5-6 tahun terakhir. Kemudian hasil analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisa gap, yang dibandingkan dengan isu faktual di lapangan serta

VISI dan MISI pembangunan di Kabupaten Cirebon sebagai dasar kebijakan. Berdasarkan database penelitian Kabupaten Cirebon tahun 2015-2021 bahwa jumlah penelitian yang telah dilakukan oleh Kabupaten Cirebon telah dilakukan sebanyak 26 penelitian baik yang keseluruhan dilakukan instansi pemerintah.

Tabel 5.3 Tema Penelitian yang telah dilakukan Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2021

Tahun	Nama Penelitian	OPD Pelaksana
2021	Kajian Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cirebon	BappelitbangDa
2021	Kajian Identifikasi dan Penentuan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Cirebon	BappelitbangDa
2020	Kajian Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan di Kecamatan Kedawang Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon	BappelitbangDa
2020	Kajian Beban Pencemar Das Jamblang	Dinas Lingkungan Hidup
2020	Kajian Beban Pencemar Das Cipager	Dinas Lingkungan Hidup
2019	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Potensi Ketersediaan Air Tanah Zonasi Perumahan Kabupaten Cirebon	Dinas Lingkungan Hidup
2019	Kajian Peningkatan Kapasitas Desa dan pengembangan produk unggulan setiap desa	Bappelitbangda
2019	Penelitian Kajian Potensi Peluang Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2018	Kajian Pengembangan Benih Ternak Domba Unggul	Bappelitbangda
2018	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dinas Lingkungan Hidup
2018	Kajian Produk Unggulan Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Setiap Desa	Bappelitbangda
2018	Penyusunan Background study dan kajian	Bappelitbangda

Tahun	Nama Penelitian	OPD Pelaksana
	Teknokratik sektor Air minum, air limbah, sanitasi dan lingkungan hidup	
2018	Penyusunan Background study dan kajian Teknokratik sektor sarana prasarana transportasi dan pengelolaan sumber daya air	Bappelitbangda
2017	Kajian dampak abrasi terhadap ekosistem pesisir dan laut	Dinas Lingkungan Hidup
2017	Kajian Daya dukung lahan industri di kabupaten Cirebon	Dinas Lingkungan Hidup
2017	Kajian Green Economy	Bappelitbangda
2017	Kajian Pembentukan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2016	Kajian dan Fasilitasi HKI merk bagi Pelaku usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2016	Kajian dampak abrasi terhadap ekosistem pasir laut	Dinasl Lingkungan Hidup
2016	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Dinas Lingkungan Hidup
2016	Kajian Pengembangan Wilayah	Bappelitbangda
2016	Kajian Masterplan Pembangunan di Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda
2016	Kajian Pemetaan Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon	Bappelitbangda
2016	Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2016	Kajian Hutan Kota Fungsi Lindung	Sekretariat Daerah

Tahun	Nama Penelitian	OPD Pelaksana
2015	kajian lingkungan hidup strategis	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : BappelitbangDa Kabupaten Cirebon, 202

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penelitian untuk **pertumbuhan ekonomi** dan **daya dukung lingkungan** menjadi fokus utama dalam kegiatan penelitian yang ada di Kabupaten Cirebon, hal ini dilakukan untuk mengakomodasi misi RPJMD Kabupaten Cirebon yaitu salahsatunya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ekonomi sehingga dapat tercipta masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera. Selain itu, tema penelitian yang dilakukan antara lain pengembangan pelayanan masyarakat. Akan tetapi, pada penelitian yang sudah ada di Kabupaten Cirebon masih banyak yang belum mengakomodasi mengenai isu faktual yang ada di Kabupaten Cirebon terutama masalah isu kewilayahan, tata ruang, pengembangan basis ekonomi utama Kabupaten Cirebon dan perlunya pendalaman terkait tantangan pembangunan yang ada.

5.3 ANALISA GAP, MAPPING DAN TREND DAN TANTANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL

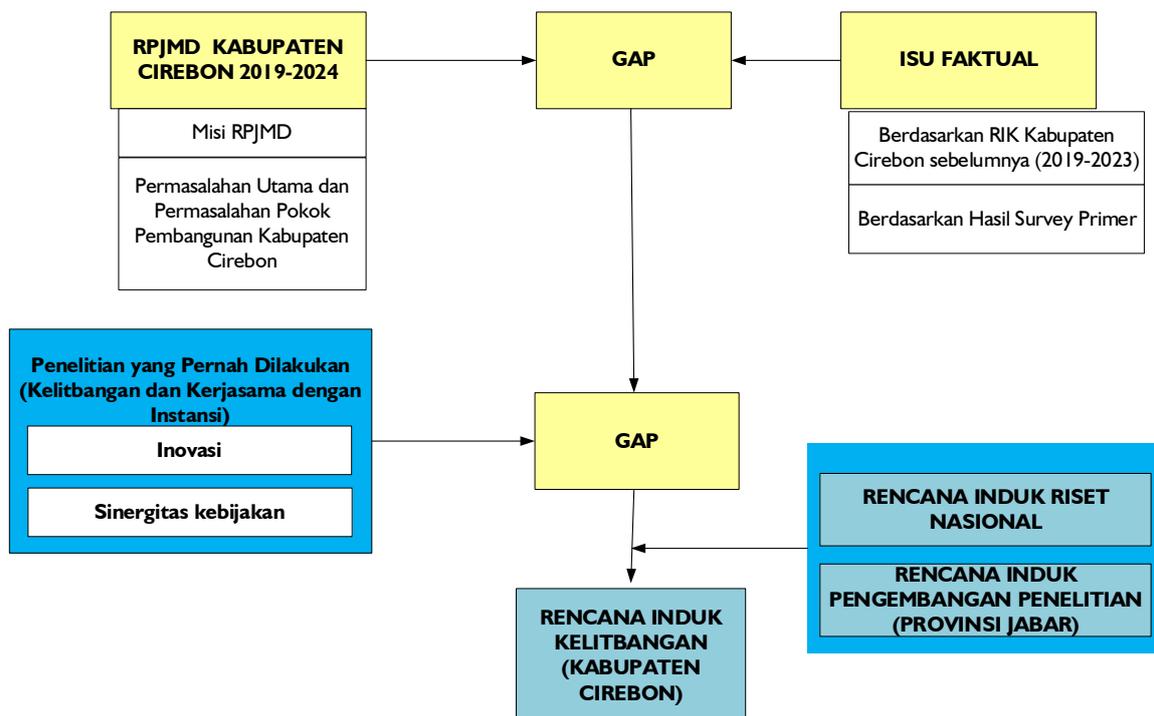
Analisis yang dilakukan diharapkan dapat mengetahui kesenjangan antara permasalahan yang aktual dengan program RPJMD Kabupaten Cirebon. Melalui analisa ini dapat diketahui beberapa permasalahan yang belum terakomodir agar kemudian dapat diakomodir dan menjadi usulan untuk dilakukan. Selain melihat hal yang diperlukan pada analisa ini juga diperoleh potensi dan permasalahan berdasarkan isu faktual yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang muncul dari kondisi tersebut dan bagaimana potensi yang akan muncul. Identifikasi terhadap suatu permasalahan menjadi penting untuk melihat bagaimana potensi yang akan muncul dari kondisi tersebut. Identifikasi terhadap suatu permasalahan menjadi penting untuk melihat bagaimana suatu permasalahan dapat berimplikasi terhadap hal lainnya. Sama halnya melihat potensi menjadi hal yang penting untuk melihat potensi yang dapat dikembangkan dari suatu kondisi. Untuk lebih memahami analisa tersebut berikut pada gambar 5.3 dibawah merupakan kerangka framework analisis Gap penelitian.

Hasil dari penjabaran tersebut dapat diketahui mengenai gap penelitian di Kabupaten Cirebon. Representasi dari framework analisis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang telah dikaitkan dengan kondisi faktual di Kabupaten Cirebon

1. Peran Kabupaten Cirebon dalam pengembangan KEK Rebana Metropolitan
2. Pembangunan Jalan Tol Cipali dan Palimanan juga Pelabuhan Patimban
3. Pemantapan pemahaman dan pengamalan keagamaan;
4. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;
5. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan;
6. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan;
7. Ketahanan Pangan;
8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;
9. Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup;
10. Pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah belum optimal;
11. Investasi Daerah;
12. Apresiasi dan pengembangan pariwisata dan budaya daerah.

Gambar 5.3

Framework Analisis Gap Penelitian



Kondisi faktual yang ada tersebut didukung dengan data dari RPJMD dan beberapa dokumen kajian yang telah ada. Pemilihan kondisi faktual tersebut disesuaikan dengan isu yang sedang berkembang saat ini dan berdampak penting pada kondisi Kabupaten Cirebon. Diharapkan melalui identifikasi gap yang dilakukan dapat diketahui hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan dan menjawab beberapa kondisi faktual tersebut. Berdasarkan kerangka

tersebut dapat diketahui gap penelitian yang telah dilakukan dengan isu faktual yang ada di Kabupaten Cirebon yaitu mengenai isu kewilayahan, tata ruang dan infrasatruktur dalam menunjang peran Kabupaten Cirebon.

5.4 ANALISA KESESUAIAN USULAN KEBUTUHAN LITBANG DAN PROGRAM/KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui usulan penelitian yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya, dimana usulan yang diberikan telah dikaitkan dengan isu faktual yang ada di Kabupaten Cirebon dan Kebijakan RPJMD Perubahan tahun 2019-2024. Berikut merupakan rincian usulan penelitian berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan maupun pembahasan laporan akhir pada setiap SKPD/OPD di Kabupaten Cirebon

Tabel 5.4 Usulan Kebutuhan Penelitian berdasarkan Isu Masalah RPJMD Kabupaten Cirebon

Isu Utama RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019-2024	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian peningkatan SDM pelayanan publik • Kajian penilaian efektivitas SKPD berdasarkan capaian kinerja antara target dan rencana • Kajian Peningkatan Dokumentasi Penelitian dan Pengembangan • Kajian kepemilikan data kependudukan • Kajian aplikasi integrasi <i>single databased</i> di setiap OPD/SKPD/kecamatan • Kajian kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat • Faktor yang mempengaruhi aspek pelayanan Kesehatan • Kajian penyediaan sarpras Kesehatan masyarakat • Penggunaan system informasi layanan Kesehatan berbasis mobile (Policy Paper) • Kajian Perencanaan pelaksanaan tata Kelola TI dalam meningkatkan pelayanan masyarakat secara digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Disarsipus, Disdukcapil, Diskimrum, Kecamatan, Bappelit-bangda, BKAD, Diskominfo

Isu Utama RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019- 2024	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Pelayanan Publik pemberian pengetahuan kepada pedagang pasar melalui pelatihan, pendampingan dan program lainnya untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing antar pedagang pasar rakyat • Pengkajian tentang cyber marketing produk Kabupaten Cirebon • Pengkajian tentang pengembangan fixed broadband lingkup pemerintah daerah • Pengkajian voting kepala daerah • Updating Dokumen Roadmap Penguatan SIDA • Memfungsikan peran tim koordinasi penguatan SIDA • Melakukan pengukuran pelaksanaan program kelitbangan SIDA • Apresiasi keInovasian tingkat OPD/SKPD 	
Pengguguran dan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Indeks Pembangunan Manusia • Kajian standar biaya pendidikan tiap kecamatan • Pengaruh tingkat kesejahteraan guru dengan tingkat kualitas mengajar • Kajian Strategis penurunan angka pengangguran (Ka) • Kajian evaluasi dan prioritas program penurunan angka kemiskinan (Ka) • Pengembangan kualitas SDM Kabupaten Cirebon melalui model pelatihan dan magang (Naskah akademik/Model) • Pengembangan pusat belajar masyarakat • Pengkajian aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informatika dan komunikasi • Kajian strategi peningkatan kualitas pelaku olahraga prestasi • Pengkajian peningkatan aktivitas kepemudaan • Pengkajian peningkatan wirausaha kepemudaan • Pengkajian dan pengembangan kegiatan pemuda untuk meningkatkan kohesi 	Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas ketahanan pangan, Dinas Kesehatan, Bappelit-bangda

Isu Utama RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019- 2024	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
	sosial dan ketahanan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model seni pertunjukan daerah • Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM • Pengembangan pola kemitraan antara UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) • Peningkatan SDM pelaku usaha UMKM (rotan, dst) • Kajian kualitas dan pengaruh Pendidikan bagi pelaku usaha UMKM 	
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Strategi peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidik • Kajian usaha harapan sekolah di Kabupaten Cirebon • Kajian ketersediaan dan kualitas tenaga kerja • Peningkatan kapasitas ahli IT melalui training dan sekolah • Kajian faktor yang mempengaruhi aspek pelayanan kesehatan • Kajian peningkatan SDM pelayanan Kesehatan • Kajian Pelayanan Usaha Kesehatan Masyarakat • Kajian Pelayanan Kesehatan Masyarakat berbasis IT (e-health) • Kajian Penyediaan Sarpras Kesehatan Masyarakat • Kajian Peningkatan Akreditasi Puskesmas melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) • Kajian Kesadaran Masyarakat untuk Memiliki Jaminan Kesehatan • Kajian Peningkatan Kepesertaan Masyarakat dalam Imuniasi Penyakit Dasar • Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular berbahaya (HIV/AIDS, TB Paru dan DBD) • Kajian strategi peningkatan kesadaran masyarakat tentang makanan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan, DPPKBP3A, Kesbangpol, Bappelitbangda

Isu Utama RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019- 2024	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
	<p>bergizi baik dalam rangka mengurangi prevalensi penyakit tidak meular (generatif)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian penganggulangan stunting/gizi buruk • Penggunaan media social dan media komunikasi lain sebagai media edukasi (Policy paper) • Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam penurunan tingkat kematian ibu dan bayi (2) • Pengkajian untuk pengembangan model akses dan pelayanan peserta KB • Kajian peran serta pemuda dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga • Kajian peningkatan pelayanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan 	
<p>Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kelompok binaan kegiatan PKK • Kajian optimalisasi lapangan kerja untuk perempuan/ ibu rumah tangga • Kajian peningkatan potensi lapangan kerja baru • Kajian pemetaan kualifikasi pencari kerja baru • Strategi peningkatan kualitas tenaga kerja • Promosi wisata budaya khas Cirebon (batik, rotan,dst.) • Kajian pemetaan penyedia bahan baku rotan, batik, dst. • Kajian pelaku usaha rotan, batik, dst. • Kajian pengembangan ekspor Kabupaten Cirebon • Kajian pemetaan jenis dan kapasitas potensi ekonomi lokal di Kabupaten Cirebon • Pengembangan model inkubasi wirausaha • Pendampingan/pelatihan peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masyarakat • Dinas Sosial • Disbudparpora, Kecamatan, Disperdagin, Bappelitbangda

Isu Utama RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019-2024	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
	<p>kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian strategi peningkatan jumlah wirausaha baru • Kajian pengembangan kreativitas ekonomi masyarakat • Kajian strategi daerah tertinggal untuk upaya pemerataan ekonomi • Kajian pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat dan kswadayaan (integrasi ekonomi hulu-hilir) • Kajian sistem informasi industri di Kabupaten Cirebon untuk mempermudah kordinasi antara industri dan pemerintah Kabupaten Cirebon • Pengkajian strategi peningkatan investasi daerah • Pengkajian model promosi untuk peningkatan investasi daerah • Pengembangan sistem pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi daerah 	
<p>Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian pengembangan Wilayah Tuparev dalam menunjang pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana • Kajian percepatan pembangunan desa di kawasan perkotaan • Kajian pembangunan berbasis desa dan kawasan • Pemberdayaan kreativitas masyarakat desa • Pengkajian pengembangan pasar desa • Pengkajian pengembangan BUMDesa sebagai pilar ekonomi desa • Pengkajian standarisasi dan pengukuran kinerja BUMDEs • Pengkajian Pusat Bisnis Desa • Kajian upaya peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) • Pengkajian standarisasi dan pengukuran kinerja Pemerintah Desa • Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa dengan mengoptimalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • BPMD, Kecamatan, Bappelit-Bangda • Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Isu Utama RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019-2024	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
	peran Kelompok Informasi Masyarakat	
Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Strategi Penciptaan Lingkungan Investasi yang nyaman dan aman bagi Investor (jaminan keamanan di lingkungan industri/ basis ekonomi utama) Kabupaten Cirebon • Kajian pemanfaatan trototar dan sempadan jalan sebagai area berdagang oleh PKL; • Kajian penanganan penyakit masyarakat melibatkan peran serta masyarakat dalam rfangka kewaspadaan dini masyarakat di tingkat kecamatan • Kajian pendayagunaan potensi ORMAS melalui ORMAS Award untuk mendorong ormas berkegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP, DPPKBP3A, BPBD, Dinas Damkar
Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian pengembangan akses untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Cirebon • Kajian Keintegrasian Infrastruktur dalam menunjang pusat-pusat pertumbuhan (pelabihan-penmbangkit listrik - perumahan • Kajian kesesuaian lahan dalam penataan perkotaan • Kajian kapasitas infrastruktur perkotaan (termasuk jaringan prasarana dan jembatan) • Kajian optimalisasi pengembangan infrastruktur wilayah • Kajian kolaborasi desa-kota • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat khususnya daerah kumuh • Pengkajian aspek legal tentang penanganan perlindungan tanaman jalur hijau • Kajian penataan drainase Kabupaten Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskimrum, DPUPR, Bappelit-bangda, Dinas PUPR

Isu Utama RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019- 2024	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
<p>Penanganan Pandemi Covid 19 dan dampaknya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian refocusing anggaran belanja daerah untuk penanganan Covid19 • Kajian penguatan peran media massa dalam penyebaran informasi akurat ke masyarakat terkait Pandemi Covid 19 termasuk dalam meng counter informasi tidak benar (hoax) • Strategi penguatan pemanfaatan teknologi pemberitaan (digital dan konvensional) bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang kredibel dari pemerintah • Kajian strategi penguatan SDM ketenagakerjaan melalui upskill training berkala sektor UMKM maupun sektor terdampak lainnya selama dan pasca pandemi • Kajian prospek ekonomi digital dalam rangka penyesuaian dan penguatan UMKM selama dan pasca pandemi • Kajian penguatan sistem pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan dalam kondisi khusus pandemi Covid 19 • Kajian penyesuaian modal sosial dan kearifan lokal di masyarakat selama dan pasca pandemi • Kajian pemanfaatan pekarangan sebagai tempat berkebun untuk meningkatkan kesejatan dan ketahanan pangan rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Diskominfo, PMI • Dinas Sosial • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Ketenagakerjaan
<p>Komitmen penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian ketersediaan dan penyediaan air tanah (diluar Zonasi Perumahan) • Kajian penurunan air tanah • Kajian Alih fungsi lahan dan hutan • Kajian Kelangkaan air baku • Kajian Penggunaan pupuk berlebihan • Reklamasi bekas tambang • Pembuangan limbah industri /RT langsung ke laut • Limbah industry batu alam, batik dan sejenisnya yang belum mendapat solusi dan penanganan tepat • Banjir di Cirebon bagian Timur dan daerah perbukitan bagian selatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbangda, DPUPR, DLHD

Isu Utama RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon 2019-2024	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum banyak penjagaan lingkungan yang bersifat kolaboratif-konstruktif • Kajian kesesuaian lahan dalam penataan wilayah • Kajian kapasitas infrastruktur perkotaan dan wilayah • Kajian IPAL terpadu • Kajian peningkatan kualitas rumah layak huni • Kajian pemetaan dan kapasitas sumber air Kabupaten Cirebon • Kajian peningkatan kualitas dan jaringan air minum masyarakat • Kajian peningkatan akses sanitasi untuk masyarakat • Pengembangan jaringan air untuk peningkatan produksi pertanian • Kajian pembangunan embung di setiap kawasan pertanian rawan air • Pengkajian kearifan lokal terkait perlindungan lingkungan hidup • Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup 	

Usulan Kebutuhan Penelitian berdasarkan Pengembangan Basis Ekonomi Kabupaten Cirebon

Sektor Ekonomi	Usulan Penelitian	OPD Pelaksana
Industri Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pengembangan Perizinan berbasis Online One Stop Service (perizinan lokasi, lingkungan dan IUKU/IPKI) • Kajian strategi peningkatan komoditas ekspor • Pengkajian strategi peningkatan produk lokal kedalam pasar modern • Pengkajian pengembangan model promosi produk unggulan ke pasar Nasional dan Internasional • Pengkajian dan pengembangan klinik HAKI • Pengkajian strategi modernisasi industri di 	<ul style="list-style-type: none"> • Disperdagin, DPMPSTSP

	<p>Kabupaten Cirebon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian dan pemetaan sarana dan prasarana industri • Pengembangan standarisasi hasil industri Kabupaten Cirebon (Naskah Akademik) • 	
<p>Pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian pengembangan pariwisata berbasis kawasan • Kajian strategi pengembangan potensi destinasi wisata baru • Kajian pengembangan model kunjungan dan atraksi wisata baru berbasis kearifan lokal • Kajian pengembangan wisata berbasis alam • Pengembangan destinasi wisata digital berbasis industri kreatif • Kajian strategi pengembangan wisata kuliner, religi, sejarah budaya dan batik • Kajian analisa sarana prasarana obyek pariwisata Kabupaten Cirebon • Kajian pengembangan Desa Agrowisata, Desa Agrobisnis dan Agro industri • Kajian pemetaan pengembangan model PKL untuk peningkatan kualitas pariwisata daerah 	<p>Disbudparpora, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>
<p>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Sistem Informasi Manajemen Pertanian • Kajian pengembangan varietas baru hasil pertanian • Pengembangan model tumpang sari pertanian tanaman hortikultura • Pengembangan pengolahan hasil pertanian • Pengkajian dan pengembangan hasil perikanan • Sosialisasi dan promosi konsumsi perikanan • Pengembangan pembudidayaan dan pembenihan ikan • Pengkajian penyakit hewan • Pengkajian dan Pengolahan gizi dan pakan ternak • Kajian pemetaan untuk antisipasi daerah rawan pangan • Peningkatan kualitas pangan olahan • Pengembangan kemitraan usaha 	<p>Dinas Pertanian, Dislakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p>



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**

PENYUSUNAN
RIK RENCANA
INDUK
KELITBANGAN
KABUPATEN CIREBON

BAB

6

**KONSEP STRATEGI
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN CIREBON
2019-2024**

Laporan Akhir

2021



6.1 KONSEP STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN CIREBON

Demikian mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon, maka diperlukan usulan penelitian dan tinjauan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Cirebon. Strategi penelitian dan pengembangan dilakukan berdasarkan identifikasi isu permasalahan pembangunan Kabupaten Cirebon, evaluasi kegiatan penelitian serta usulan judul penelitian kedepan. Strategi yang telah disusun juga telah disesuaikan berdasarkan usulan OPD pelaksana pembangunan, pemangku kepentingan dan juga rekomendasi dari penyusun.

Konsep strategi kegiatan penelitian dan pengembangan yang diusulkan yaitu :

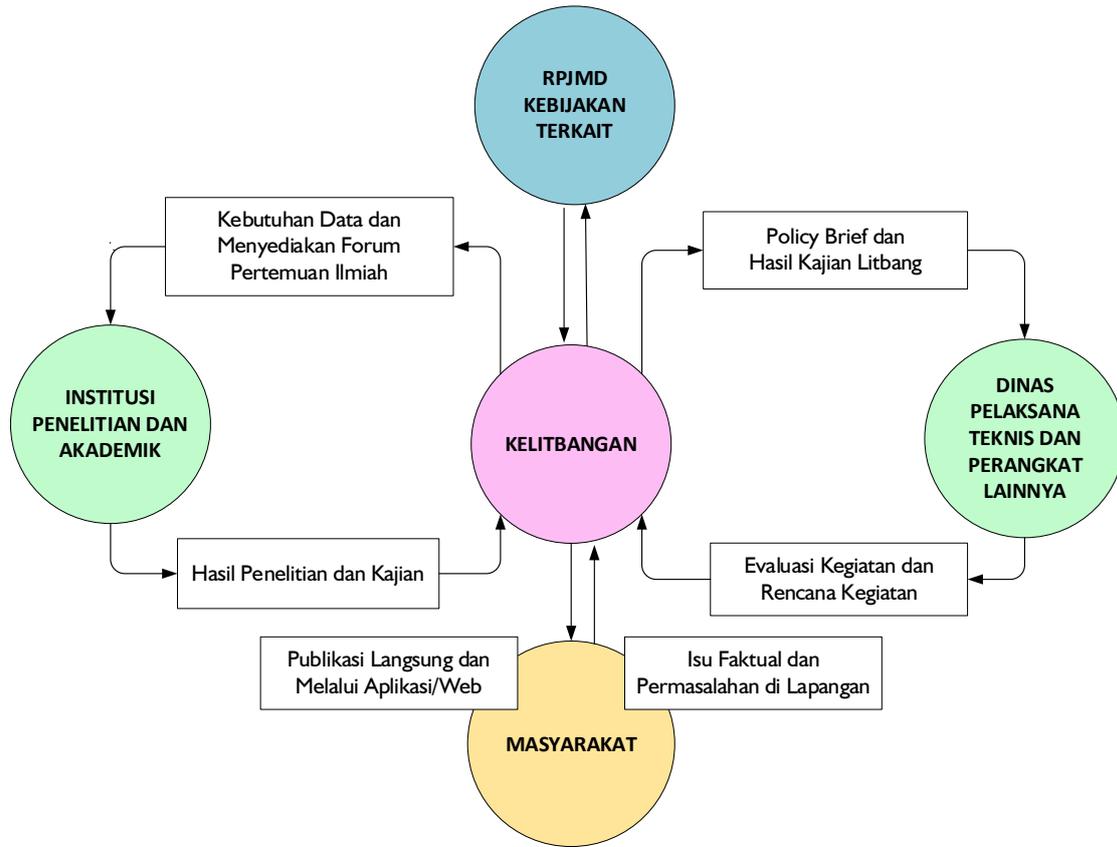
*“KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON SEBAGAI WADAH ASPIRASI DAN
 KEBIJAKAN ILMIAH YANG MUDAH,
 TERBUKA DAN TERINTEGRASI”*

Dari konsep tersebut agar dapat diperoleh persamaan persepsi maka artinya dijabarkan sebagai berikut

KONSEP	ARTI	KETERANGAN
MUDAH	Mudah diakses oleh siapapun mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan dikembangkan	Memudahkan instansi OPD lainnya dalam menentukan acuan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan
TERBUKA	Terbuka dalam penyampaian dari hasil penelitian yang telah dilakukan.	Fungsi Litbang diartikan sebagai wadah aspirasi terbuka yang menentukan kebijakan pembangunan.
TERINTEGRASI	Data yang terintegrasi antar stakeholder (Dinas pelaksana teknis- Masyarakat-Instansi Penelitian/Akademik)	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi dalam hal substansi hasil penelitian sesuai dengan RPJMD/kebijakan terkait Integrasi dari seluruh stakeholder terkait pembangunan

Gambaran konsep strategi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon Dalam pelaksanaan penelitian di Kabupaten Cirebon perlu adanya dukungan dan keterlibatan para pelaku kelitbangan lainnya yang memiliki alur komunikasi, kordinasi, kerjasama serta kolaborasi yang baik sehingga dapat optimal memperkuat dan mengembangkan inovasi di daerah.

Gambar 6.1 Konsep Strategi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Cirebon



6.2 STRATEGI PENELITIAN

Sinergisitas adalah salah satu kunci strategi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon. Sinergisitas yang baik antar pemerintah dan semua stakeholder kelitbangan akan mempermudah rencana yang disusun untuk dimonitor lebih terarah dan dievaluasi. Namun dalam pelaksanaannya sinergisitas adalah tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah maupun pelaku kelitbangan lainnya dalam kegiatan penelitian dan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Berikut strategi untuk meningkatkan sinergisitas antar pelaku kelitbangan.

Tabel 6.1 Strategi dan Output Strategi Kelitbangan

STRATEGI	OUTPUT STRATEGI
<p>Strategi 1 Peningkatan Kualitas Litbang Kabupaten Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kompetensi penelitan pada lingkup instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon
	<p>Litbang Kabupaten Cirebon memiliki kompetensi yang baik untuk melakukan penelitian dan kajian ilmiah sehingga akan diperoleh hasil penelitian dan kajian ilmiah yang</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan mudah terakses dan dipahami oleh semua pelaku kelitbang 	berkualitas dan menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon
<p>Strategi 2 : Litbang Kabupaten Cirebon terbuka bagi peneliti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Litbang memfasilitasi dan mendukung pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi penelitian dan akademisi untuk kepentingan Kabupaten Cirebon • Litbang mendukung kebutuhan peneliti yang akan diajukan di Kabupaten Cirebon • Litbang mengadakan kegiatan pertemuan ilmiah tahunan yang terbuka bagi semua pelaku kelitbang untuk membahas permasalahan Kabupaten Cirebon 	Litbang Kabupaten Cirebon dapat mendokumentasikan hasil penelitian di Kabupaten Cirebon secara keseluruhan
<p>Strategi 3 Litbang Kabupaten Cirebon yang berintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Litbang melakukan penulisan usulan kebijakan berdasarkan penelitian yang didokumentasikan maupun dibuat sendiri secara rutin ke dinas terkait • OPD Teknis aktif memberikan usulan kegiatan penelitian kepada Litbang untuk dilakukan kajian. • Peningkatan kesadaran kordinasi antar lintas sector dan lintas lembaga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah • Perlunya peningkatan kerjasama pemerintah dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan penelitian seperti komunitas masyarakat, NGO, CSR, dan perguruan tinggi baik dari aspek pembiayaan maupun kerjasama penelitian lainnya. • Menyesuaikan kegiatan penelitian dengan tujuan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon sehingga kajian yang dilakukan dapat mendukung kegiatan pembangunan yang telah direncanakan • Litbang melakukan publikasi penelitian secara langsung pada masyarakat 	Litbang dapat menjadi pusat referensi kajian dan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pembangunan dan mengambil kebijakan

6.3 ROADMAP KELITBANGAN KABUPATEN CIREBON 2019-2024

Berdasarkan konsep dan strategi penelitian dan pengembangan yang diusulkan diatas selanjutnya dirinci roadmap kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat dilakukan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019-2024. Dalam penyusunan roadmap kegiatan penelitian telah dikelompokkan berdasarkan lingkup kelitbangan dan fokus penelitian nasional. Dengan demikian roadmap yang dihasilkan dapat lebih objektif dan aplikatif untuk dilakukan. Berikut merupakan pendetailan dari roadmap kegiatan penelitian tersebut

Bidang Kelitbangan Utama	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Stakeholder	Pendanaan	Skala Kegiatan
	INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN) • EWS (Early Warning System) • Laporan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Elektronik (PPI Elektronik) • GEMPOL BERSEHATI GEMPOL : Gerakan Memberi Pelayan Profesional BERSEHATI : Bersih, Sehat, Aman, Tertib, dan Indah • Pengembangan Mobile Aplikasi Kecamatan	2021 2021 2021 2021	Bangsa dan Politik Penanggulangan Bencana Daerah RSUD Waled Kecamatan		
Perekayasaan	• Website Sekretariat Daerah • Website Dinas Perdagangan dan Perindustrian • SIM Tera • Sim Industri • Website Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah • SIM Kebudayaan • Website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan • SIM Absensi Online	2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022-2024	Sekretariat DPRD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas KUMKM Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya		Lokal

Bidang Kelitbangan Utama	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Stakeholder	Pendanaan	Skala Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • SIM Informasi Pelayanan • SIM Informasi Pelayanan 	2021 2021	Manusia Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
Penerapan	<ul style="list-style-type: none"> • Whistleblowing System • Sistem informasi dapodik • Website Dinas Kesehatan • SIM Pemadam Kebakaran • Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dan Pencapaian Pola PPH konsumsi dalam upaya mewujudkan Cirebon bebas rawan pangan • Website Dinas Pertanian • SIM Pertanian • Sistem Informasi Bisnis Perikanan • Pusat Kuliner Sumber • Website Satpol PP • SIM Satpol PP • Call Centre Satpol PP • Website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan • Aplikasi perpustakaan digital • SIM Kearsipan • Layanan e-book 	2024 2021 2023 2021-2024 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2023-2024 2021-2024 2021-2024 2022	Inspektorat Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pemadam Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Satpol PP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Lokal

Bidang Kelitbangan Utama	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Stakeholder	Pendanaan	Skala Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Otomasi Perpustakaan Pembentukan dan Pembinaan Model Desa PRIMA 2021 Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SIM Dashboard Kepegawaian Sim Informasi Kepegawaian SIM Kinerja SIM Informasi SKP Pegawai SIM Absensi Online 2021 SIM Laporan Kinerja Pemerintahan SIM Informasi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan barang dan Jasa Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan lokal Sistem Pelaporan Pengadaan Data Pengadaan SIKAMU (sistem kendali administrasi umum) RSUD Arjawinangun 2021 GEMPOL BERSEHATI GEMPOL : Gerakan Memberi Pelayan Profesional BERSEHATI : Bersih, Sehat, Aman, Tertib, dan Indah Pengembangan Mobile Aplikasi Kecamatan SICEPAK PLUS PPOB 21 	2022 2021 2021-2024 2022-2024 2022-2024 2021-2024 2021-2024 2021 2021-2024 2022-2024 2021-2024 2021-2024 2021-2024 2021-2024 2021 2022 2022 2021 2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sekretariat Daerah RSUD Waled Kecamatan		

Bidang Kelitbangan Utama	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Stakeholder	Pendanaan	Skala Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi sarana prasarana cipta karya • Sistem informasi pengawasan penataan ruang • Website Dinas Perumahan • SIM Perumahan • SIM SPAM (Sistem Pelayanan Air Minum • SIM untuk Pengelolaan Air • Limbah • SIM Bangunan Gedung ber IMB/SLF • SIM Infrastruktur Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum • SIM Pertanahan • Program Daerah Sertifikat tanah • Inventarisasi data aset penyusunan database perumahan di kabupaten cirebon • Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemda yang Dimohon SKPD serta Updating Database Pertanahan • Website Dinas Pemadam Kebakaran • Website Dinas Sosial • SIM SLRT • Sim PMKS • Aplikasi e-akreditasi • Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang terintegrasi • Penerbitan AK.1 (kartu pencari kerja) 	<p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p>	<p>Dinas PERumahan</p> <p>Dinas Perumahan</p> <p>Dinas Pemadam Dinas Sosial</p>		

Bidang Kelitbangan Utama	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Stakeholder	Pendanaan	Skala Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • SIM Pertanian • Pemberdayaan masyarakat dalam pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban • Inventarisasi data aset penyusunan database perumahan di kabupaten cirebon • Pemeriksaan sapi betina produktif di RPH • Optimalisasi pelayanan pemeriksaan antemortem dan postmortem melalui jaringan informasi paguyuban rumah potong hewan Battembat • Website Dinas Kelautan dan Perikanan • Sistem Informasi Bisnis Perikanan • Sistem Perikanan Tangkap • Sistem Perikanan Budidaya • Website Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Sim RPAS • SIM Tera • Website Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen • SIM Industri • Sim metrologi legal • SIM Infomrasi Kebutuhan Pokok Masyarakat • Pusat Kuliner Sumber • Website Satpol PP 	<p>2021-2024</p> <p>2022-2024 2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2023-2024</p> <p>2023-2024</p>	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>Satpol PP</p>		

Bidang Kelitbangan Utama	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Stakeholder	Pendanaan	Skala Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Sim Pembangunan Kemiskinan • Sim Informasi Monitoring • Sim informasi Surat Menyurat SKPD • Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan • Website BKAD • SIPKD (sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) • Sim BMD • SIM Dashboard Keuangan • Transformasi Layanan Melalui Penjaminan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah • PETERPAN (Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Penyediaan Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan) di Kabupaten Cirebon • SIREBON (Sistem Informasi Rekonsiliasi Perbendaharaan Online untuk SKPD di Kabupaten Cirebon) • Sistem Informasi Rekonsiliasi Aplikasi STS Online (SIRISOL) • Sistem Informasi Rekonsiliasi Online SKPD (SIRAOS) • Aplikasi SIRUP CILOK (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Cirebon Lokal) 	<p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2021-2024</p> <p>2022-2024</p> <p>2021-2024</p>	<p>BKAD</p>		

Bidang Kelitbangan Utama	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Stakeholder	Pendanaan	Skala Kegiatan
	Daerah Online	2021-2024			
	• Optimalisasi Penyusunan Data Potensi Pajak Daerah Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Potensi Pajak Daerah (SIPJEH)		Diskominfo		
	• Website Diskominfo	2021-2024			
	• Sim Pemkab	2021-2024			
	• Sim Direktori	2021-2024			
	• Sim email Pemkab	2021-2024			
	• Sim PPID	2021-2024			
	• Sim Pembangunan	2021-2024			
	• Sim informasi Surat Menyurat SKPD	2021-2024			
	• Sim informasi Pemkab	2021-2024			
	• SIM Laport		Sekretariat Daerah		
	• Layanan pendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2021-2024			
	• Podcat Sisi Bunda	2022-2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	• APLIKASI SIORMAS (SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN)	2022-2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	• EWS (Early Warning System) 2022-2024	2022-2024	RSU Waled		
	• SIKAMU (sistem kendali administrasi umum) RSUD Arjawinangun	2022-2024			

Bidang Kelitbangan Utama	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Stakeholder	Pendanaan	Skala Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pereseapan Obat Elektronik • Laporan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Elektronik (PPI Elektronik) 2022-2024 • GEMPOL BERSEHATI GEMPOL : Gerakan Memberi Pelayan Profesional BERSEHATI : Bersih, Sehat, Aman, Tertib, dan Indah • Pengembangan Mobile Aplikasi Kecamatan • SICEPAK PLUS • PPOB • SAMSAT DELIVERY 	2023-2024 2023-2024 2022-2024 2022-2024 2022-2024	Kecamatan		
Evaluasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Website Dinas Kesehatan • Website Dinas P2KBP3A • SIM P2KBP3A • SIM Informasi Surat menyurat SKPD <ul style="list-style-type: none"> • Sitem barang Kabupaten Cirebon 	2022 2024 2024 2021-2024 2021-2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas P2KBP3A <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan dan Perindustrian <ul style="list-style-type: none"> • BKAD 	Dinas Kesehatan BKAD	Lokal